

ARIF ROHMAN



PENDIDIKAN *Komparatif*

Dasar-Dasar
Teori Perbandingan
Pendidikan Antar Bangsa

Asweja



PENDIDIKAN KOMPARATIF

Dasar– Dasar Teori Perbandingan Pendidikan Antar Bangsa

**Oleh:
Arif Rohman**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNY 2013**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENDIDIKAN KOMPARATIF
Dasar-Dasar Teori Perbandingan
Pendidikan Antar Bangsa

x + 232 Halaman, 15.5 x 23 cm

ISBN 10: 602-7762-72-1

ISBN 13: 978-602-7762-72-5

Desain Cover

Agung Istiadi

Penata Isi

Cak Mad

Cetakan I: 2010

Cetakan II: 2011

Cetakan III: 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya
dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun
elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin
dari penerbit

Penerbit:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik,

Sleman, Yogyakarta

Telp.: (0274) 4462377

e-mail: aswajapressindo@gmail.com

Website: www.aswajapressindo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas hidayah dan inayah-Nya yang tiada tara kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas dan beramal utama seperti biasa tanpa aral apapun jua. Bagi penulis pribadi, dengan hidayah dan inayah dari ilahi robbi tadi menjadi inti ketenangan hati dan memberi bekal diri kami untuk terus mengabdikan menggoreskan pena lidi demi pengembangan insani, yakni terwujudnya karya cipta pustaka yang salah satunya adalah pustaka yang sekarang ada di tangan pembaca yang mulia. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat salam semoga tetap tercurah kepada pribadi panutan dan pribadi pencerah zaman, yaitu Rosulullah Muhammad SAW.

Selanjutnya, penulis ingin mengutarakan hal penting dalam kalimat pengantar ini bahwa buku yang hadir di hadapan pembaca sekarang ini merupakan buku yang menelaah teori dan praktik penelitian terhadap fenomena dan aksi pendidikan secara lintas teritorial, historis, maupun sosiokultural, baik dalam satu negara maupun antarnegara. Oleh karenanya, buku ini akan memaparkan kajian-kajian tentang relasi antara praktek edukasi dan kehidupan masyarakat, aneka potret penyelenggaraan pendidikan di beberapa kawasan, aneka kecenderungan pendidikan dunia seperti sistematisasi, internasionalisasi, dan privatisasi pendidikan beserta isu-isu dan kajian pendidikan kontemporer lainnya di banyak negara dan kawasan dunia.

Banyak ahli pendidikan Komparatif meyakini bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kemunduran peradaban suatu bangsa adalah kemandegan praktek penyelenggaraan pendidikannya, sedangkan penyebab terjadinya kemandegan praktek penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah rendahnya tingkat inovasi pendidikan, dan rendahnya tingkat inovasi pendidikan antara lain adalah kurangnya membandingkan praktek pendidikannya dengan praktek pendidikan bangsa lain.

Pernyataan di atas, senada dengan apa yang dinyatakan oleh Harold J. Noah (Postlethwaite, 1988) bahwa dengan melakukan perbandingan

pendidikan antar bangsa kita dapat memperoleh pengetahuan tentang keadaan pendidikan di beberapa negara atau kawasan. Dengan mengetahui keadaan pendidikan di banyak negara atau kawasan, kita dapat mengambil manfaat positif dari pengetahuan tersebut untuk diterapkan dalam membangun pendidikan di negeri sendiri. Secara lebih luas, Harold J. Noah menyebutkan bahwa manfaat melakukan studi perbandingan pendidikan adalah: (1) kita dapat mendeskripsikan sistem, proses, dan hasil-hasil pendidikan; (2) dapat membantu dalam mengembangkan praktek dan kelembagaan pendidikan; (3) dapat memperoleh kejelasan kaitan antara sekolah dengan masyarakat; dan yang lebih penting lagi adalah (3) kita dapat memperoleh kesimpulan umum tentang keadaan pendidikan di beberapa negara atau kawasan sehingga kita dapat mengambil manfaat positifnya untuk diterapkan dalam membangun pendidikan di negeri sendiri.

Secara simplistik, mayoritas bangsa-bangsa di dunia sepertinya mengalami kemajuan yang ditandai dengan adanya kemakmuran (*prosperity*) dan kesejahteraan (*welfare*). Namun kenyataannya, kemajuan tersebut hanyalah fatamorgana dan semu semata. Kenyataan yang sebenarnya adalah meningkatnya problem internal dan eksternal bangsa-bangsa di dunia baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Problem paling nyata dihadapi bangsa-bangsa di dunia sekarang ini adalah kenyataan dunia yang semakin berubah teramat cepat. Menurut James Martin (2006), dewasa ini dunia tengah mengalami perubahan luar biasa dalam banyak dimensi. Dalam karyanya berjudul *"The Meaning of the 21st century A vital blueprint for ensuring our future"*, James Martin menyebutkan bahwa sekarang ini tengah berlangsung perubahan amat mendadak, dahsyat, dan bersifat revolutif dalam segenap aspek kehidupan manusia sehingga terjadi apa yang disebut *"the revolutionary suddenness"*. Keadaan semacam ini mengindikasikan adanya trend perkembangan masa depan masyarakat dunia menuju pada situasi yang semakin kompleks dan runyam. Hal ini menuntut pada semua bangsa di dunia untuk memiliki pemahaman dan daya kritis dalam memahami perubahan beserta implikasinya dengan dibarengi aneka usaha korelasi dan kooperasi dalam segenap bidang kehidupan termasuk diantaranya adalah bidang pendidikan. Oleh karena itu, tidaklah salah bila pendidikan

perbandingan dan perbandingan pendidikan yang telah banyak dilakukan para ahli dewasa ini sehingga semakin memperoleh relevansinya.

Pelan namun pasti, kesadaran global di kalangan bangsa-bangsa di dunia untuk menciptakan dunia yang makmur, sejahtera, dan aman sudah mulai meluas. Potret dunia sebelumnya yang diwarnai oleh aneka intrik, konflik antar bangsa, bahkan perang harus sudah diakhiri. Banyak ahli bekerjasama dengan aneka jaringan institusi dunia telah mengupayakan aneka hal demi terwujudnya dunia yang makmur, sejahtera, dan aman yang abadi. Salah satu diantaranya adalah melalui penyadaran kepada semua pihak, utamanya kepada generasi penerus berupa pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif.

Demikianlah sekelumit pemaparan pokok-pokok pikiran dan isi buku dalam kalimat pengantar ini, semoga menjadi pemicu bagi pembaca untuk mengetahui lebih jauh isi buku ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini ijinlah penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan inspirasi, bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada penulis. Lebih-lebih ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada orang tua kandung serta para guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Pascasarjana program Doktor yang telah menggembleng penulis dengan sabar dan kasih sayang. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada para senior dan teman-teman kolega di jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan yang telah mengasah dan mengasuh penulis melalui diskusi dan aneka perbincangan ringan secara informal dalam banyak kesempatan. Kepada istri dan anak-anak yang telah sudi merelakan kepada penulis untuk mengurangi waktu berkumpul kepadanya demi selesainya buku ini, juga penulis sampaikan terima kasih setulus-tulusnya. Atas jasa baik semua pihak di atas semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal.

Terakhir, penulis berharap dengan segenap kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku ini semoga dapat bermafaat bagi para pembaca untuk memahami sekelumit pendidikan komparatif sebagai studi pendidikan antar bangsa dan antar budaya. Penulis juga berharap semoga buku ini bermanfaat sebagai salah satu penopang dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. *Amin ya robbal alamin.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
----------------------------	------------

DAFTAR ISI	vii
-------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN	1
--------------------------	----------

A. Pengantar ke Arah Pendidikan Komparatif.....	1
-------------------------------------------------	---

B. Pengertian Pendidikan Komparatif	5
-------------------------------------------	---

C. Kedudukan Pendidikan Komparatif	9
------------------------------------------	---

D. Tujuan Studi Pendidikan Komparatif	10
---------------------------------------------	----

E. Cakupan Studi Pendidikan Komparatif	15
----------------------------------------------	----

F. Ringkasan	16
--------------------	----

BAB II

KAITAN ANTARA PENDIDIKAN INTERNASIONAL, GLOBAL, DAN KOMPARATIF	19
---------------------------------------------------------------------------------	-----------

A. Cita-Cita Mewujudkan Perdamaian Dunia	19
------------------------------------------------	----

B. Pendidikan Internasional dan Sejarahnya di Banyak Kawasan	22
-----------------------------------------------------------------------	----

1. Pendidikan Internasional di Eropa dan Amerika	23
--------------------------------------------------------	----

2. Pendidikan Internasional di Asia Barat dan Selatan	25
-------------------------------------------------------------	----

3. Pendidikan Internasional di Asia Timur dan Tenggara	26
--------------------------------------------------------------	----

C. Pengembangan Pendidikan Komparatif	29
---------------------------------------------	----

D. Pengembangan Pendidikan Global	31
-----------------------------------------	----

E. Perbandingan pendidikan Internasional, Global, dan Komparatif	35
E. Ringkasan	38

BAB III

PENDIDIKAN KOMPARATIF SEBAGAI STUDI

ANTAR BANGSA DAN ANTAR BUDAYA	43
A. Konsep Dasar Bangsa	43
B. Konsep Dasar Budaya	47
C. Pendidikan Komparatif sebagai Studi antar Bangsa dan Budaya	50
D. Ringkasan	60

BAB IV

PERSPEKTIF METODOLOGIK

STUDI PENDIDIKAN	65
A. Metodologi Pengetahuan Ilmiah	65
B. Fenomena Pendidikan sebagai Obyek Studi Pendidikan	74
C. Prinsip-Prinsip Etika dalam Studi Pendidikan	83
D. Komparasi sebagai Alternatif Metode Penelitian Pendidikan	87
E. Ringkasan	89

BAB V

METODOLOGI KOMPARASI PENDIDIKAN **95** |

A. Sendi-Sendi dalam Komparasi Pendidikan	95
1. Tiga Tahap Komparasi dalam Pendidikan	96
2. Syarat Komparabilitas	98
B. Metode-Metode Studi dalam Komparasi Pendidikan	100
C. Pengembangan Metode dalam Melakukan Komparasi Pendidikan	106
D. Ringkasan	109

BAB VI

DIMENSI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN	111
A. Perspektif Teoritik Hubungan Pendidikan dan Masyarakat.....	111
B. Kaitan Dimensi sosial masyarakat dengan Pendidikan	113
C. Kaitan Dimensi Ekonomi Masyarakat dengan Pendidikan	116
D. Kaitan Dimensi Politik Masyarakat dengan Pendidikan	119
E. Teori-Teori Pengiring Pengembangan Pendidikan	120
F. Ringkasan	123

BAB VII**POTRET PENDIDIKAN**

DI NEGARA-NEGARA EROPA	127
A. Potret Pendidikan di Jerman	127
B. Potret Pendidikan di Perancis	150
C. Potret Pendidikan di Inggris	162

BAB VIII**POTRET PENDIDIKAN**

DI NEGARA-NEGARA ASIA	177
A. Pendidikan di Malaysia	177
B. Pendidikan di Thailand.....	192
C. Pendidikan di India	205

DAFTAR PUSTAKA.....	225
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

Setelah mencermati dan mengkaji dengan seksama isi paparan pada bab pendahuluan ini, Anda akan dapat:

1. Memahami pengantar ke arah pendidikan komparatif
2. Memahami pengertian Pendidikan Komparatif
3. Mengetahui Pendidikan Komparatif sebagai disiplin ilmu, yang kedudukannya sebagai salah satu fondasi dari ilmu pendidikan.
4. Mengetahui secara jelas tujuan studi Pendidikan Komparatif
5. Memahami ruang lingkup studi Pendidikan Komparatif

A. Pengantar Ke Arah Pendidikan Komparatif

"Dewasa ini dunia telah mengalami perubahan sangat mendadak, dahsyat, dan revolutif dalam segenap aspek kehidupan umat manusia", demikian pernyataan James Martin dalam suatu karyanya berjudul *The Meaning of the 21st century A vital blueprint for ensuring our future* (2006). Pernyataan itu kemudian dipahami para ahli sebagai fenomena mengkhawatirkan yaitu *"the revolutionary suddenness"*. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya trend perkembangan masa depan masyarakat dunia menuju pada situasi yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari banyak hal, seperti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekspektasi masyarakat, serta akibat-akibat lain baik yang direncanakan maupun yang natural seperti bencana alam.

Kemajuan umat manusia tersebut terlihat pada kemajuan mayoritas bangsa-bangsa di dunia sesudah mencapai kemakmuran (*prosperity*) dan kesejahteraan (*welfare*). Kemajuan ini menandai adanya peradaban baru umat manusia dengan segenap piranti yang memanjakannya. Namun demikian kemajuan ini tidak berarti membuat mereka terlena dengan

kemanjaan dan terbebas dari problem kehidupan, yang terjadi justru mayoritas bangsa-bangsa di dunia menjadi terilit oleh aneka problem internal baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Fritjof Capra (1997) menunjuk aneka problem kehidupan tersebut antara lain terlihat dari merebaknya penyakit virus HIV/aids, meningkatnya kriminalitas, ancaman senjata nuklir, polusi, inflasi, dan krisis energi. Bahkan beberapa yang belum disinggung oleh Fritjof Capra oleh beberapa ahli ditambahkan seperti ancaman virus flu burung (H2N1) dan flu babi (H1N1), pemanasan global (*global warming*), ledakan penduduk (*population*), merebaknya prasangka (*prejudice*), menguatnya konflik (*conflict*) dan melemahnya perdamaian (*peace*).

Beberapa bangsa di dunia mencoba memecahkan aneka problem internal tersebut melalui banyak instrumen, salah satunya adalah melalui pendidikan. Hal ini seperti dilakukan oleh Amerika Serikat, telah memanfaatkan pendidikan sebagai mekanisme utama untuk memperbaiki aneka problem kehidupan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Peter W. Cookson and Barbara Schneider (1995), "*education as the primary mechanism for redressing the problem of social life*". Selanjutnya pada bulan Juni 1979, di Amerika Serikat telah dibentuk organisasi yang didirikan Jerry Falwel, seorang juru dakwah di televisi dan pastor Gereja Baptis Thomas Road di Lynchburg, Virginia. Organisasi ini dibentuk sebagai tanggapan atas merebaknya aneka penyimpangan sosial di AS seperti pornografi, aborsi, dan homoseksual. Ketiganya dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai bentuk penyimpangan moral. Mereka lebih mempercayai pendidikan keluarga dalam bentuk kendali orang tua siswa dari pada sekolah, dan mendorong supaya ada kegiatan untuk berdoa secara sukarela di kelas-kelas sekolah sebelum pelajaran dimulai. Mereka meyakini bahwa nilai-nilai moral tradisional dapat menjaga masyarakat AS dari aneka penyimpangan moral yang menghancurkan. Mereka menginginkan supaya sepuluh perintah Allah (hukum Taurat) diterapkan dengan setepat-tepatnya. Amandemen kesetaraan gender mereka tolak, karena dianggap telah membuat perempuan meninggalkan rumah tangga dan menelantarkan anak-anak (Sarbiran, 2009).

Negara-negara selain Amerika Serikat juga banyak yang memecahkan problem internal melalui pendidikan. Cina adalah contoh negara di Asia yang melakukan hal yang sama yakni membangun pendidikan sebagai solusi dalam memecahkan problem internal. Pendidikan di Cina

diarahkan agar dapat mengembangkan pada diri anak memiliki sikap dalam bentuk pengabdian sosial (*social service*). Model individu ideal di Cina adalah individu yang dapat mendedikasikan dirinya untuk membangun masyarakat baru Cina. Pengabdian sosial kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerelaan berkorban (*willing sacrifice*) atau pengorbanan diri (*self sacrifice*) dan kerja keras (*hard work*), (Philip G. Albach, Robert F. Arno, and Gail P. Kelly, 1982).

Baik Amerika Serikat maupun Cina adalah contoh yang mewakili beberapa negara di dunia dewasa ini yang menjadikan pendidikan sebagai solusi dalam memecahkan problem internal. Hal inilah yang kemudian dapat dilihat adanya banyak negara yang berlomba dalam membangun pendidikan di tempat masing-masing menuju pada kondisi yang lebih maju dan berkualitas.

Menurut William Glasser (1993), pembangunan kualitas pendidikan dimulai dengan menjelaskan lima kebutuhan dasar manusia, yaitu: cinta (*love*), kekuatan (*power*), kebebasan (*freedom*), kesenangan (*fun*), dan keberlangsungan (*survival*). Berangkat dari kebutuhan dasar manusia tersebut Glasser mengartikan kualitas sebagai: "*anything we experience that is consistently satisfying to one or more of these basic needs*". Untuk itu pendidikan berkualitas dapat dipastikan selalu berhubung-an dengan usaha dari satuan pendidikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi segenap *stakeholders*. Jerome S. Arcaro (1995) menyebutkan bahwa dasar misi peningkatan kualitas dari satuan pendidikan adalah mengembangkan program layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna (*stakeholders*), seperti siswa dan masyarakat.

Untuk mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas tersebut harus diawali dengan kesepakatan bersama dari para aktor pendidikan, dalam hal ini dewan sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga administrasi, dan komunitas di sekitar sekolah secara kolektif bertekad mendedikasikan dirinya demi perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah. Visi kualitas sekolah difokuskan pada kebutuhan pengguna atau konsumennya, mendorong keterlibatan total komunitas dalam penyesuaian program, mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, menambah sistem penunjang yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan demi tercapainya hasil pendidikan yang lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jerome S. Arcaro (1995), tentang lima pilar yang dapat membe-rikan arahan para aktor untuk peningkatan kualitas sekolah, yaitu: 1) berfokus kepada pelanggan, dalam hal ini siswa, orangtua, dan masyarakat secara umum; 2) keterlibatan total dari para aktor di sekolah; 3) peng-ukur-an ter-hadap nilai tambah dari prakarsa mutu untuk siswa dan masyarakat; 4) komitmen dari para aktor untuk menegakkan pilar yang ke lima, yaitu: 5) per-baik-an mutu secara berkelanjutan

Untuk mewujudkan lima pilat di atas, maka terdapat tiga strategi peningkatan mutu yang menekankan hasil (*The Output Oriented Strategy*), menekankan proses (*The Process Oriented Strategy*), dan strategi komprehensif (*The Comprehensive Strategy*) dengan segenap konsekuensi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal ini, ada lima formula implementasi strategi sebagaimana dikemukakan Ronald Edmonds (Wayne K. Hoy, 2005). Yaitu: (1) *Strong leadership by the principal, especially in intructional matters*; (2) *High expectations by teacher for student achievement*, (3) *An emphasis on basic skills*; (4) *An orderly environment*, (5) *Frequent, systematic evaluations of student*.

Aneka inovasi pendidikan baik melalui menggali sumber-sumber kreatif dari dalam negeri maupun melalui studi komparasi pendidikan dengan negara lain yang dianggap lebih berhasil, menjadikan upaya peningkatan kualitas sekolah lebih mengena. Pada awal abad 19 Masehi, usaha peningkatan kualitas sekolah melalui studi komparasi telah dilakukan sebagian ahli dengan mengunjungi Prusia. Pada saat itu sistem pendidikan Prusia paling mendapat perhatian dari negara-negara Eropa, karena dianggap telah mengalami serangkaian kemajuan luar biasa, (I.N. Thut dan Don Adams, 2005). Sedangkan era dewasa ini, sistem pendidikan yang dianggap baik secara global adalah sistem pendidikan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Mempelajari pendidikan yang diselenggarakan di suatu negara sama artinya dengan mempelajari banyak hal tentang negara lain tersebut. Menurut George ZF. Bereday (1964), "*One studies foreign education not solely to know foreign peoples but also and perhaps most of all to know oneself*". Hal ini disebabkan dimensi kehidupan dalam pendidikan hampir selalu berhubungan dengan dimensi bidang lain dalam masyarakat. Melalui studi komparasi pendidikan, kita dapat mengetahui bagaimana negara lain

merencanakan, menerapkan, dan mengembangkan sistem pendidikannya, (Robert F. Arnove, Gail P. Kelly, and Philip G. Altbach, 1982).

Berdasarkan faktor-faktor sebagaimana disebut di atas maka studi komparasi pendidikan menjadi semakin banyak peminat dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang teramat penting. Oleh karena itu di bawah ini akan kita paparkan lebih lanjut mengenai seluk beluk pendidikan komparatif.

B. Pengertian Pendidikan Komparatif

Sebagai disiplin ilmu, Pendidikan Komparatif telah semakin berkembang dan diminati oleh banyak orang seiring dengan keinginan mayoritas bangsa-bangsa di dunia yang berusaha mempelajari aneka sistem pendidikan di tempat lain dalam rangka memperluas cakrawala di luar batas negerinya sendiri. Upaya bangsa-bangsa tersebut merupakan wujud keinginan untuk melakukan komparasi pendidikan, sehingga beberapa hal positif dari penyelenggaraan pendidikan di tempat lain dapat diadopsi dan diterapkan di dalam negerinya sendiri.

Pendidikan Komparatif memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu ini dirintis oleh beberapa ahli pada pertengahan abad ke 13 Maschi yang hadir dengan aneka latar belakang. Pada satu sisi, kehadiran ilmu ini diawali oleh adanya keprihatinan sebagian masyarakat dunia tentang berlarut-larutnya pola hubungan antara bangsa yang diwarnai rasa kecurigaan (*distrustfulness*) dan permusuhan (*hostility*) satu sama lain serta rendahnya pengetahuan masing-masing bangsa terhadap kehidupan bangsa lain. Akibatnya banyak terjadi konflik di banyak kawasan dunia yang berasal dari kesalahfahaman satu dengan lainnya serta kuatnya sentimen subyektif pada diri masing-masing. Sedang pada sisi yang lain, penyusunan ilmu ini dipicu oleh meningkatnya tuntutan para ahli baik yang bersifat praktis maupun akademis untuk memantapkan studi pendidikan komparatif menjadi sebuah disiplin ilmu sebagai bentuk akomodasi terhadap maraknya upaya perbandingan pendidikan antar bangsa.

Secara etimologis *pendidikan komparatif* berasal dari kata pendidikan dan komparatif. Menurut kamus bahasa Inggris *Oxford Learner's Pocket Dictionary* kata pendidikan diartikan sebagai pembelajaran dan pelatihan (*education is instruction and training*). Sedangkan kata komparatif diartikan

sebagai keadaan yang berkaitan dengan usaha membandingkan. Kata komparatif berasal dari kata kerja bahasa Inggris 'to compare' (membandingkan) atau kata benda 'comparison' (perbandingan), sehingga 'comparative' diartikan sebagai sesuatu yang bersifat membandingkan. Oleh karena itu *Pendidikan Komparatif* secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Maka tidak mengherankan bila istilah *Pendidikan Komparatif* sering diucapkan dengan istilah *Pendidikan Perbandingan*, karena keduanya memiliki pengertian sama.

Istilah lain selain *Pendidikan Perbandingan* adalah *Perbandingan Pendidikan*. Kedua istilah ini sering dicampuradukkan satu sama lain, sehingga banyak orang yang mengartikan sama antar keduanya, padahal sebenarnya kedua istilah ini memiliki arti berbeda. *Pendidikan Perbandingan* merupakan ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Sedangkan *Perbandingan Pendidikan* adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Dengan kata lain, *Pendidikan Perbandingan* lebih menekankan pada sisi akademis, yaitu ilmu membandingkan, sedang *Perbandingan Pendidikan* lebih menekankan pada sisi praktis, yaitu kegiatan dalam membandingkan.

Selain secara etimologis adalah pemaknaan secara terminologis, yaitu pemaknaan secara utuh tentang aneka konsep. Pemaknaan secara terminologis biasanya kita rujuk dari pendapat ahli. *Pendidikan Komparatif* dipahami oleh para ahli secara beragam sesuai pemahaman kontekstual masing-masing. Beragamnya pemahaman para ahli terhadap *Pendidikan Komparatif* adalah sejalan dengan dinamika perkembangan historis kemunculan ilmu ini. Mengingat perkembangan ilmu ini sudah berlangsung lebih dari dua abad lamanya sejak dirintis oleh Antoine Julien de Paris pada tahun 1817, bahkan sebelumnya telah ada meskipun dilakukan dengan cara yang kurang sistematis.

Secara historis, *Pendidikan Komparatif* sebagai suatu studi telah memiliki sejarah yang amat panjang. Menurut William W. Brickman dalam Postlethwaite (1988) disebutkan bahwa umat manusia telah saling bertukar informasi tentang pendidikan sudah berlangsung sejak jaman kuno, yaitu sejak manusia antar bangsa di dunia ini saling berinteraksi dan melakukan kontak sosial (*social contact*) dalam suatu wadah yang disebut perdagangan (*trade*), peperangan (*warfare*), dan misi keagamaan (*religion missionary*).

Dalam perkembangannya proses interaksi dan kontak sosial antar kelompok masyarakat atau antar bangsa tersebut semakin lama semakin berkembang seiring dengan perjalanan jaman, baik dalam tataran jumlah bangsa yang terlibat maupun tataran mutu interaksi dan mutu kontak sosial antar bangsa. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk beserta dinamika demografinya, tumbuhnya pemahaman terhadap eksistensi bangsa lain, berkembangnya ilmu pengetahuan, serta semakin majunya teknologi dan peradaban umat manusia.

Oleh karena sejarahnya yang amat panjang itulah maka Pendidikan Komparatif ini memiliki arti yang beragam pula sesuai dengan konteks jamannya, di mana masing-masing jaman Pendidikan Komparatif diartikan berbeda (Suryati Sidharto, 1989). Dengan demikian terjadi suatu keragaman pengertian terhadap Pendidikan Komparatif dalam setiap periode jaman.

Meskipun demikian, keragaman pengertian tersebut dapat dipahami lebih sebagai refleksi masing-masing masyarakat dalam setiap periode jaman atas pemenuhan kebutuhan mereka dari pada perbedaan arti yang lebih fundamental. Perkembangan dan keragaman pengertian akan Pendidikan Komparatif ini pada dimensi tertentu justru dapat memperkaya pemahaman secara lebih komprehensif yang sekaligus akan mampu meningkatkan keberfungsian sebagai bidang kajian pendidikan.

Beberapa ahli telah memberikan pengertian tentang Pendidikan Komparatif antara lain I.L. Kandel dalam bukunya '*Comparative Education*' yang mengartikan Pendidikan Komparatif sebagai studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan (William Brickman, 1954). Carter V. Good mengartikan Pendidikan Komparatif sebagai lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri (Imam Barnadib, 1994).

Dua pendapat di atas dapat dicermati bahwa I.L. Kandel lebih menitikberatkan kepada obyek yang perlu dijadikan studi yaitu teori dan praktek pendidikan dengan aneka pengaruh latar belakang, sedangkan

Carter V. Good lebih menekankan pada tujuan studi yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan tentang keadaan pendidikan di luar batas negaranya sendiri. Antara obyek studi dan tujuan studi merupakan dua hal yang penting, sehingga kedua pendapat tersebut saling melengkapi. Meskipun demikian, kita dapat mencatat dua hal pokok yang menjadi fokus kajian dari studi Pendidikan Komparatif menurut pendapat I.L. Kandel (Imam Barnadib, 1994), yaitu:

1. Obyek utama studinya berupa teori dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung sekarang, bukan yang telah terjadi atau akan terjadi.
2. Faktor-faktor lain di luar obyek utama tetapi mempunyai pengaruh amat kuat terhadap obyek utama perlu diperharikan, yaitu faktor sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya sebagai *intangible factors*.

Berbeda dari dua ahli di atas, Nicholas Hans mengartikan *Pendidikan Komparatif* lebih ringkas, yaitu sebagai ilmu yang mempelajari perbandingan sistem-sistem persekolahan. Suryati Sidharto (1989) dalam bukunya *Pendidikan di Negara Berkembang Suatu Tinjauan Komparatif* mengartikannya sebagai suatu ilmu yang mempelajari perbandingan antara pendidikan formal, non-formal dan informal baik dalam satu negara dari dua sistem yang berbeda maupun antar dua atau lebih negara yang berbeda. Sedangkan Chalidjah Hasan (1995) dalam bukunya *Kajian Perbandingan Pendidikan* menyebutkan bahwa Pendidikan Komparatif adalah usaha menelaah secara lebih mendalam dan luas tentang konsep-konsep pendidikan yang berkembang di dunia. Tiga pendapat terakhir, nampak bahwa definisi yang dirumuskan oleh Nicholas Hans lebih bersifat substantif (*substantive*), definisi dari Suryati sidharto lebih bersifat deskriptif (*descriptive*), sedangkan dari Chalidjah Hasan lebih mendalam (*exhaustive*).

Dari lima pendapat ahli di atas, paling tidak kita dapat mengambil benang merah yang bisa mawadahi keseluruhan makna yang dikandung dalam pengertian *Pendidikan Komparatif*. Secara lengkap dapat dijelaskan bahwa *Pendidikan Komparatif* adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar Negara, yang menyangkut tiga hal: (a) sistem pendidikan formal, non-formal dan informal, (b) teori dan praktek pendidikan, serta (c) latar belakang sosial,

ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan.

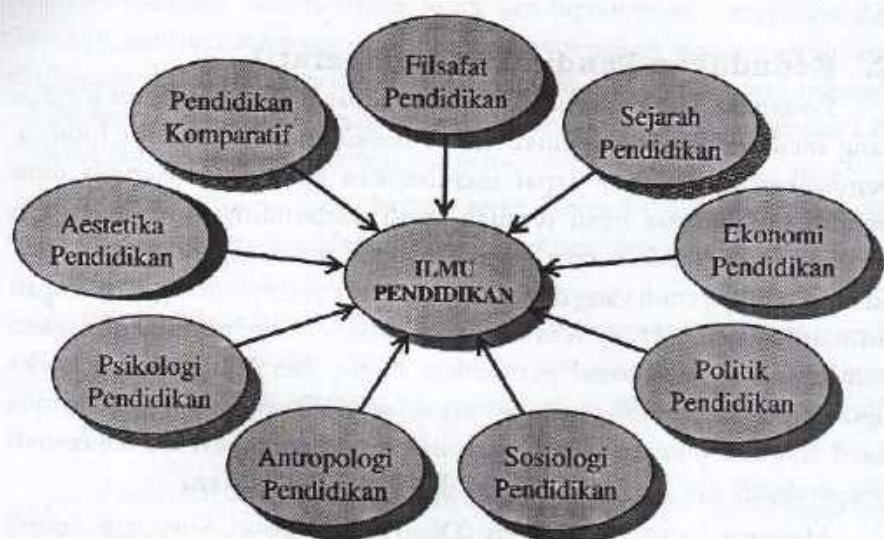
C. Kedudukan Pendidikan Komparatif

Pendidikan Komparatif berkedudukan sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh bangunan *Ilmu Pendidikan*. Sebagai ilmu fondasi, pendidikan komparatif dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antar sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Paling tidak ada dua temuan studi yang diidentifikasi secara awam tentang sumbangan ilmu ini, yaitu: (1) Penemuan pola-pola umum penyelenggaraan pendidikan sebagai trend pendidikan dunia, dan (2) Peretasan aneka tipologi pendidikan yang berlangsung di banyak kawasan dunia. Kesemua hasil temuan pengkajiannya tersebut dapat memperkaya khazanah pengetahuan (*the body of knowledge*) dari Ilmu Pendidikan.

Menurut Van Cleve Morris (Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo, 1995), terdapat dua rumpun ilmu fondasi yang selalu memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan. Kedua rumpun disiplin ilmu fondasi tersebut adalah: (1) *philosophical and historical foundations of education*, dan (2) *sociological and psychological foundations of education*. Sebagai konsekuensi dari dua rumpun ilmu fondasi tersebut selanjutnya berkembang empat macam ilmu fondasi, yaitu: (1) filsafat pendidikan, (2) sejarah pendidikan, (3) sosiologi pendidikan, dan (4) psikologi pendidikan.

Perkembangan berikutnya, ilmu fondasi yang menopang bangunan ilmu pendidikan tidak cukup dengan empat bidang ilmu di atas, akan tetapi berkembang lebih banyak lagi. Sebagaimana dikemukakan Frank H. Blackington dan Robert S. Patterson (Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo, 1995) yang menyebut pendidikan komparatif sebagai fondasi ilmu pendidikan. Dengan demikian, fondasi ilmu pendidikan menurutnya menjadi sebagai berikut: (1) filsafat pendidikan, (2) sejarah pendidikan, (3) ekonomi pendidikan, (4) politik pendidikan, (5) sosiologi pendidikan, (6) antropologi pendidikan, (7) psikologi pendidikan, (8) estetika pendidikan, dan (9) pendidikan komparatif. Berikut ini dapat diilustrasikan kedudukan sembilan ilmu fondasi yang menopang bangunan ilmu pendidikan.

Gambar-1
Fondasi-Fondasi Ilmu Pendidikan



D. Tujuan Studi Pendidikan Komparatif

Semula pendidikan komparatif dipahami oleh banyak pihak sebagai bagian dari sejarah pendidikan, khususnya sejarah pendidikan era kontemporer (*the contemporary part of the history of education*). Maka tidak heran bila studi-studi yang dilakukan para ahli banyak yang berakar pada disiplin ilmu sejarah. Realitasnya, studi pendidikan komparatif mengkaji aneka sistem pendidikan di berbagai negara pada era dewasa ini, studi sejarah pendidikan mengkaji aneka sistem pendidikan pada era masa lampau. Lagi pula, sejarah pendidikan (*history of education*) telah diakui sebagai ilmu yang mapan sebagaimana disiplin ilmu lain seperti sosiologi pendidikan (*sociology of education*), antropologi pendidikan (*anthropology of education*), psikologi pendidikan (*psychology of education*), politik pendidikan (*politics of education*), dan filsafat pendidikan (*philosophy of education*). Namun demikian, karena mayoritas ahli melihat pendidikan komparatif memiliki beberapa kekhususan, maka ilmu ini bukanlah bagian dari ilmu sejarah pendidikan. Kalau memang menjadi bagian dari ilmu sejarah pendidikan, mengapa ia tidak dinamakan saja sebagai 'sejarah kontemporer pendidikan' (*contemporary history of education*)?

Pendidikan komparatif merupakan disiplin ilmu tersendiri bukan bagian dari sejarah pendidikan. Ilmu ini sejajar dengan sejarah pendidikan

dan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, dan lain-lain sebagaimana telah disebut. Kesemuanya itu masing-masing menjadi bagian dari lapangan studi *theory of pedagogy* atau dikenal sebagai ilmu-ilmu fondasi pendidikan (*foundations of education*). Oleh karenanya oleh George Z.F. Bereday (1964), pendidikan komparatif dinyatakan sebagai studi tersendiri yang selalu berusaha mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antar sistem pendidikan (*the similarities and differences among educational systems*).

Pada saat sekarang, pendidikan komparatif merupakan studi yang lebih berorientasi pada daya guna, mengingat sekarang ini semakin meningkat dan semakin banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh banyak hal. Orientasi pada daya guna ini terjadi karena pada saat ini masalah pendidikan semakin lama semakin kompleks dan mendesak ditangani baik yang terjadi di negara-negara maju (*developed countries*), negara sedang berkembang (*developing countries*), maupun negara-negara terbelakang (*under-developing countries*). Beberapa masalah tersebut antara lain:

- 1) Maraknya dehumanisasi akibat industrialisasi baik di negara maju yang sudah berlangsung lama maupun negara-negara berkembang. Bentuk nyata dari gejala dehumanisasi antara lain: pengangguran, gelandangan, kemiskinan, tawuran, kriminalitas, pelecehan seksual, dan lain-lain yang semuanya berimplikasi dan mengimbas pada dunia pendidikan.
- 2) Tuntutan akselerasi pemerataan pendidikan sebagaimana telah diresolusikan pada beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 9 negara berpenduduk padat dunia, ternyata dalam waktu berikutnya berakibat pada dua hal delemaatis. Satu sisi terjadi peningkatan partisipasi penduduk dalam pendidikan, namun di sisi lain berakibat pada turunnya kualitas pendidikan. Oleh karenanya pemerataan kualitas menjadi agenda yang amat mendesak.
- 3) Kesenjangan sosial ekonomi maupun geografis antarkelompok masyarakat berakibat pada sulitnya upaya pemerataan pendidikan, lebih-lebih upaya pemerataan kualitas pendidikan secara agregat.
- 4) Kendala sosio-kultural pada masing-masing masyarakat seperti: ketimpangan dan diskriminasi antargender dalam pemerolehan kesempatan pendidikan, masih banyak terjadi di dalam keluarga

maupun di sekolah. Kendala yang dimaksud antara lain adalah masih adanya nilai-nilai di masyarakat yang menganggap sekolah tidak penting, anak sebagai asset ekonomi, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi.

- 5) Dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam tata dunia baru yang menempatkan negara-negara maju memperoleh banyak keuntungan sementara negara-negara berkembang dan miskin banyak dirugikan. Hal ini berjalan paralel dengan pembangunan pendidikan dimana pendidikan di negara maju menjadi semakin mapan, sementara pendidikan di negara berkembang dan miskin berjalan melambat.

Hal-hal di atas sesungguhnya membutuhkan ikhtiar terbaik untuk membangun pendidikan ke arah yang lebih efektif dan berkualitas. Dalam upaya membangun pendidikan dan meningkatkan perbaikan pendidikan diperlukan adanya skala prioritas kepentingan meskipun juga terkadang proses penentuan prioritas tersebut amat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan pemberian prioritas pada suatu program mengandung implikasi pada pengalihan program lain. Oleh karena itu, dengan berangkat dari kondisi-kondisi pendidikan yang sangat rumit tersebut studi-studi pendidikan komparatif dilaksanakan.

Untuk itu, maka pendidikan komparatif berusaha memberikan kontribusi dan rekomendasi kepada pengambilan kebijakan (*policy maker*) dalam rangka membangun sistem pendidikan menjadi lebih baik. Studi pendidikan komparatif diarahkan dapat mengamban misi pencapaian tujuan yang secara obyektif dibenarkan oleh para ahli. I.L. Kandel menyebutkan ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu: (1) Repertorial-deskriptif, (2) Historik-fungsional, dan (3) Melioristik, (Imam Barnadib, 1994).

1. Repertorial-deskriptif

Pertama-tama studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya ataupun persekolahan pada khususnya. Misalnya data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara maupun dua/lebih negara yang berbeda.

2. Historik- fungsional

Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif umumnya disamping untuk mengungkap data-data yang bersifat informatoris, juga berusaha mencari kaitan data-data informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi dan sosial-budaya dari masyarakat itu. Hal ini harus dimengerti mengingat pendidikan itu tidak *'sui generi'* atau berdiri sendiri dan terlepas dari bidang kehidupan lain. Sebagai ilustrasi, Arthur Jensen pernah melakukan penelitian bahwa IQ anak-anak imigran Asia di Amerika Serikat rata-rata skornya lebih tinggi dari pada anak asli AS. Skor matematika anak imigran 523 dan AS 489, skor dalam bidang bahasa anak imigran 405 dan anak AS 447. Perbedaan skor pencapaian tersebut menurut banyak ahli disebabkan faktor budaya (Yuong Pai, 1990).

3. Melioristik

Pada akhirnya tujuan studi dalam pendidikan komparatif adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara termasuk dengan negaranya sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut. Yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian kritis.

Berbeda dengan I.L. Kandel, ahli lain bernama H.J. Noah merumuskan tujuan studi pendidikan secara berbeda. Menurut H.J. Noah (Postlethwaite, 1988) ada empat tujuan studi pendidikan komparatif, sebagai berikut:

"Comparative education uses data from one or more countries or regions: (1) to describe educational systems, processes, or outcomes, (2) to assist in the development of educational institutions and practices, (3) to throw light on the relationships between education and society; (4) to establish generalized statements about education that are valid for more than one country".

Dengan mendasarkan diri pada tujuan mempelajari Pendidikan Komparatif di atas maka konsekuensi logisnya adalah dapat diperolehnya manfaat. Adapun manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif adalah:

1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah/negara maupun antar daerah/negara.
2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri.
3. Dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat terhindar dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit.
4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Keberagaman model dan macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain dipengaruhi oleh latarbelakang daerah atau negara tersebut.

Pengetahuan kita tentang aneka sistem pendidikan di luar batas daerah/ negara sendiri yang dipengaruhi oleh aneka latar belakang daerahnya merupakan pengetahuan yang amat berharga terutama untuk menghindari pandangan etnosentrisme sempit. Aneka latar belakang yang ikut mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah/ negara antara lain adalah watak nasional (*national character*). Jika watak nasionalnya berbeda, maka sistem pendidikan di suatu negara juga berbeda. Sebagai contoh beberapa bangsa di kawasan Eropa umumnya memiliki watak *rasional*, sedang bangsa Amerika lebih *pragmatis*.

Watak nasional (*national character*) tersebut sebenarnya tersusun atas 2 (dua) faktor yaitu faktor statik dan dinamik. *Faktor statik* meliputi: lingkungan demografik, geografik, etnik dan keadaan sosial-ekonomik. Sedangkan *faktor dinamik* meliputi: nilai-nilai modern, ide-ide sekuler dan agama.

Termasuk dalam pembentukan watak nasional ini adalah apakah suatu negara tersebut pernah dijajah atau tidak. Hal ini memiliki pengaruh terhadap watak nasional. Terhadap bangsa yang sama-sama yang pernah dijajah juga masih bisa ditanyakan lagi dengan pertanyaan bangsa manakah yang pernah menjajah mereka. Hal ini menjadi penting mengingat watak bangsa penjajah memiliki watak yang berbeda satu sama lain yang pada gilirannya dapat mempengaruhi watak bangsa terjajah. Misalnya bangsa-bangsa yang pernah dijajah Inggris umumnya memiliki watak nasional yang berbeda dengan yang dijajah Perancis,

Portugal, Spanyol, atau Amerika. Masing-masing negara penjajah memiliki watak menjajah yang berbeda-beda pula.

Inggris dalam menjajah umumnya berusaha mengembangkan pendidikan yang sedapat mungkin mirip dengan yang ada di Inggris. Inggris lebih membiarkan kelompok-kelompok etnik untuk mengembangkan budayanya. Hal ini dilakukan Inggris terhadap bangsa jajahnya antara lain seperti: Australia, Malaysia, India dan Pakistan.

Berbeda dengan Inggris, *Belanda* berupaya membuat semacam kasta antara sistem pendidikan yang ada di Belanda sendiri dengan yang ada di negara jajahnya. Sistem pendidikan di negara Belanda sendiri harus lebih baik dari pada yang ada di negara jajahan. Begitu juga dengan *Portugal* yang memiliki watak nasional masa bodoh dibanding kedua negara penjajah sebelumnya. Bagi Portugal yang terpenting adalah mengambil hasil dan kurang peduli terhadap usaha perbaikan di daerah jajahan. Hal ini dapat dilihat di bekas daerah jajahnya, misal: Timor Leste dan Papua Nugini. Sedangkan *Amerika Serikat* dalam memperlakukan daerah jajahnya berusaha memandirikan daerah jajahnya tersebut. Sistem pendidikan di Amerika Serikat diusahakan olehnya dapat diterapkan di daerah jajahnya.

E. Cakupan Studi Pendidikan Komparatif

Kajian-kajian studi dalam mempelajari ilmu pendidikan komparatif secara umum mencakup dua hal penting, yaitu: studi Area dan studi tematik dalam bidang pendidikan.

1. Studi Area

Studi ini diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budayanya. Satu area dapat mencakup satu negara atau beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Misalnya studi sistem pendidikan di area Asia Tenggara yang mencakup beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Indonesia; atau area ujung Malaka saja yang hanya mencakup negara Malaysia saja atau Singapura saja; Bisa juga studi area dalam batas-batas negara Brunai Darussalam.

Gambar-2
Peta Kawasan Dunia



2. Studi tematik

Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Misalnya tema: manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum, mutu lulusan sekolah, otonomi lembaga pendidikan, privatisasi perguruan tinggi, pendidikan pra sekolah, integrasi pendidikan sekolah dan luar sekolah, peningkatan mutu guru, pemberdayaan organisasi profesi pendidik, pengayaan sumber belajar, dan lain-lain.

Dua cakupan studi di atas merupakan keluasaan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli pendidikan komparatif. Kedua cakupan tersebut bukan merupakan pilihan akan tetapi juga bisa dilakukan secara bersamaan untuk studi-studi komparatif dalam pendidikan.

F. Ringkasan

Kemajuan pembangunan umat manusia beserta kemakmuran (*prosperity*) dan kesejahteraan (*welfare*) yang telah dicapai telah menandai adanya peradaban baru dengan segenap piranti yang memanjakannya. Namun demikian kemajuan tersebut ternyata diiringi dengan meningkatnya problem baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Beberapa bangsa mencoba memecahkan aneka problem tersebut melalui banyak instrumen, salah satunya adalah melalui pendidikan. Studi komparasi

pendidikan antar negara dianggapnya dapat memperoleh manfaat bahwa hal-hal positif dalam penyelenggaraan pendidikan di negara lain dapat ditiru untuk mengembangkan pendidikan di negeri sendiri. Oleh karena itu, studi pendidikan komparatif menjadi semakin diminati dan kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang teramat penting.

Secara etimologis pendidikan komparatif berasal dari kata *pendidikan* yang artinya pembelajaran dan pelatihan (*instruction and training*), serta *komparatif* yang artinya usaha membandingkan (*to compare*) atau sesuatu yang bersifat perbandingan (*comparison*). Secara terminologis, pendidikan komparatif adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut: (a) sistem pendidikan formal, non-formal dan informal, (b) teori dan praktek pendidikan, serta (c) latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan.

Kedudukan pendidikan komparatif adalah sebagai salah satu ilmu fondasi dalam memperkokoh bangunan *Ilmu Pendidikan*. Pendidikan komparatif menjadi bagian dari ilmu fondasi pendidikan bersama dengan delapan ilmu fondasi yang lain, seperti (1) filsafat pendidikan, (2) sejarah pendidikan, (3) ekonomi pendidikan, (4) politik pendidikan, (5) sosiologi pendidikan, (6) antropologi pendidikan, (7) psikologi pendidikan, dan (8) estetika pendidikan. Tujuan studi pendidikan komparatif mencakup tiga hal, yaitu: (1) Repertorial-deskriptif, (2) Historik-fungsional, dan (3) Melioristik. Sedangkan cakupan studi yang dikaji dalam pendidikan komparatif secara umum mencakup dua hal penting, yaitu: studi area dan studi tematik dalam bidang pendidikan. Dua cakupan studi tersebut merupakan keluasan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli pendidikan komparatif.

Daftar Pustaka

- Altbach, Philip G; Arnove, R.F; and Kelly, Gail P. 1982. *Comparative Education*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Arcaro, Jerome S. 1995. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata laksana Penerapan*. Yogya-karta: Pustaka Pelajar,

- Bereday, George ZF. 1964. *Comparatif Method in Education*. New York: Holt, Rinehart and Winstone Inc.
- Brickman, William. 1954. *Introduction to the Foundations of Comparative Education*. New York: School of Education NYU.
- Capra, Fritjof. 1997. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Chalidjah Hasan. 1995. *Kajian Pendidikan Perbandingan*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Cookson, Peter W. and Schneider, Barbara. 1995. *Transforming Schools*. New York: Garland Publishing, Inc.
- Dirto Hadisusanto, Suryati Sidhartha, dan Dwi Siswoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta
- Glasser, William. 1993. *The Quality School Teacher*. New York: Harper Perennial.
- Hoy, Wayne K. 2005. *Educational Administration*. Toronto: McGraw Hill.
- Imam Barnadib. 1994. *Pendidikan Perbandingan Buku-1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martin, James. 2006. *The Meaning of the 21st century A vital blueprint for ensuring our future*. New South Wales: Random House Australia (PTY).
- Pai, Young. 1990. *Cultural Foundations of Education*. Columbus, Ohio: A Bell and Howell Information Company.
- Postlethwaite, T. Neville. 1988. *The Encyclopedia of Comparative Education and National Systems of Education*. New York: Pergamon Press.
- Suryati Sidhartha. 1989. *Pendidikan di Negara Berkembang Suatu Tinjauan Komparatif*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Ditjend Dikti.
- Sarbiran. 2009. *Model Mutu Pendidikan: Profesional Terpadu*. Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tanggal 25 April 2009 di Yogyakarta.
- Thut, I.N. dan Adams, Don. 2005. *Pola-Pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB II

KAITAN ANTARA PENDIDIKAN INTERNASIONAL, GLOBAL, DAN KOMPARATIF

Setelah mencermati dan mengkaji secara seksama isi paparan pada bab dua ini, Anda akan dapat:

1. Memahami cita-cita mewujudkan perdamaian dunia sebagai titik temu pendidikan Internasional, global, dan komparatif.
2. Mengetahui latar belakang sejarah dan wujud pendidikan internasional.
3. Mengetahui upaya pengembangan pendidikan komparatif
4. Mengetahui trend perkembangan pendidikan global.
5. Memahami perbandingan antara pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif

A. Cita-Cita Mewujudkan Perdamaian Dunia

Dewasa ini telah berkembang tiga macam disiplin ilmu yang masing-masing berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia (*world peace*). Sesuai dengan urutan kelahirannya, ketiga disiplin ilmu tersebut secara berturut-turut adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Ketiganya berkembang sebagai ilmu dengan berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia, sehingga orientasi inilah yang menjadi titik singgung di antara ketiganya.

Secara historis dari ketiga disiplin ilmu di atas, yang pertama kali muncul adalah pendidikan internasional. Disiplin ilmu pendidikan internasional lahir lebih awal sebagai refleksi dari adanya keprihatinan beberapa ahli atas situasi dunia yang diwarnai aneka konflik antarbangsa, yang memerlukan aneka upaya agar tercipta suasana pergaulan dunia yang harmonis. Kemudian disusul dengan munculnya studi pendidikan komparatif sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem pendidikan di negara lain di luar batas negeri sendiri. Selanjutnya

pendidikan global muncul belakangan sebagai suatu studi dengan tujuan menumbuhkan kesadaran warga bangsa di masing-masing negara agar menyadari pentingnya menjaga kehidupan kolektif secara global, karena problem hidup di suatu wilayah dunia akan dirasakan akibatnya pula oleh seluruh warga dunia secara global.

Potret dunia yang diwarnai oleh aneka konflik antarbangsa, telah menjadi sejarah kusam hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Sejarah dunia diwarnai persaingan antarbangsa dalam menguasai aneka aset strategis dunia baik secara geografik, geoekonomik, maupun geopolitik, dengan aneka cara, seperti militer, politik, dan ideologi. Bahkan keinginan menguasai asset-aset tersebut melebihi kebutuhannya, sehingga menyebabkan kerugian dan perampasan hak bangsa lain. Hal inilah yang memunculkan aneka konflik antarbangsa di banyak kawasan dunia.

Potret di atas dapat dicontohkan pada konflik kawasan Balkan yang menyebabkan perang dunia, konflik Arab-Israel yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan Timur Tengah, Konflik di semenanjung Korea yang menyebabkan keamanan kawasan Asia Timur menjadi tidak menentu, konflik antara India dan Pakistan yang mengganggu keamanan Asia Selatan, konflik kawasan Afrika Tengah yang melibatkan beberapa negara di wilayah itu, konflik di bagian selatan Amerika Latin antara Argentina dengan Inggris yang terus-menerus memperebutkan pulau Malvinas, dan banyak konflik lainnya. Aneka konflik di banyak kawasan dunia tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak wilayah kehidupan dunia yang mengalami ketidakharmonisan.

Dalam catatan sejarah, negara-negara di dunia ini pernah mengalami dua kali perang dunia (*world war*) dengan skala massif yaitu perang dunia pertama (1914-1918) dan perang dunia kedua (1939-1945), meskipun secara sporadis sebenarnya jumlah perang di planet bumi ini tidak terhitung jumlahnya. Bahkan sampai awal abad XXI sekarang ini dimensi perang antar negara tidak lagi sekedar bersifat fisik-militer, akan tetapi lebih luas dan lebih kompleks yang melibatkan sendi-sendi kekuatan ekonomi, politik, ideologi, dan budaya dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi.

Kerugian lain dari perang dunia adalah porak porandanya segenap infrastruktur militer dan sipil antara lain rusaknya pesawat tempur, kapal laut, tank, mobil truk, jembatan, gedung-gedung, dan jalan raya. Pada

bagian lain kerugian akibat perang adalah mundurnya peradaban dan rusaknya aneka peninggalan sejarah, serta yang paling mengerikan adalah hancurnya harkat dan martabat kemunusiaan umat manusia. Menurut catatan *USA Department of Defense (Encarta® 2008, Microsoft Corporation)*, jumlah pesawat tempur Jerman yang hancur ada 95.000 buah, Amerika Serikat 59.296 buah, Jepang 49.485 buah, dan Inggris ada 33.090 buah. Jumlah kapal Jerman yang tenggelam atau hancur ada 672 buah, Jepang 433 buah, Italia ada 300 buah, Inggris ada 296 buah, dan Amerika Serikat ada 157 pesawat tempur yang tenggelam dan rusak parah.

Hancurnya berbagai sarana infrastruktur militer barangkali tidak begitu memilukan bila dibandingkan dengan hancurnya kehidupan umat manusia. Hancurnya kehidupan umat manusia berarti juga hancurnya harkat dan martabat kemunusiaan umat manusia di muka bumi ini. Berikut ini digambarkan betapa dahsyatnya akibat bom atom dalam babak akhir perang dunia kedua.

Tampilan-3
Kehancuran Kota Nagasaki Jepang
Akibat Bom Atom Amerika pada Perang Dunia Kedua



Keterangan:

Akibat bom atom oleh Amerika Serikat, 9 Agustus 1945, kota Nagasaki hancur lebur dan 40.000 penduduknya dinyatakan hilang. (Sumber: Encarta® 2008, Microsoft Corporation)

B. Pendidikan Internasional dan Sejarahanya di Banyak Kawasan

Pendidikan internasional (international education) dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan (Imam Barnadib, 1994). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut selanjutnya muncul beberapa lembaga yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Kategori internasional pada lembaga pendidikan internasional tersebut bisa dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikannya yang berasal dari beberapa negara, atau sisi kurikulumnya yang sudah disesuaikan dengan standar internasional, atau juga siswa-siswinya banyak yang berasal dari beberapa negara.

Carter V. Good (Imam Barnadib, 1994) menyebutkan ada dua arti dari *pendidikan internasional*. **Arti pertama**, bahwa *pendidikan internasional* adalah studi tentang kekuatan-kekuatan pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikannya. **Arti kedua**, *pendidikan internasional* adalah program internasional yang bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian antar bangsa dengan jalan tukar menukar sarana prasarana, metode pendidikan, pelajar, dan gurunya. Arti pertama dari pendapat Good adalah lebih menekankan pada peran pendidikan sebagai kekuatan yang dapat memperlambat dinamika hubungan antarnegara. Sedangkan arti yang kedua lebih menekankan pada bentuk kegiatan pendidikan dalam lintas banyak negara sehingga dapat mendekatkan hubungan antarbangsa yang lebih harmonis.

Imam Barnadib (1994) mendefinisikan *pendidikan internasional* sebagai upaya internasional menjadikan pendidikan sebagai sarana memelihara perdamaian dunia dan meningkatkan kemantapan pergaulan antar bangsa. Sedangkan Suryati Sidharto (1989) memberi batasan pendidikan internasional sebagai studi tentang pendidikan dalam skala internasional.

Dari keseluruhan definisi di atas, kalau kita fahami terlihat bahwa definisi dari Imam Barnadib lebih dapat menggambarkan secara jelas terhadap kenyataan yang ada. Khususnya bila kita memahami substansi tujuan dari pendidikan internasional adalah untuk mewujudkan saling pengertian antar bangsa sehingga tercipta perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan sosial.

Secara histories, *pendidikan Internasional* sudah ada sejak lama yang berlangsung di beberapa kawasan dunia. Kawasan Asia Selatan terutama di India telah berlangsung kegiatan pendidikan Internasional sejak abad ke-6 sebelum masehi. Kawasan Asia Timur seperti Cina juga telah terdapat pendidikan internasional. Sedangkan di kawasan Eropa dan Amerika keberadaan pendidikan Internasional dimulai pada pertengahan abad ke-13 masehi. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan internasional memiliki sejarah yang amat panjang mulai dari hanya sebatas gagasan para ahli yang selalu kandas untuk diwujudkan sampai kepada terwujudnya cita-cita dan gagasan itu dalam kenyataan.

1. Pendidikan Internasional di Eropa dan Amerika

Pada abad pertengahan kira-kira abad 13, di Eropa sudah mulai ada beberapa tanda munculnya *renaissance*. Pada saat itu seorang penasehat raja Prancis Philip IV bernama Pierre Du Bois (1250-1321) mengusulkan supaya diadakannya '*sekolah internasional*'. Sekolah ini bertugas menanamkan rasa saling mengerti antar bangsa dan menumbuhkan kerjasama antar bangsa dan biayanya diambilkan dari anggaran perang. Cita-cita Du Bois ini dilatarbelakangi oleh adanya tanda-tanda *renaissance*, pada akhirnya Bois ini menulis buku yang berjudul '*Penemuan Kembali Tanah Suci*'.

Cita-cita Pierre Du Bois yang belum terealisasi tersebut selanjutnya diteruskan oleh seorang pendidik yang bernama Johann Amos Comenius (1592-1670 M) yang juga mempunyai gagasan untuk mendirikan sekolah internasional yang beliau beri nama '*Pan-Sophia*'. Sekolah tersebut menurutnya diharapkan akan mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar bermacam-macam ilmu sehingga terwujudnya segala kebajikan serta di dalamnya para sarjana dapat bekerja sama menciptakan perdamaian abadi dan universal.

Tidak ketinggalan pula seorang filosof dan ahli ilmu alam yang bernama Francis Bacon atau yang di kenal Lord Bacon (1561-1626 M) menulis buku yang berjudul '*The New Atlantis*' yang di dalamnya ia mengemukakan bahwa perlunya para sarjana untuk bekerja sama satu sama lain saling membantu dan mendukung dalam sebuah proyek penyelidikan alam.

Kegiatan bersama dalam menyelidiki alam ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan manusia, saling pengertian

antar bangsa, serta terjalinnya kemantapan dalam pergaulan dunia. Kesemuanya itu harus dinaungi dalam sebuah lembaga yang ia bernama *'The Solomon's House'*.

Kesemua hal di atas mulai dari Piere Du Bois, Johann Amos Comenius, sampai kepada Lord Bacon, adalah hanya sebatas ide-ide yang belum terealisasi. Namun, kesemuanya itu sudah merupakan usulan-usulan kreatif yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh ahli lain. Oleh karena itu kira-kira pada tahun 1817 ada peningkatan yang lebih berarti yaitu ketika Antoine Julien de Paris mengusulkan kepada raja supaya dibentuk komisi yang jangkauan kerjanya bersifat internasional dan memiliki tugas: *pertama*, mengumpulkan data pendidikan di berbagai negara. *Kedua*, memberi penerangan pendidikan kepada negara-negara di Eropa. Kemudian usulan ini di setuju oleh raja Prancis saat itu, dan mulailah ada upaya pencarian data-data pendidikan di beberapa negara dengan dua metode: wawancara dan angket.

Dari paparan ini sudah menunjukkan ada semacam titik terang tentang upaya mewujudkan pendidikan internasional. Adapun dengan mulai adanya usaha-usaha pencarian data dengan dua metode yang dilakukan oleh Antoine Julien de Paris tersebut maka oleh para ahli disepakati bahwa dialah sebagai perintis pengembangan ilmu pendidikan komparatif. Meskipun pada akhirnya usaha pengumpulan datanya terhenti dikarenakan para politisi belum menaruh perhatian terhadap masalah ini.

Hasil yang lebih nyata lagi adalah sejak memasuki abad ke 20 di mana upaya-upaya di atas bisa menghasilkan yang lebih kongkrit. Misalnya Dr. Fannie Fern Andrews yang selanjutnya dikenal sebagai perintis pendidikan internasional, mengusulkan kepada presiden Amerika Serikat saat itu yaitu William Taft untuk mempertemukan para pemimpin bangsa dengan maksud meningkatkan kerjasama. Usulan Andrews ini disetujui oleh Presiden Taft, yang selanjutnya sejak tahun 1912 mulailah dirintis terwujudnya *'Konperensi Internasional'* di Den Hag.

Pada tahun 1914 disepakati berdirinya *'International Bureau of Education'* yang bernaung di bawah *League of Nations* (LBB). Namun biro internasional pendidikan ini baru terwujud pada tahun 1925 yang

kantor sekretariatnya berkedudukan di Jenewa (Swiss). Kegiatan Biro ini meliputi :

1. Pengadaan berbagai konperensi internasional.
2. Penerbitan buku-buku tahunan pendidikan khususnya pendidikan perbandingan
3. Penerbitan majalah triwulanan
4. Membentuk perpustakaan.

Kelanjutan dari keberadaan *Internasional Bureau of Education* tersebut, pada tahun 1926 dibentuk sebuah komisi kerjasama para kaum intelektual internasional yang disebut '*Comission on Intellectual Cooperation*' untuk tingkat pusat dan *national comission* untuk di setiap negara. Dengan demikian akhirnya di beberapa negara mulai mengembangkan usaha-usaha ini untuk membentuk komisi nasional.

Di Amerika Serikat misalnya dibentuk bagian hubungan kebudayaan (*Devison of Cultural Relations*) pada departemen luar negeri pada tahun 1939. Di Prancis dibentuk "*Ouvres Francaise al'Egrange*". Inggris juga membentuk lembaga serupa yang disebut "*The British Council*" tahun 1934. Tidak ketinggalan pula di Jerman Barat (sebelum bergabung menjadi satu Jerman) dibentuk banyak sekolah Jerman yang berada di luar Jerman yang di beri nama "*Auslandsschule*".

Pada tahun 1922 di San Fransisco Amerika Serikat terdapat pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 600 pendidik dari 60 negara atas undangan dari *National Education Association*. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati membentuk federasi asosiasi pendidikan internasional yang bernama *World Federation of Educational Associations*.

Setelah terbentuk *World Federation of Educational Associations* kemudian menyusun tujuan yaitu: (a) Penggalangan kerjasama dalam bidang pendidikan, (b) pengumpulan dan penyebaran informasi penting tentang pendidikan, dan (c) Usaha nyata peningkatan perdamaian dunia.

2. Pendidikan Internasional di Asia Barat dan Selatan

Fenomena mengenai cita-cita dan upaya-upaya mewujudkan adanya pendidikan internasional tersebut tidak hanya terjadi di negara-

negra Eropa. Jauh sebelum itu di beberapa negara Asia juga telah diupayakan mewujudkan pendidikan internasional. Kawasan timur tengah, tepatnya di Baghdad (Irak), pada tahun 830 M telah berdiri universitas dengan nama 'Baitul Hikmah' yang didirikan oleh kholifah ke-8 Bani Abasyiyah bernama Al-Makmun. Kegiatan utama Universitas ini adalah melakukan studi dan menterjemahkan naskah-naskah klasik dari Yunani seperti karya buku-buku Plato, Aristoteles, Pitagoras, serta memberikan pelayanan pengajaran dan penyelidikan terhadap bermacam-macam ilmu kepada para pelajar yang datang dari penjuru dunia.

Pada waktu jauh sebelumnya, yakni pada tahun 600 SM sampai 250 M di India telah berdiri *Universitas Takshila* dan tahun 450 M sampai abad akhir abad XII berdiri *Universitas Nalanda* yang keduanya mengkaji dan mengajarkan ilmu Paramasastra, Sansekerta, dan Bahasa Persia. Oleh karena letaknya yang strategis yakni di bagian utara India, maka kedua universitas ini banyak dikunjungi para mahasiswa dan pengajar dari negara-negara lain di Asia seperti dari Cina, Tibet, Korea, Srilangka, Jepang, Indonesia. Bahkan Kaisar Iskandar yang Agung pernah berkunjung ke universitas Takshila, dan tokoh-tokoh Cina seperti Fa Hien (399-414), Hiuen Tsang (629-645), dan I Tsing (673-687) pernah bermukim dan belajar di universitas Nalanda (Imam Barnadib, 1994).

Baik Universitas-universitas di Irak maupun di India tersebut di dalamnya terdapat banyak sarjana dari berbagai negara yang saling bekerjasama dalam mengkaji dan mempelajari kebudayaan-kebudayaan beberapa negara serta banyaknya pelajar yang datang dari penjuru dunia. Kesemuanya itu dimungkinkan dapat mendorong terciptanya saling pengertian antar bangsa.

3. Pendidikan Internasional di Asia Timur dan Tenggara

Di kawasan Asia Timur terdapat pula program pendidikan internasional yang menjadi ajang pertemuan dan pengakajian ilmu pengetahuan para pelajar dari banyak negara sebagaimana yang terdapat di Asia Selatan dan Barat. Menurut William W. Brickman (Imam Barnadib, 1994) diungkapkan bahwa pada abad VIII dan IX banyak pemuda Jepang yang menjadi mahasiswa beberapa perguruan

tinggi di negara Cina. Sebaliknya banyak juga pemuda Cina yang menjadi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi Jepang.

Seorang rektor *Daigaku no Kami* (Universitas Kerajaan) yang bernama *Sugawara Kiyogimi* (770-842) telah menerapkan sistem administrasi perguruan tinggi seperti yang terdapat di banyak perguruan tinggi Cina. Kebijakan seperti ini kemudian diteruskan oleh rektor penggantinya yang bernama *Sugawara Koreyoshi*.

Banyaknya penyelenggaraan pendidikan internasional di beberapa kawasan dunia, menyebabkan munculnya dorongan untuk dilakukan di kawasan Asia Tenggara sebagaimana yang terjadi di kawasan lain. Kegiatan pendidikan internasional di Asia Tenggara diprakarsai oleh ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dengan membentuk organisasi Menteri-Menteri Pendidikan yang bernama SEAMEO (*South East Asian Ministers of Education Organization*).

Organisasi ASEAN tersebut sampai sekarang semakin kokoh dalam menggalang kerjasama antar anggota dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui berbagai bidang seperti ekonomi, sains dan teknologi, serta pendidikan. Masing-masing bidang kerjasama tersebut sudah ada komite tetap (*standing committees*). Diantara komite-komite tersebut adalah: komite pengembangan sosial (*committee on social development*), komite sains dan teknologi (*committee on science and technology*). Melalui komite pengembangan sosial ini ASEAN menggalang kerjasama dengan pemerintah Australia.

ASEAN juga membentuk badan kerjasama anggota yang bernama ADEP (*The ASEAN Development Education Project*) dalam rangka saling membantu dalam bidang pendidikan. Bentuk kerjasama tersebut meliputi:

1. Sistem Manajemen Informasi Pendidikan (*Education Management and Information System*) dengan Malaysia sebagai pengelola.
2. Pendidikan Khusus (*Special Education*) dengan Indonesia sebagai pengelola.
3. Pembaharuan Pendidikan Guru (*Teacher Education Reform*) dengan Filipina sebagai pengelola.
4. Pengembangan Tes (*Test Development*) dengan Thailand sebagai pengelola.

5. Pendidikan berorientasi Kerja untuk Pemuda (*Work Oriented Education for In School and Out of School Youth*) dengan Singapura sebagai pengelola.

(Imam Barnadib, 1994)

Adapun kerjasama negara-negara ASEAN yang dikelola oleh SEAMEO mengenai pengembangan pendidikan tinggi adalah dikembangkannya pusat-pusat penelitian dan latihan pendidikan tinggi. Paling tidak ada enam lembaga yang dikembangkan sebagai pusat penelitian dan pelatihan, yaitu:

1. BIOTROP (*Tropical Biology*) yang berpusat di Bogor, Indonesia.
2. CCB TROPMED (*Central Coordinating Board for Tropical Medicine*) yang berpusat di Bangkok, Thailand.
3. RECSAM (*Regional Centre for Science and Mathematics*) yang berpusat di Penang, Malaysia.
4. SEARCA (*Southeast Asian Research Centre in Agriculture*) yang berpusat di Los Banos, Filipina.
5. RELC (*Regional English Language Centre*) yang berpusat di Singapura.
6. INNOTECH (*Innovation and Technology in Education*) yang berpusat di Quezon City, Filipina.

Dewasa ini keanggotaan ASEAN sudah menjadi sepuluh negara yang meliputi: Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunai Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Tentu dengan sepuluh anggota tersebut kegiatan ASEAN menjadi semakin luas dengan banyak bidang kerjasama yang dilakukannya.

Kesemuanya uraian pendidikan internasional di beberapa kawasan dunia di atas, baik yang di Eropa, Asia Timur dan Barat, dan Asia Tenggara menunjukkan bukti adanya usaha-usaha dalam forum internasional melalui pendidikan yang tujuannya adalah terciptanya perdamaian dunia yang abadi dan universal. Namun ada satu efek negatif dari usaha pendidikan internasional ini adalah diselewengkannya tujuan aslinya menjadi sekedar untuk propaganda ideologi dan superioritas suatu negara. Beberapa negara ada yang dengan dalih menyelenggarakan pendidikan internasional akan tetapi tujuannya adalah untuk

mempengaruhi alam pikiran pemuda negara lain agar pemuda dari negara lain tersebut menyenangi negara penyelenggara.

C. Pengembangan Pendidikan Komparatif

Dengan semakin meningkatnya aneka upaya pendidikan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis yang melibatkan ahli-ahli dari banyak negara, maka para ahli menjadi tergerak hatinya untuk mempelajari keadaan negara lain. Mereka terlibat aktif dalam upaya mewujudkan kehidupan dunia yang saling menghargai satu sama lain melalui pendidikan internasional, mereka juga mempelajari negara lain khususnya tentang sistem pendidikan di negara lain tersebut agar bisa diterapkan di negerinya sendiri. Upaya mempelajari sistem pendidikan di negara lain agar dapat diadopsi dan diterapkan di negeri sendiri merupakan bentuk kegiatan pendidikan komparatif.

Sebuah rintisan dalam usaha penyusunan pendidikan komparatif antara lain dimulai dari fase pertama bahwa pendidikan komparatif baru sebatas informasi-informasi pendidikan di negara lain yang didapat dari cerita para pelancong (*Traveller's tales*). Pada fase ini pendidikan komparatif baru berupa laporan-laporan lisan (*oral reports*), misalnya tentang laporan sistem pendidikan di negara Yunani dan Romawi, kemudian laporan cerita perjalanan Marco Polo yang menjelajah dunia, selanjutnya cerita dari Alexis de Tocqueville. Baik Marco Polo maupun Tocqueville keduanya menceritakan tentang pendidikan anak-anak di beberapa negara yang pernah mereka kunjungi (Noah and Eckstein dalam T. Neville Postlethwaite, 1988).

Pada fase kedua dimulai sekitar tahun 1980-an penyusunan pendidikan komparatif mulai menemukan bentuk ilmiahnya. Informasi tentang sistem pendidikan di negara mulai dikumpulkan berdasarkan penggalian data-data secara sistematis. Antoine Julie De Paris adalah tokoh berkebangsaan Perancis yang pertama kali mengusulkan pentingnya pengumpulan data-data secara sistematis melalui observasi dan angket tentang sistem pendidikan di negara lain. Oleh karenanya Antoine Julie De Paris ini dikenal sebagai bapak perintis pendidikan komparatif sebagai ilmu. Tokoh-tokoh lain setelah dia dirintis secara ilmiah, kemudian bermunculan tokoh-tokoh lain antara lain seperti John Griscom (Amerika

Serikat), Victor Cousin (Perancis), Horace Mann (Amerika Serikat), Matthew Arnold (Inggris), dan Michael Sadler (Inggris).

Upaya yang dilakukan John Griscom dalam mengembangkan pendidikan komparatif adalah dengan cara mempelajari sistem pendidikan di negara lain yakni dengan mengunjungi beberapa negara Eropa kemudian dia tinggal dan hidup di sana selama satu tahun. Negara-negara yang pernah diteliti oleh John Griscom ini adalah Inggris, Swiss, Italia, dan Belanda semuanya dikunjungi dan dia hidup atau tinggal di sana selama satu tahun (1818-1819) untuk mempelajari keadaan sistem pendidikan di negara-negara tersebut. Hasil dari kunjungannya itu kemudian dilaporkan dan dikumpulkan menjadi sebuah buku yang diberi judul *"A Year in Europe"*, (Imam Barnadib, 1994).

Victor Cousin, pada tahun 1831 mengunjungi Prusia (yang sekarang bernama Jerman) untuk mempelajari sistem pendidikannya. Hasil kunjungan itu kemudian ditulis dalam sebuah buku berisi laporan pendidikan umum di Prusia yang diberi judul *"Education Reports in Prusia"*. Horace Mann pada tahun 1844 pernah mengunjungi sebagian negara Eropa beberapa bulan. Dia mencatat aneka temuan berkaitan dengan sistem pendidikan di semua Negara yang dikunjungi, kemudian hasilnya dikumpulkan dan dituangkan dalam sebuah buku yang diberi judul *"Sevent Annual Report"*. Buku tersebut berisi perbandingan pendidikan antara Jerman, Inggris, Perancis, dan Islandia, (Imam Barnadib, 1994).

Matthew Arnold, seorang ahli berkebangsaan Inggris, pada tahun 1859 mengunjungi Perancis dan 1865 mengunjungi Jerman. Hasil kunjungan dituangkan dalam suatu telaah tentang sistem pendidikan di kedua negara tersebut berjudul *Special Report of Educational Subjects*, suatu terbitan yang disusun oleh Dewan pendidikan Inggris yaitu *Board of Education* yang saat itu dipimpin oleh Sir Michael Sadler.

Sir Michael Sadler mengunjungi Jerman tahun 1894 dan 1895 dengan mengobservasi sekolah-sekolah di Jerman, hasilnya dia tulis dengan judul *"How Far can We Learn Anything of Practical Value from the Study of foreign systems of education?"* tahun 1990. Dalam tulisan tersebut, dia menyangkal dan tidak yakin bahwa aneka komponen atau metode pada sistem pendidikan negara asing dapat dirinci secara terpisah-pisah, (I. Neville Postlethwaite, 1988).

Fase ketiga berlangsung dari tahun 1930-an sampai 1960-an. Pada fase ini banyak ahli yang melakukan studi dan penelitian dengan mengkaji hubungan sekolah dg masyarakat, diantaranya dilakukan Nicholas Hans. Dia meneliti peran sekolah dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat. Fase keempat kira-kira berlangsung dari tahun 1960-an sampai dengan 1990-an. Pada fase ini para ahli banyak melakukan studi yang bertemakan modernisasi, yaitu modernisasi masyarakat dan modernisasi pendidikan. Sedangkan fase terakhir berlangsung dari tahun 1990-an sampai 2000-an, dimana studi pendidikan komparatif lebih terfokus pada keterkaitan antara pendidikan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti Hak Azasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain. Dengan demikian kajian studi pendidikan komparatif sudah demikian meluas yang ditulis para ahli. Banyak majalah, jurnal, dan ensiklopedi pendidikan komparatif yang ditulis para ahli.

Aneka usaha perintisan dan pengembangan pendidikan komparatif oleh para ahli tersebut pada akhirnya berkembang sampai sekarang, yakni memasuki abad XXI sebagaimana kita pelajari sekarang. Dengan perkembangan yang demikian panjang tersebut pada akhirnya pendidikan komparatif semakin mendapat tempat di dunia internasional. Misalnya di negara kita, Indonesia, pendidikan komparatif sebagai ilmu semakin berkembang dengan semakin banyaknya studi perbandingan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Sebagai mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, pendidikan komparatif telah ada sejak tahun 1959. Dewasa ini, hampir semua Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia telah mencantumkan pendidikan komparatif sebagai salah satu mata kuliah penting, tidak ketinggalan pula beberapa Fakultas Tarbiyah pada Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) serta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) telah menempatkan mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib.

D. Pengembangan Pendidikan Global

Dalam beberapa literatur pendidikan dan literatur ilmu-ilmu sosial, istilah pendidikan global (*global education*) dikenal juga perspektif global (*global perspective*), pendidikan global untuk perspektif global (*global edu-*

cation for a global perspective), dan perspektif global dalam pendidikan (*global perspective in education*). Semua istilah tersebut memiliki kandungan isi dan metode yang sama. Namun di Indonesia ilmu ini lebih dikenal dengan nama perspektif global (*global perspective*), yang dipahami sebagai ilmu atau studi yang menanamkan cara pandang dan cara berfikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional (Nursid Sumaatmadja dan Kuswaya Wihardit, 2001).

Ilmu ini dirunut dari akar keilmuannya, berakar dari ilmu-ilmu antropologi, psikologi, sejarah, ekonomi, geografi dunia dan politik, sehingga ilmu ini merupakan bagian dari ilmu sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sebagai warga negara dunia yang menuntut keterlibatan dan partisipasi secara aktif, (Umi Oktyari Retnaningsih, 2002). Ilmu ini antara lain membicarakan teori globalisasi yang telah tumbuh pada dekade terakhir sebagai suatu proses penguatan pencapaian paling baru dengan usaha tanpa mengenal lelah dan terkoordinasi tentang aneka kekuatan dari pusat kekuatan klasik pada penguatan level global, (N'Dri Assié-Lumumba and Margaret Sutton, 2004). Menurut John Huckle, globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi satu konsekwensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh.

Globalisasi mendorong terwujudnya tipe masyarakat terbuka dalam banyak dimensi. Munculnya tipe masyarakat tersebut merupakan konsekwensi dari perkembangan zaman yang memberikan nilai kepada semua individu, hak dan kewajiban sehingga semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan menyumbangkan kemampuannya bagi kemajuan bangsa khususnya dan kemajuan umat manusia umumnya (Nursid Sumaatmadja dan Kuswaya Wihardit, 2001).

Kemajuan mayoritas bangsa-bangsa di dunia dan umat manusia pada umumnya pada abad ke-21 ini telah menjadikan kita masuk pada abad ilmu pengetahuan dengan corak sebagai masyarakat pengetahuan (*the knowledge society*). Abad ilmu pengetahuan memberikan berbagai kesempatan dan kemungkinan yang luas terbuka, tetapi juga sekaligus memberikan problem yang amat dahsyat, yang keduanya belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Hal ini terjadi karena kemajuan

teknologi yang amat pesat, yang antara lain melahirkan "Non-Human Like Intelligence" (NHL Intelligence) dan *Singularity* (teknologi berkembang tanpa batas). Oleh karenanya, persoalan pokoknya adalah bagaimana manusia dapat mengakses semaksimal mungkin sisi positif dan sekaligus mengeliminir sebesar mungkin sisi negatif dari kemajuan teknologi.

Penggunaan hasil-hasil kemajuan teknologi akan membuka kesempatan menciptakan apa yang disebut "Bioconvergence", teknologi yang mengkombinasi antara biologi dan non-biologi, lewat prinsip elektronika dimana setiap makhluk hidup memilikinya. Antara lain dalam wujud perpaduan antara *human inelligence* dan *NHL intelligence*, otak manusia dapat diperkuat dengan cip komputer. Kombinasi ini akan menghasilkan kemungkinan perkembangan kemampuan manusia tanpa batas (*singularity*). Tidak itu saja, lewat prinsip elektronika ini sensitivitas yang dimiliki binatang dapat diadopsi untuk manusia. Oleh karena itu, di masa depan bukan mustahil manusia memiliki ketajaman penciuman seperti tikus, ketajaman telinga seperti kuda, dan sensitivitas lain yang dimiliki binatang.

Kemajuan ilmu pengetahuan, dan terutama kemajuan teknologi memberikan kemungkinan dan kesempatan bagi manusia untuk bisa tetap survive meski kekayaan alam semakin menipis atau bahkan habis. Manusia, dengan kemajuan teknologi bisa menciptakan bahan pengganti seperti energi bahan bakar gas dan minyak dapat diganti dengan bio-energi, energi hidrogen, dan "fuel-cell cars". Disamping itu, dan manusia bisa semakin efisien menggunakan air bersih yang semakin langka. Kemajuan teknologi juga akan melahirkan sistem kerja baru dimana kerja rutin akan diganti oleh mesin, tinggal kerja yang kreatif otentik yang dilaksanakan oleh manusia. Pekerjaan abad 21 adalah *eco-affluent creativity* (pola kerja dan gaya hidup yang efisien, hemat dan bermanfaat).

Namun, adalah sangat naif kalau kita berpendapat bahwa teknologi memberikan kepada kita kekuatan untuk mengendalikan alam raya ini. Yang lebih tepat adalah manusia akan semakin tergantung pada teknologi. Karena kemunculan suatu teknologi memerlukan teknologi yang lebih canggih. Sebutlah misalnya, munculnya teknologi pemotong kayu yang lebih modern memberikan kemampuan pada manusia untuk memabat dan menggunduli hutan lebih cepat dan lebih luas. Akibatnya banjir muncul dimana-mana, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa timur sampai Sulawesi. Untuk mengatasi banjir ini diperlukan teknologi yang

lebih canggih. Contoh lain, untuk meningkatkan produksi pertanian dapat menggunakan temua teknologi baru baik pupuk maupun obat kimiawi pembasmi hama. Namun akibat penggunaan obat kimiawi tersebut, muncul penyakit tanaman yang baru dan hama tanaman yang baru yang hanya dapat diatasi dengan temuan obat-obatan yang lebih canggih. Artinya, manusia akan tergantung pada teknologi. Jadi teknologi menguasai manusia bukan sebaliknya. Oleh karenanya, itu yang harus dilakukan adalah belajar bagaimana manusia dapat menyadari, menguasai, dan mengendalikan teknologi untuk kemajuan individu, bangsa dan negaranya, serta umat manusia umumnya. (Zamroni, 2007). Kesadaran inilah yang penting untuk dicapai oleh semua individu dan semua bangsa di dunia untuk mengembangkan komitmen kebersamaan dalam kebaikan, keamanan, dan kemakmuran yang ditanamkan secara terus menerus melalui aneka sarana pendidikan.

Dengan pemaparan di atas menunjukkan bahwa pendidikan global memberikan dasar-dasar pemahaman dan kesadaran berupa cara pandang dan cara berfikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global. Bahwa manusia hidup dan kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Isu, fenomena, dan keadaan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah global, bila ruang lingkup, bobot, dan upaya pemecahannya berada pada tingkat dunia.

Dari sisi kepentingan dunia atau internasional, sikap dan perbuatan manusia sebagai warga dunia dituntut dapat diarahkan untuk kepentingan global. Dalam cara berfikir, seseorang dituntut untuk berfikir secara global walaupun dalam bertindak secara lokal. Dalam cara berbuat, tindakan seseorang akan mempengaruhi dunia global. Dalam berinteraksi, manusia dapat mengetahui banyak hal karena adanya komunikasi dengan dunia luar. Dalam ketergantungan hidup, manusia mengalami kehidupan interdependensi satu sama lain. Dengan demikian keseluruhan sikap dan tindakan manusia akan berdampak pada orang lain dalam skala local maupun global. Karena tanpa berbekal kesadaran demikian manusia akan bersikap dan berbuat yang dapat merugikan orang lain di kawasan lokal sekaligus merugikan manusia di kawasan global. Masalah-masalah yang termasuk merugikan manusia secara global seperti: pemanasan global, pencemaran air laut, penggundulan hutan, kepadatan pemukiman, kemiskinan, dan konflik kawasan. Melalui pendidikan global masalah-

masalah tersebut dapat direduksi. Menurut Eve Coxon and Karen Munce (2008), "education is therefore seen as a critical mechanism for addressing both poverty reduction and conflict prevention".

Menurut Robert Hanvey, terdapat lima dimensi perspektif global. Lima dimensi tersebut adalah: (1) *Perspective Consciousness*, yaitu kesadaran bahwa masing-masing warga dunia memiliki aneka perbedaan, termasuk perbedaan pandangan, oleh karena itu diperlukan adanya penghargaan terhadap aneka pendapat yg berbeda satu sama lain; (2) *State of planet awareness*, yaitu adanya pengertian yg mendalam terhadap aneka isu dan berbagai peristiwa global; (3) *Cross-cultural awarness*, yaitu adanya kesadaran tentang banyaknya budaya yg berbeda dan beraneka ragam namun juga banyak memiliki kesamaan; (4) *Systematic awarness*, yaitu mengetahui banyak sistem yang ada di alam, maka mengenal kompleksnya sistem internasional yang terdiri dari banyak aktor negara dan non-negara; dan (5) *Options for Participation*, yaitu mengetahui strategi-strategi yang tepat dan ikut berpartisipasi menghadapi isu dan masalah lokal, nasional, dan internasional.

E. Perbandingan Pendidikan Internasional, Global, dan Komparatif

Pada bagian awal pembahasan bab ini telah dijelaskan bahwa pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu keterkaitan ketiganya adalah terletak pada orientasi dari masing-masing mereka yang berujung pada terwujudnya perdamaian dunia (*world peace*).

Menurut Suryati Sidharto (1989), pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif, ketiganya mempunyai tujuan-tujuan pendidikan yang banyak bermuatan ranah afektif. Namun apabila diurutkan mulai dari yang paling tinggi sampai pada yang paling rendah muatan afektifnya, maka urutannya adalah pendidikan global menempati urutan teratas, kemudian disusul pendidikan internasional, dan terakhir adalah pendidikan komparatif. Namun demikian, dari urutan muatan kognitifnya, menurut penulis justru terbalik, yaitu urutan teratas ditempati pendidikan komparatif, kemudian disusul pendidikan internasional, dan terakhir pendidikan global.

Dalam praktek pembelajaran di kelas, dapat dicontohkan penanaman afektif kepada peserta didik Sekolah Dasar melalui pendidikan global. Paparan di bawah merupakan ringkasan dari ditulis Charlotte C. Anderson dengan judul *Global Education in The Classroom* (Suryati Sidharto, 1989), dengan beberapa modifikasi yang dibuat penulis. Dalam hal ini pembelajaran di Sekolah Dasar menyangkut pendidikan global dapat dimasukkan ke dalam pada mata pelajaran *Social Science* (IPS).

Mata Ajar	: <i>Social science</i> (IPS)
Pokok Bahasan	: Pendidikan Global
Tema	: Dunia dari Tempatku Memandang
Peserta Didik	: Siswa Kelas IV Sekolah Dasar
Tujuan Pembelajaran	: Siswa dapat mendeskripsikan kehidupan masyarakat di luar daerahnya sendiri.
Alokasi Waktu	: 2 Jam Pelajaran

Kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru adalah meletakkan sebuah globe di tengah-tengah kelas, selanjutnya para siswa diminta secara berkelompok mengamati dari arah yang berbeda yaitu utara, timur, selatan, dan barat; ada juga yang mengamati dari arah bawah dan atas. Dengan pengetahuan tentang gambar peta tersebut, masing-masing siswa secara berkelompok mengamati globe dari arah yang dilihatnya. Yakni mengamati apa yang terbanyak di daerah tersebut apakah yang paling dominan: apakah air, daratan, ataukah gunung. Kemudian para siswa diminta membayangkan dan menghayati seumpama mereka menjadi penduduk dari masing-masing sisi globe tersebut.

Untuk memperkuat penghayatan siswa terhadap keadaandaerah tersebut guru menceritakan kehidupan di masing-masing daerah yang diamati beserta membawa berbagai peraga berupa gambar, benda-benda perabot, benda asesoris, dan barang hasil produk dari daerah yang menjadi amatan siswa. Selanjutnya masing-masing siswa secara berkelompok tersebut diminta untuk meneliti, menyelidiki, menganalisa, dan mendiskusikan kondisi daerah yang diamati seperti iklim, keadaan alam, mata pencaharian, nama-nama kota, tradisi budaya, binatang kesayangan, dan aneka kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat setempat. Puncak dari kegiatan belajar mengajar di kelas adalah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penyelidikannya di depan kelas dan kemudian

kelompok lain menanggapi. Ujung dai kegiatan ini adalah para siswa dapat memahami dan menghayati sejumlah bangsa di dunia dengan tata kehidupannya yang terletak di kawasan yang berbeda namun dalam satu dunia.

Contoh lain yang ditulis oleh Charlotte C. Anderson (Suryati Sidharto, 1989) dengan beberapa modifikasi yang dibuat penulis, adalah praktek pembelajaran pendidikan internasional di kelas IV Sekolah Dasar. Pembelajaran tentang pendidikan internasional di Sekolah Dasar dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran *Social Science* (IPS).

Mata Ajar	: <i>Social Science</i> (IPS)
Pokok Bahasan	: Pendidikan Internasional
Tema	: Gairah belajar di kelas yang Anak -Anaknya mengalami Kekurangan Makan
Peserta Didik	: Siswa Kelas IV Sekolah Dasar (SD)
Tujuan Pembelajaran	: Siswa dapat mendeskripsikan kesulitan belajar pada anak yang kekurangan makanan.
Alokasi Waktu	: 2 Jam Pelajaran

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru adalah mengajar anak-anak di kelas untuk mendiskusikan gambar foto-foto yang ditayangkan oleh guru berupa gambar anak di kawasan benua lain yang mengalami kekurangan makan. Guru menampilkan juga data dari lembaga PBB tentang jumlah anak yang mengalami gizi buruk, tingkat kelaparan penduduk, tingkat kematian akibat kelaparan penduduk. Pada bagian lain guru juga memberikan uraian tentang pentingnya belajar bagi anak-anak untuk meraih masa depan.

Dalam proses belajar mengajar tersebut para siswa secara berkelompok mendiskusikan gambar foto-foto serta data dari lembaga PBB yang ditayangkan oleh guru. Diskusi dalam kelompok dilakukan para siswa dengan cara mengidentifikasi prasyarat yang layak ada agar seorang anak dapat belajar secara efektif, menentukan kebutuhan kalori per hari yang harus dipenuhi oleh seorang anak, menggali kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi anak yang kekurangan makan, memprediksi motivasi dan gairah belajar pada diri anak yang mengalami kekurangan makan. Selanjutnya hasil kerja dari masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan satu persatu di depan kelas dengan meminta tanggapan

dari kelompok lain. Dengan demikian para siswa dapat menghayati sekaligus memahami kesulitan-kesulitan anak-anak di negara lain atau kawasan benua lain dalam mempertahankan gairah belajar dalam suasana kekurangan makan.

Bila dibandingkan contoh pembelajaran pendidikan internasional dengan pendidikan global, sudah barang tentu pembelajaran pendidikan internasional memiliki ranah kognitifnya lebih tinggi.

F. Ringkasan

Ada tiga macam disiplin ilmu yang sama-sama memiliki orientasi terwujudnya perdamaian dunia (*world peace*), yaitu secara berurutan sesuai dengan urutan kelahirannya adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Pendidikan internasional lahir lebih awal sebagai refleksi para ahli terhadap realitas dunia yang diwarnai aneka konflik antar bangsa, sehingga diperlukan aneka upaya dengan tujuan terciptanya suasana pergaulan dunia yang harmonis. Pendidikan komparatif muncul sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem-sistem pendidikan di luar batas negerinya sendiri. Sedangkan pendidikan global lahir belakangan sebagai suatu studi dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga bangsa di masing-masing negara agar mereka menyadari pentingnya menjaga kehidupan kolektif secara global. Kejadian di satu negara akan dirasakan dampaknya oleh seluruh negara sebagai satu warga dunia.

Potret dunia yang diwarnai oleh aneka konflik antarbangsa telah menjadi sejarah krusial hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Sejarah dunia diwarnai persaingan antar bangsa dalam menguasai aneka aset strategis dunia baik secara geografik, geoekonomik, maupun geopolitik, dengan aneka cara termasuk militer, politik, dan ideologi. Dalam catatan sejarah, banyak sekali konflik antar negara-negara di dunia yang terjadi di banyak kawasan, termasuk pernah terjadi dua kali perang dunia (*world war*) dengan skala massif yaitu perang dunia pertama (1914-1918) dan perang dunia kedua (1939-1945).

Pendidikan internasional (*international education*) dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan (Imam Barnadib, 1994). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut selanjutnya muncul beberapa lembaga

yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Kategori internasional pada lembaga pendidikan internasional tadi bisa dalam arti para pendidik dan tenaga kependidikannya yang berasal dari beberapa negara, atau kurikulumnya yang sudah disesuaikan dengan standar internasional, ataupun juga siswa-siswinya berasal dari beberapa negara.

Kawasan Eropa sudah mengenal pendidikan internasional sejak abad 13 masehi namun masih sebatas ide dan cita-cita. Sejak tahun 1817 cita-cita tersebut mulai terwujud setelah usul Antoine Julien de Paris disetujui raja Perancis supaya dibentuk komisi yang jangkauan kerjanya bersifat internasional dengan tugas mengumpulkan data pendidikan di berbagai negara melalui metode wawancara dan angket, serta bertugas memberi penerangan pendidikan kepada negara-negara di Eropa. Abad ke 20 muncul Fannie Fern Andrews sebagai perintis pendidikan internasional atas usulnya yang disetujui oleh presiden Amerika Serikat, William Taft, untuk mempertemukan para pemimpin bangsa sehingga tahun 1912 terselenggara *'Konperensi Internasional'* di Den Hag. Tahun 1914 berdiri *'International Bureau of Education'*. Tahun 1926, dibentuk *'Comission on Intellectual Cooperation'* untuk tingkat pusat dan di setiap negara didirikan *'national comission'*, misalnya AS mendirikan *'Devision of Cultural Relations'*, Prancis membentuk *'Ouvres Francaise al'Egrange'*, Inggris juga membentuk *'The British Council'*,

Kawasan Asia Barat dan Selatan, telah berlangsung pendidikan internasional di Bagdad (Irak) antara lain telah ada universitas yang bernama *'Baitul Hikmah'* tahun 830 M dengan kegiatan utama melakukan studi dan menterjemahkan naskah-naskah klasik Yunani karya Plato, Aristoteles, Pitagoras, dan memberi pengajaran bermacam-macam ilmu kepada pelajar yang datang dari banyak penjuru dunia. Bahkan di India jauh sebelumnya pada tahun 600 SM Masehi sampai 250 M telah berdiri *Universitas Takshila* yang mengkaji dan mengajarkan ilmu paramasastra, sansekerta, dan bahasa Persia kepada mahasiswa berasal dari Cina, Tibet, Korea, Srilangka, Jepang, Indonesia.

Kawasan Asia Timur khususnya di Cina telah ada universitas pada abad VIII yang didatangi banyak mahasiswa dari Jepang, dan juga banyak mahasiswa Cina yang belajar di beberapa perguruan tinggi Jepang seperti *Daigaku no Kami* (Universitas Kerajaan). Kawasan Asia Tenggara, kegiatan pendidikan internasional di diprakarsai oleh organisasi negara-negara serumpun bernama ASEAN (*Association of Southeast Asian Na-*

tions) yang membentuk organisasi bernama SEAMEO (*South East Asian Ministers of Education Organization*).

Berkembangnya pendidikan internasional telah mendorong para ahli ingin mempelajari sistem pendidikan di banyak negara agar dapat diadopsi dan diterapkan di negerinya sendiri, sehingga berkembang cabang ilmu baru yaitu pendidikan komparatif. Ilmu ini dimulai dari hanya sebatas informasi-informasi pendidikan di negara lain yang didapat dari cerita para pelancong (*Traveller's tales*) berupa laporan-laporan lisan (*oral reports*). Kemudian dikembangkan menjadi lebih ilmiah melalui penggalian data-data secara sistematis. Antoine Julie De Paris adalah bapak perintis pendidikan komparatif sebagai ilmu. Tokoh-tokoh lain yang mengembangkan ilmu ini adalah John Griscom (Amerika Serikat), Victor Cousin (Perancis), Horace Mann (Amerika Serikat), Matthew Arnold (Inggris), dan Michael Sadler (Inggris).

Dengan semakin berkembangnya studi pendidikan komparatif telah memunculkan studi baru yakni pendidikan global (*global education*). Studi ini dikenal juga sebagai perspektif global (*global perspective*), pendidikan global untuk perspektif global (*global education for a global perspective*), dan perspektif global dalam pendidikan (*global perspective in education*). Ilmu ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sebagai warga negara di dunia agar tercipta ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pendidikan global memberikan dasar-dasar pemahaman dan kesadaran berupa cara pandang dan cara berfikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global. Bahwa manusia hidup dan kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Isu, fenomena, dan keadaan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah global, bila ruang lingkup, bobot, dan upaya pemecahannya berada pada tingkat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assié-Lumumba, N'Dri and Sutton, Margaret. 2004. *Global Trends in Comparative Research on Gender and Education*. Chicago: Comparative Education Review. Edition-4 November 2004. Volume 48,

- Coxon, Eve and Munce, Karen. 2008. *The global education agenda and the delivery of Aid to Pacific education*. Oxford: Comparative Education. Edition-2 May 2008. Volume 44.
- Imam Barnadib. 1994. *Pendidikan Perbandingan: Buku-1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jones, Phillip W. Jones. 1998. *Comparative Education*. Oxford: Juny 1998. Volume 34, Edisi 2.
- Keylor, William R. 2008. *World War-1*. Encarta © 2008. Microsoft Corporation.
- Nursid Sumaatmadja dan Kuswaya Wihardit, 2001. *Perspektif Global*. Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka.
- Postlethwaite, T. Neville. 1988. *The Encyclopedia of Comparative Education and National System of Education*. New York: Pergamon Press.
- Suryati Sidharto, 1989. *Pendidikan di Negara Berkembang suatu Tinjauan Komparatif*. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK Umi Oktyari Retnaningsih. 2002. *Perspektif Global*. Malang: UM Press.
- Zamroni. 2007. *Mewujudkan pendidikan yang profesional: Diperlukan kecerdikan memanfaatkan peluang*. Makalah seminar pendidikan IKA Komisariat FIP di Universitas Negeri Yogyakarta 29 Januari 2007.
- Ziemke, Earl F. 2007. *World War II*. Microsoft Student. Redmond, WA: Microsoft Corporation.

BAB III

PENDIDIKAN KOMPARATIF SEBAGAI STUDI ANTAR BANGSA DAN BUDAYA

Setelah mencermati dan mengkaji secara seksama isi paparan pada bab ketiga ini, maka Anda akan dapat:

1. Memahami konsep dasar sebuah bangsa
2. Memahami konsep dasar tentang budaya dan kebudayaan
3. Memperoleh kejelasan tentang pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan budaya.

A. Konsep Dasar Bangsa

Secara natural manusia tidak mau hidup secara menyendiri, tetapi ia selalu ingin hidup bersama manusia lain secara berkelompok. Naluri hidup secara berkelompok pada diri manusia ini telah berlangsung sejak ratusan juta tahun silam ketika manusia mulai hidup di muka bumi ini. Oleh karena keadaan inilah maka para ahli menyebut manusia sebagai sosok makhluk yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lain (*zoon politicon* atau *animale sociale*), makhluk yang selalu ingin bercanda ria dengan sesamanya (*homo ludens*).

Ada banyak kategori kelompok dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah kelompok menurut **kategori jenis kelamin** yaitu laki-laki dan perempuan; **Kategori adat istiadat** terdapat perbedaan aneka macam suku bangsa seperti suku Anak Dalam, Asmat, Badui, Bugis, Dayak, Dani, Jawa, Minang, Samin, Sasak, dan Sunda; **Kategori ciri-ciri fisik** kita membedakan aneka macam ras antara lain seperti ras Arya, Mongoloid, Negroid, Melanesia, dan Austroloid; **Kategori keimanan dan kepercayaan** kita dapat menemukan aneka macam agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha; **Kategori**

afiliasi politik dapat dibedakan adanya pengurus dan anggota partai Demokrat, Golkar, Gerindra, Hanura, PAN, PDIP, PKB, PKS, PPP, dan lain-lain; **Kategori pekerjaan** kita dapat mengidentifikasi aneka macam profesi seperti Akuntan, Apoteker, Artis, Dokter, Guru, Notaris, dan Pengacara (Arif Rohman, 2009).

Berdasarkan dari banyaknya aneka macam pengelompokan yang merupakan karakter dasar alamiah dan naluriah pada diri manusia di atas, maka membuka jalan pada terwujudnya suku bangsa, selanjutnya dari suku bangsa tersebut kemudian berkembang menjadi kampung, berkembang lagi menjadi desa, kemudian kota bertembok, kerajaan dan kekaisaran, serta pada akhirnya menjadi satu kesatuan bangsa dan formalisasi atas bentuk bangsa atau beberapa bangsa menjadi negara. Dengan demikian bangsa dan negara tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi melalui suatu proses panjang seiring dengan perkembangan kesadaran manusia akan pentingnya penataan kehidupan kelompok.

Bangsa (*nation*) menurut beberapa ilmuwan sosial diartikan sebagai pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan-kesamaan tertentu. Pengelompokan masyarakat tersebut sangat bervariasi dari yang jumlah warganya banyak sampai pada jumlah warganya sedikit. Bangsa yang jumlah warganya banyak terkadang terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok suku bangsa (*ethnic groups*). Masing-masing suku bangsa memiliki kesamaan antara lain bahasa, adat istiadat, mata pencaharian, pola asuh, dan kebiasaan-kebiasaan budaya lainnya. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, masing-masing suku bangsa memiliki kesamaan bahasa daerah, kebiasaan, adat atau tradisi lokal, makanan, dan pakaian.

Konsep lain yang sering disamakan dengan kelompok suku bangsa (*ethnic group*) adalah ras (*race*). Ras merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu seperti warna kulit, perawakan tubuh, bentuk rambut, bentuk wajah, kemuncungan hidung, dan bentuk mata. Atas dasar ini maka manusia di muka bumi ini terbagi ke dalam banyak ras, sebagaimana telah disebutkan di muka antara lain ras Arya, Mongoloid, Negroid, Melanesia, dan Austroloid.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam aneka suku bangsa dan ras bisa membentuk menjadi satu bangsa, atau bisa berdiri sendiri menjadi bangsa yang berbeda. Masing-masing bangsa baik yang terbentuk dari kumpulan aneka suku bangsa dan ras maupun yang hanya terdiri

dari satu suku bangsa dan ras keberadaannya diikat oleh sebuah identitas kultural (*cultural identity*). Bangsa yang terdiri dari aneka suku bangsa memiliki kesamaan *identitas kultural* dalam cakupan luas, sebaliknya bangsa yang hanya terdiri dari satu suku bangsa mempunyai *identitas kultural* dalam cakupan yang lebih sempit yaitu identitas kultural dari suku bangsanya sendiri.

Ben Anderson (1991) seorang ilmuwan politik, melihat keberadaan bangsa secara berbeda. Menurutnya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political community*) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Menurut ilmuwan ini, dinyatakan sebagai komunitas politik karena bangsa yang kecil sekalipun para warganya tidak saling kenal satu sama lain; Disebut sebagai hal yang dibayangkan karena bangsa yang besar sekalipun selalu memiliki batas-batas wilayah yang jelas.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa Ben Anderson tidak melihat bangsa dari segi asal usul berupa banyak sedikitnya suku bangsa dan ras yang membetuknya, akan tetapi lebih memandang persepsi masing-masing warganya tentang batas-batas yang jelas wilayahnya. Sebuah bangsa dapat terwujud dari aneka macam suku bangsa dan ras yang beragam, contohnya bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan ras, namun dapat juga satu suku bangsa dan ras membentuk lebih dari satu bangsa yang berbeda, contohnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang berasal dari satu suku bangsa dan ras yang sama yaitu Arab. Oleh karenanya, konsep sebuah bangsa dewasa ini lebih menunjuk pada konsep negara-bangsa (*nation-state*).

Negara (*state*) adalah konsep yang menunjuk pada suatu bangsa yang sudah memiliki ikatan nilai dalam bentuk konstitusi dasar, dengan batas wilayah yang jelas, serta memiliki pemerintahan tersendiri yang sah. Oleh karena itu secara *konstitutif*, negara dikatakan ada ketika sudah memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu: (1) adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas, (2) adanya sejumlah penduduk atau rakyat yang mendiami wilayah, serta (3) adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat memerintah rakyatnya dalam wilayah tersebut. Sedangkan secara *deklaratif*, negara dikatakan ada ketika telah memiliki: (1) tujuan negara, (2) konstitusi atau undang-undang dasar, serta (3) adanya pengakuan dari negara lain baik secara *de jure* maupun secara *de facto*.

Menurut banyak ahli terdapat tiga teori tentang asal usul negara, yaitu teori hak ketuhanan, teori keunggulan kekuatan, dan teori perjanjian sosial. *Teori hak ketuhanan*, menjelaskan bahwa hakekat penguasa negara adalah Tuhan melalui raja sebagai wakil Tuhan. Kekuasaan raja tidak dapat digugat dan tidak dapat dibantah. Menentang raja sama artinya dengan menentang kekuasaan Tuhan. Bukti dari teori ini adalah ditemukannya dokumen peraturan perundang-undangan Hammurabi yang disebarluaskan oleh raja Babilonia sekitar tahun 2100 SM. Pada peraturan itu disebutkan bahwa raja Hammurabi adalah titisan Tuhan.

Teori kekuatan fisik, menyebutkan bahwa kekuatan adalah kebenaran. Tokoh teori ini adalah Thrasymachus, beliau menyebutkan bahwa keadilan atau kebenaran tidaklah berarti sama sekali selain dari kepentingan pihak yang kuat. Berawal dari keinginan pihak yang kuat menjadikan beberapa pihak tunduk pada kekuatannya sehingga membentuk suatu hubungan penguasa dengan yang dikuasai dalam suatu batas-batas wilayah tertentu.

Teori ketiga adalah *teori perjanjian sosial (social contract)*. Teori ini menjelaskan bahwa melalui perjanjian sosial atau kontrak sosial suatu negara terbentuk (Carlton Clymer Rodee dkk, 2000). Teori perjanjian sosial dikemukakan banyak ahli, antara lain dikemukakan oleh Plato, Epicurus, Cicero, St. Agustinus, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Teori perjanjian sosial dianggap paling tepat dalam menjelaskan terjadinya negara, mengingat teori ini dianggap paling dekat dengan ajaran-ajaran demokrasi sebagaimana diimpikan oleh banyak negara. **Para tokoh teori perjanjian sosial umumnya menandaskan bahwa hubungan antara penguasa dan yang dikuasai semata-mata dilandasi oleh kesepakatan, baik yang tegas maupun tidak tegas. Kedua belah pihak antara pemerintah dan yang diperintah diikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi demi eksistensi negara,** (Cheppy Haricahyono. 1991).

Studi tentang keberadaan negara-bangsa di dunia banyak dilakukan oleh ilmuwan dari beberapa disiplin ilmu. Biasanya studi terhadap suatu bangsa dan negara banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sosiologi, antropologi, politik, psikologi, ilmu sejarah. Namun ilmuwan pendidikan komparatif juga ikut melakukan studi tentang aneka macam negara-bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan seorang ahli ketika mengkaji sistem

pendidikan pada suatu bangsa akan selalu dikaitkan dengan latar belakangnya berupa keadaan historis, politis, ekonomis, dan sosiologis dari bangsa tersebut. Oleh karenanya ilmuwan pendidikan komparatif telah memastikan dirinya sebagai pihak yang selalu mempelajari keberadaan bangsa-bangsa di dunia.

B. Konsep Dasar Budaya

Konsep budaya dan kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu *buddhaya* bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Pendapat lain menyebutkan bahwa konsep budaya dan kebudayaan berasal dari kata *budi* dan *daya*. *Budi* berarti akal sedangkan *daya* berarti hasil upaya. Dengan demikian secara etimologis kata kebudayaan diartikan: hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia (Koentjaraningrat, 1990).

Ditengok dari istilah asing, kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut *culture* yang berasal dari kata *colere* (Latin), berarti mengolah atau mengerjakan. Oleh karena itu, kebudayaan secara etimologis diartikan segala daya upaya manusia untuk mengolah dan mengubah alam menjadi sesuai dengan keinginan manusia. Dari sinilah maka kehidupan manusia tidak semata-mata natural akan tetapi juga kultural sesuai dengan kemajuan peradabannya. Peradaban (*civilization*) diartikan sebagai bagian unsur kebudayaan yang sifatnya halus, maju, dan indah seperti kesopanan pergaulan, keindahan kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian kebudayaan diartikan sebagai cara hidup (*ways of life*) yang telah dikembangkan oleh anggota-anggota masyarakat manusia.

Tampilan-4
Manusia dan Kebudayaan



(Sumber: http://www.iloveblue.com/imagesnews/rame2_pasar_agung.jpg)

Beberapa ahli memahami kebudayaan secara beragam sesuai dengan perspektifnya masing-masing. MM. Djodjodigono mengartikan Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. F. Keessing memandang kebudayaan selalu terkait dengan masyarakat. Kebudayaan meletakkan fokusnya pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Sedangkan masyarakat meletakkan fokusnya pada orang-orang yang menjalankan adat kebiasaan.

Margaret Mead (Imran Manan, 1989) mengartikan kebudayaan sebagai seluruh kompleks perilaku tradisional yang telah dikembangkan oleh ras manusia yang secara berturut-turut dipelajari oleh masing-masing generasi. Edward B. Tylor menyebutkan kebudayaan adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan apa saja kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat.

Pengertian yang lebih ringkas bila dibandingkan dengan dua pendapat di atas adalah dari Selo Soemardjan. Menurutnya, budaya adalah semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Cipta merupakan kemampuan mental dan berfikir manusia, rasa meliputi jiwa manusia yang mewujudkan ke dalam kaidah-kaidah nilai, sedangkan karsa adalah kehendak yang ada di dalam diri manusia yang dapat menghasilkan teknologi dan

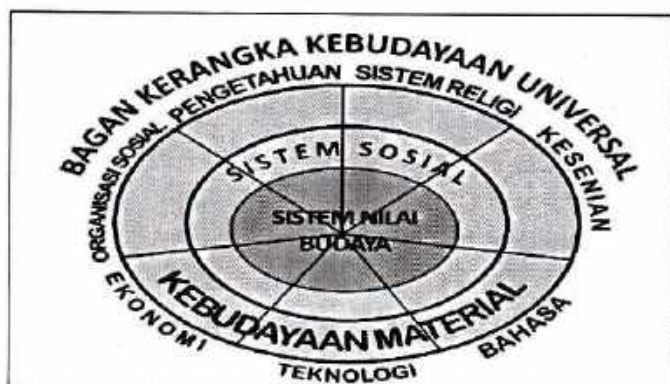
kebudayaan material. Adapun Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri manusia melalui belajar.

Tampilan-5
Anak Sedang Belajar Kebudayaan



Secara umum kebudayaan memiliki ciri-ciri: (1) berdasar simbol (*based on symbols*), (2) menjadi milik bersama (*culture is shared*), (3) selalu dipelajari (*culture is learned*), dan (4) digunakan secara fleksibel secara adaptif (*culture is adaptive*). Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka kebudayaan suatu bangsa mencakup banyak unsur. Unsur-unsur kebudayaan yang dimaksud meliputi: sistem pengetahuan, sistem religi, sistem kesenian, sistem bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, dan sistem organisasi sosial. Masing-masing unsur budaya terdiri atas tiga lapisan. *Lapisan pertama* yaitu lapisan paling luar berupa kebudayaan material contohnya gedung sekolah, lapangan olahraga, kendaraan, jembatan, laboratorium, dan masih banyak lagi benda-benda hasil kreasi suatu bangsa. *Lapisan kedua* adalah berupa sistem sosial yang wujudnya adalah aneka tindakan dan kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat. Sedangkan *lapisan ketiga* atau *lapisan paling dalam* adalah berupa sistem nilai.

Tampilan-6
Kebudayaan Universal



Pengetahuan tentang kebudayaan suatu bangsa meliputi aspek kebudayaan material dan non-material. Kebudayaan material berisi hasil-hasil teknologi suatu bangsa dari yang sederhana sampai dengan yang paling mutakhir atau canggih. Sedangkan kebudayaan non-material berisi pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma tentang bagaimana manusia sebagai warga bangsa harus berinteraksi dan memecahkan masalah.

Pengetahuan tentang aneka macam kebudayaan yang dimiliki masing-masing bangsa menjadikan para peneliti tentang pendidikan komparatif lebih memahami aneka perbedaan potret pendidikan yang ada di beberapa bangsa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada sikapnya yang lebih inklusif dan lebih toleran dalam memandang aneka perbedaan kebudayaan.

C. Pendidikan Komparatif sebagai Studi Antar Bangsa dan Budaya

Penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa studi tentang sistem pendidikan pada suatu bangsa akan selalu dikaitkan dengan latar belakang dimana sistem pendidikan tersebut diselenggarakan. Latar belakang penyelenggaraan sistem pendidikan berupa keadaan historis, politis, ekonomis, dan sosiologis dari suatu bangsa penyelenggara. Antara sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa dengan keadaan bangsa tersebut adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya ilmuwan pendidikan komparatif telah memastikan dirinya

sebagai pihak yang selalu melakukan studi keberadaan bangsa-bangsa di dunia.

Sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari aneka sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, baik yang terselenggara dalam satu bangsa maupun antarbangsa yang berbeda, maka pendidikan komparatif juga ikut mendorong kepada banyak pihak untuk melakukan kajian-kajian tidak hanya pada tataran penyelenggaraan sistem-sistem pendidikannya semata, tetapi juga kajian aspek kehidupan di luar pendidikan dalam suatu bangsa.

Pengkajian aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, agama, sejarah, dan budaya suatu bangsa yang memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya potret penyelenggaraan sistem-sistem pendidikan, amat penting untuk dilakukan. Sebagaimana disebutkan IL. Kandel (Imam Barnadib, 1987), bahwa studi pendidikan di suatu bangsa hendaknya juga mempelajari latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaannya. Latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaannya tersebut memiliki pengaruh kuat terhadap penyelenggaraan sistem pendidikannya. Faktor-faktor di luar sistem pendidikan yang memiliki pengaruh kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan disebut sebagai *intangible factors*. Faktor-faktor *intangible* tadi penting untuk dipelajari selain mempelajari sistem pendidikan yang ada dalam suatu bangsa. Hal ini dilakukan rangka untuk lebih bisa mengerti dan memahami tentang potret penyelenggaraan sistem pendidikan dalam suatu bangsa.

Dengan mempelajari sistem pendidikan beserta keseluruhan aspek kehidupan yang mempengaruhinya dalam suatu bangsa, maka pendidikan komparatif juga telah mendorong berkembangnya studi-studi tentang bangsa beserta segenap aspek kehidupannya. Namun yang lebih spesifik bagi pendidikan komparatif dalam melakukan studi pendidikan perbandingan antarbangsa adalah studi keterkaitan pendidikan dengan aspek-aspek kehidupan lain.

Studi pendidikan komparatif menyangkut banyak bangsa di banyak kawasan dunia. Aneka bangsa di kawasan dunia dewasa ini dapat dibedakan menjadi lima jenis yang terentang mulai dari yang maju sampai ke yang bangkrut. Lima jenis bangsa yang dimaksud adalah: (1) kelompok bangsa-bangsa maju dan makmur (*developed country*) seperti bangsa-bangsa yang ada di kawasan Eropa barat; (2) Kelompok bangsa

sedang berkembang (*developing country*) seperti bangsa-bangsa ASEAN, bangsa-bangsa Afrika bagian utara; (3) Kelompok bangsa miskin atau terbelakang (*under developing country*) seperti Sri Lanka, Banglades, Papua Nugini, Bolivia, dan El Salvador; (4) Kelompok bangsa paling miskin (*least developed country*) seperti Timor Leste, Ethiopia, Zambia; (5) Kelompok bangsa yang bangkrut (*failed country*) atau negara yang nyaris ambruk (*the destitute country*), yaitu kelompok bangsa yang tidak saja amat miskin akan tetapi juga mengalami proses pemiskinan melalui perang saudara sehingga kehidupan bangsa ini semakin terpuruk dan hampir-hampir tidak ada harapan untuk bangkit, seperti negara Sudan, Somalia, Kenya, dan Kongo (Zamroni, 2007).

Masing-masing bangsa baik yang termasuk paling makmur atau maju sampai ke bangsa yang bangkrut semuanya memiliki potret sistem pendidikan yang unik dan khas satu sama lain. Disamping itu masing-masing bangsa memiliki problem dalam menyelenggarakan sistem pendidikan, termasuk negara-negara yang dikatakan sudah maju sekalipun. Oleh karena itu masing-masing berusaha mempelajari bagaimana negara lain menyelesaikan problem pendidikannya.

Kelompok negara terbanyak yang ada di muka bumi ini adalah kelompok Negara sedang berkembang. Secara teoritik negara Indonesia sebagai negara berkembang direkomendasikan oleh para ahli harus belajar menyelesaikan masalah pendidikan kepada sesama negara berkembang. Hal ini dikarenakan bila Indonesia belajar kepada sesama negara berkembang berarti telah menerapkan sebagian dari azas kesebandingan (*comparability*) dalam melakukan studi perbandingan. Negara sedang berkembang memiliki sejumlah kriteria. Adapun kriteria negara yang sedang berkembang menurut Don Adams dan Byork (Suryati Sidhartha, 1989) adalah sebagai berikut.

a. Tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi

Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2001 menunjukkan bahwa angka kelahiran (*fertility rate*) di negara-negara berkembang (*developing countries*) lebih-lebih negara berkembang yang paling terlambat (*least developed countries*) memiliki angka kelahiran amat tinggi. Seperti Nigeria 8,0, Mali 7,9, Angola 7,2, Malawi 6,8, Rwanda 6,2, Saudi Arabia 6,2, Pakistan 5,5, Tanzania 5,5, Gambia 5,2, Nepal 4,8.

Khusus *negara-negara ASEAN* yang juga termasuk kelompok negara berkembang memiliki angka kelahiran bayi, seperti Singapura 1,6, Thailand 2,1, Vietnam 2,5, Indonesia 2,6, Brunai Darussalam 2,8, Malaysia 3,3, Myanmar 3,3, Philipina 3,6, dan Kamboja 5,3. Rata-rata angka kelahiran di negara berkembang 3,1 sebaliknya untuk negara-negara maju rata-rata 1,7 antara lain seperti Italia 1,2, Jerman 1,3, Jepang 1,4, Australia 1,8, dan USA 2,0,

Dalam hal angka kematian (*mortality rate*) khususnya bayi umur di bawah satu tahun rata-rata negara berkembang adalah 61 sedangkan negara maju rata-rata 7 per seribu kelahiran.

b. Kondisi sanitasi lingkungan dan pemeliharaan kesehatan yang buruk

Kondisi sanitasi dan praktek pemeliharaan kesehatan ini antara lain dapat dilihat pada banyaknya penduduk yang memiliki sarana sanitasi yang memadai (*adequate sanitation facilities*) minimal dalam hal MCK (mandi, cuci, kakus/toilet). Laporan HDI 2001 menyebutkan bahwa banyak negara yang penduduknya belum semua memiliki sarana sanitasi memadai. Seperti Malaysia 98%, Vietnam 73%, Indonesia 66%, Bolivia 66%, Fiji 43%, Cina 38%, India 31%, Nepal 27%, Kongo 20%, dan yang terendah di dunia Rwanda 8%. Sebaliknya negara-negara maju rata-rata sudah 100%.

Dalam penggunaan air bersih, di beberapa negara juga masih belum semua penduduknya bisa menggunakan air bersih. Seperti India 88%, Malaysia 87%, Nepal 81%, Indonesia 76%, Cina 75%, Vietnam 56%, Fiji 47%, dan terendah di dunia adalah Ethiopia 24%.

c. Kondisi perumahan yang buruk

Penduduk di negara berkembang umumnya memiliki kondisi perumahan yang masih belum sehat dan nyaman bahkan banyak diantaranya yang masih kumuh. Lebih-lebih di beberapa negara Afrika, Amerika latin dan Asia selatan, menurut banyak laporan masih memiliki kondisi perumahan gubuk yang kumal dan kumuh. Berbeda dengan kondisi perumahan penduduk di negara maju, kondisi kumuh hampir tidak ditemukan.

Untuk menyebutkan kondisi perumahan yang bagaimana yang dikatakan sebagai layak sebagai petunjuk negara berkembang masih belum ada indikator yang jelas. Akan tetapi para ahli mempergunakan ukuran berapa meter² jatah ruang per orang dalam rumah. Negara maju umumnya memandang penting "*privacy*" sebagai bagian dalam hidup berkeluarga. Masing-masing anggota keluarga perlu ada hal yang sifatnya "*privacy*" sehingga ruang-ruang perumahan tidak di buat tanpa sekat dan dihuni secara berjejal-jejal oleh banyak penghuni. Akan tetapi ruang perumahan dirancang dan didirikan dengan diberi sekat-sekat kamar dengan penghuni yang cukup. Hal ini dibuat dalam rangka menjaga "*privacy*".

d. Banyak penduduk bekerja di sektor pertanian

Jumlah penduduk di negara berkembang yang bekerja di sektor pertanian banyak sekali rata-rata 61% sedangkan sisanya bekerja di sektor industri formal maupun informal. Sedangkan penduduk di negara-negara maju yang bekerja di sektor pertanian hanya 19 % (*Human Development Report UNDP tahun 2001*). Menurut Don R. Hoy (Suryati Sidharto, 1989:14) bahwa di negara-negara berkembang orang yang hidup dengan bertani berkisar 40-80% sebaliknya di negara maju hanya kurang dari 20%.

e. Pendapatan perkapita rendah

Pendapatan perkapita bisa dilihat dari angka *Gross Domestic Product (GDP)* yang dimilikinya. Rata-rata GDP negara berkembang menurut laporan UNDP 2001 adalah GDP \$ 3.530 sebaliknya negara maju \$ 22.020. GDP beberapa negara ASEAN antara lain: Singapura (\$20.767), Malaysia (\$ 8.209), Thailand (\$ 6.132), Philipina (\$ 3.805), Indonesia (\$ 2,857), Laos (\$ 1.471), Kamboja (\$ 1.361), Myanmar (\$ 1.027), Vietnam (\$ 1.860).

f. Rendahnya konsumsi makanan

Umumnya masyarakat di negara berkembang mengkonsumsi makanan dengan kadar gizi rendah. Hal ini disamping disebabkan rendahnya pengetahuan tentang gizi dan kalori juga karena pendapatan mereka yang rendah, sehingga dalam hal makan yang dipentingkan

mereka adalah kenyang tanpa mempertimbangkan aspek gizinya. Menurut Suryati Sidharto (1989:16), presentasi rata-rata rendahnya kalori yang bisa dicukupi oleh masyarakat di beberapa negara antara lain: Mali hanya 74%, Papua Nugini 79%, Honduras 95%, Indonesia 111%, Jepang 124%, USA 137%.

g. Rendahnya angka melek huruf dan jumlah siswa bersekolah

Rata-rata negara berkembang berpenduduk dengan tingkat buta huruf yang masih tinggi yakni 26,1% yang berarti penduduk yang melek huruf ada 72,9% sedangkan di negara maju semua penduduknya sudah melek huruf. Bahkan penduduk di negara berkembang yang paling tertinggal angka melek hurufnya rata-rata hanya 48,9% seperti: Nigeria 15,3%, Burkina Faso 23%, Sierra Leone 32%, Zambia 35,7%, Sinegal 36,4% dan Nepal 40%.

Adapun anak yang bersekolah di negara berkembang rata-rata juga masih rendah dilihat dari angka partisipasi siswa bersekolah. Rata-rata APK SD di negara berkembang 47% dan APK SLTP 23% (Laporan UNDP 2001). Hal ini berarti anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah masih cukup tinggi, baik untuk sekolah tingkat SD maupun SLTP.

h. Kondisi kesatuan nasional yang rendah dan tidak merata

Dewasa ini kesatuan nasional di beberapa negara berkembang mengalami tantangan. Negara berkembang yang umumnya masih dalam taraf belajar berdemokrasi di dalamnya sering terjadi konflik politik antar faksi-faksi yang ada. Bahkan tidak sedikit di negara berkembang terjadi pemberontakan dan upaya-upaya kudeta.

i. Tradisi menentukan perilaku dan stratifikasi sosial berdasarkan keturunan

Kuatnya nilai-nilai tradisi di beberapa negara menyebabkan mereka lambat berkembang. Negara-negara berkembangnya umumnya memiliki nilai-nilai yang sangat konservatif yang disebut *survival values* seperti: ketaatan pada tradisi, kepercayaan kepada hal-hal irrasional,

narimo, dan orientasi ke masa lalu. (Inglehart, 2000). Akibat pemilikan nilai-nilai tersebut mereka kurang bisa berkembang mengejar negara-negara maju.

Nilai-nilai tradisi di negara-negara berkembang juga menekankan stratifikasi sosial masyarakat lebih pada keturunan dan simbol-simbol keturunan termasuk gelar-gelar kebangsawanan masih dihargai tinggi. Sehingga penduduk yang berasal dari keturunan terhormat dan memiliki gelar kebangsawanan akan lebih mudah memiliki posisi sosial atas.

j. Kurangnya kesetaraan gender

Umumnya di negara berkembang kesetaraan gender masih belum meningkat secara berarti. Pelecehan terhadap kaum perempuan seperti pemerkosaan, kekerasan, pembatasan pekerjaan, sistem penggajian yang lebih rendah, dan lain-lain yang kesemuanya merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang merendahkan terhadap kaum perempuan. Akibat tidak langsung dari ketimpangan gender tersebut juga berlanjut pada ketimpangan dalam memperoleh pendidikan. Umumnya tingkat pendidikan perempuan masih belum bisa menyamai laki-laki (Suryati Sidharto, 1989: 19).

k. Rendahnya tingkat teknologi komunikasi dan transportasi

Kondisi infrastruktur berupa teknologi komunikasi dan transportasi di negara-negara berkembang umumnya hanya berpusat di daerah-daerah perkotaan sedangkan daerah-daerah pedesaan masih tertinggal jauh. Misalnya kurangnya jalan beraspal, kendaraan bermotor, dan telpon masih belum banyak.

l. Banyaknya penggunaan tenaga kerja kanak-kanak

Masih banyaknya para pengusaha yang memperkerjakan anak-anak sebagai tenaga kerja masih ada di beberapa negara berkembang. Alasan utama dari para pengusaha tersebut adalah untuk menekan ongkos produksi sektor gaji karyawan. Umumnya karyawan yang berasal dari orang dewasa menuntut gaji yang relatif tinggi serta

fasilitas lainnya, namun untuk pekerja anak-anak relatif mau digaji rendah dan tidak menuntut yang macam-macam.

m. Ekspor lebih banyak berupa barang mentah

Negara-negara maju umumnya mengekspor barang-barang hasil industri berupa produk teknologi seperti: elektronik, kendaraan bermotor, mesin pabrik, komputer, handphone, satelit, pesawat terbang, kapal laut, peralatan dan senjata canggih militer, alat-alat kedokteran. Semua produk teknologi dari negara maju tersebut umumnya berharga mahal.

Sebaliknya untuk negara-negara berkembang umumnya lebih banyak mengekspor hasil-hasil alam berupa hasil pertanian, hasil hutan, hasil tambang, hasil laut yang biasanya masih berupa barang-barang mentah atau belum diolah secara matang sebelum diekspor. Barang-barang produk dari negara-negara berkembang yang berupa hasil-hasil teknologi tersebut selalu harganya murah di pasaran dunia.

n. Tabungan dan investasi masih rendah

Oleh karena pendapatan per kapita penduduk di negara-negara berkembang rendah, maka tabungan dan investasi yang dimiliki penduduk juga rendah. Pada umumnya tabungan dan investasi banyak dimiliki oleh mereka yang memiliki sisa hasil belanja yang tinggi akibat pendapatan mereka yang tinggi. Negara yang berpendapatan tinggi bisa menisakan dana anggarannya untuk meningkatkan tabungan atau untuk keperluan investasi.

Namun negara yang miskin dengan jumlah dana pendapatan sedikit, maka dana tersebut seluruhnya habis untuk keperluan pokok yang rutin dan tidak menisakan sedikitpun kecuali minta hutang dari negara lain. Bahkan banyak negara berkembang berhutang tidak untuk investasi tetapi hanya untuk menutup devisa anggaran.

o. Cara pendayagunaan tanah pertanian yang tidak memperhatikan perawatan tanah yang mengakibatkan kesuburannya merosot.

Banyak negara yang tidak memperhatikan keadaan *sustainability* lingkungan dan sumber alam dalam mengeksploitasi hasil-hasil alam.

Salah satu bentuk tidak memperhatikan keberlanjutan sumber alam adalah perawatan tanah pertanian agar tetap subur. Para petani di negara-negara berkembang umumnya, mengerjakan tanah pertanian dengan cara membakar bila ingin membersihkan ladang, penggundulan lahan, atau penggunaan bahan-bahan kimia berlebihan. Akibatnya kesuburan tanah merosot dan pengerjaan tanah pertanian menjadi kurang optimal.

p. Militer dan kaum feodal mendominasi pemerintahan

Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan negara berkembang banyak dipegang oleh mereka yang berasal dari militer dan kaum feodal. Kaum militer lebih berkuasa disebabkan masyarakat masih belum banyak berpendidikan yang memerlukan sosok pemimpin tegas dalam rangka membawa stabilitas sosial politik. Para militer memerlukan mitra dari kaum feodal untuk mendukung terciptanya percepatan dalam program-program pembangunan. Kaum feodal ditempatkan sebagai tenaga-tenaga ahli di bidang pembangunan untuk melengkapi kekurangan pengetahuan dan keahlian kaum militer dalam hal pembangunan sosial.

q. Kekayaan banyak di tangan sekelompok kecil orang dan kelas menengah sangat sedikit.

Kesenjangan sosial ekonomi di negara-negara berkembang umumnya masih sangat tinggi. Menurut banyak kalangan, 90 % kekayaan negara hanya dinikmati oleh 10% penduduk, atau sebaliknya 90% penduduk di negara berkembang hanya menguasai 10% kekayaan negaranya. Sekelompok kecil masyarakat di negara berkembang yang menguasai sebagian besar kekayaan negara tersebut antara lain: elit militer, politisi, konglomerat, dan birokrat yang kesemuanya bisa melakukan kolusi untuk menguasai sebagian besar kekayaan negara tersebut.

r. Fasilitas kredit buruk dan bunga pinjaman tinggi

Lembaga-lembaga perbankan masih belum banyak dan kondisi simpan pinjam relatif masih dilakukan secara konvensional.

Konsekwensinya lembaga-lembaga pemberi kredit masih sedikit dan lembaga-lembaga tengkulak atau diistilahkan dengan *'bank pleci'* relatif masih banyak. Sehingga bunga kredit relatif tinggi bahkan bisa mencekik para petani, nelayan, dan pengusaha sektor informal yang umumnya sebagai pengguna kredit.

s. Layanan jasa langka

Pada negara-negara maju usaha sektor jasa telah mengalami kemajuan pesat. Di negara maju tersebut prosentase usaha sektor pertanian, perdagangan, dan jasa secara proporsional berturut-turut adalah 30%, 45%, dan 25%. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di negara berkembang. Keadaan usaha sektor jasa di negara-negara berkembang relatif masih rendah dan sektor pertanian sangat tinggi. Prosentase usaha penduduk di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa di negara-negara berkembang umumnya adalah 55%, 30%, dan 15%. Kondisi yang demikian menyebabkan layanan jasa di negara-negara berkembang masih rendah.

t. Tanah pertanian produktif terpetak-petak dalam ukuran kecil

Negara miskin dan berkembang umumnya adalah agraris dan penduduknya banyak berkerja di sektor pertanian. Beberapa kajian historis menyebutkan bahwa para petani negara berkembang menggarap tanahnya secara tradisional dan mengajarkan cara bertaniya secara turun temurun. Mereka membagi-bagikan tanah kepada keturunannya menurut hukum adat, sehingga pola pewarisan tanah dengan cara membagi-bagi tanah tersebut lama kelamaan bagian masing-masing keturunannya menjadi sempit.

Kondisi kepemilikan tanah yang hanya sempit tersebut akan menyulitkan untuk dilakukan pengelolaan tanah pertanian secara modern dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi hasil pertanian.

u. Kekayaan berpusat di kota-kota besar atau disimpian di luar negeri

Gejala ketimpangan sosial-ekonomi di negara berkembang sangat tampak nyata. Beberapa penduduk yang kaya yang umumnya tinggal

di kota menyebabkan aktivitas ekonomi kota lebih dinamis dan ekonomi desa hampir selalu stagnan, sehingga perputaran uang dan kondisi kekayaan banyak berpusat di perkotaan. Bahkan beberapa konglomerat besar menyimpan kekayaannya di luar negeri.

v. Loyalitas sosial berpusat pada kekerabatan atau kedaerahan.

Penduduk di negara berkembang masih memiliki pandangan yang relatif sempit dan semangat kekerabatan dan kedaerahannya masih kental. Ikatan-ikatan perkumpulan yang bersifat kekerabatan dan kedaerahan masih menggejala.

Ciri-ciri negara-bangsa sebagaimana disebutkan oleh Don Adams dan Byork di atas kebanyakan merujuk kepada negara-negara yang ada di kawasan Afrika utara, Asia barat, Asia selatan dan tenggara, serta Amerika Latin. Umumnya berada di belahan dunia bagian selatan. Sedangkan negara-negara maju umumnya berada di belahan dunia bagian utara.

D. Ringkasan

Secara natural manusia selalu ingin hidup berkelompok. Pengelompokan kehidupan manusia menurut banyak kategori seperti jenis kelamin, adat istiadat atau etnis, ciri-ciri fisik atau ras, keimanan dan kepercayaan, serta pekerjaan. Berdasarkan aneka macam pengelompokan yang merupakan karakter dasar alamiah dan naluriah pada diri manusia di atas, maka membuka jalan pada terwujudnya suku bangsa, kemudian berkembang menjadi kampung, desa, kota bertembok, kerajaan dan kekaisaran, serta pada akhirnya menjadi satu kesatuan bangsa.

Bangsa (*nation*) diartikan sebagai pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan-kesamaan tertentu. Menurut Ben Anderson (1991) bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political community*) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Sebuah bangsa dapat terwujud dari aneka macam suku bangsa dan ras yang beragam, maupun satu suku bangsa atau ras bisa membentuk lebih dari satu bangsa yang berbeda. Konsep bangsa dewasa ini sudah menunjuk pada negara-bangsa (*nation-state*). Sedangkan negara (*state*) adalah konsep

yang menunjuk pada suatu bangsa yang sudah memiliki ikatan nilai berwujud konstitusi dasar dengan batas wilayah yang jelas serta memiliki pemerintahan tersendiri. Ada tiga teori asal usul negara, yaitu *teori hak ketubuhan*, *teori keunggulan kekuatan*, dan *teori perjanjian sosial*.

Bagian lain adalah budaya atau kebudayaan yang secara etimologis diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia (Koentjaraningrat, 1990). Sedangkan peradaban (*civilization*) adalah sebagai bagian unsur kebudayaan yang sifatnya halus, maju, dan indah seperti kesopanan pergaulan, keindahan kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian kebudayaan diartikan sebagai cara hidup (*ways of life*) yang telah dikembangkan oleh anggota-anggota masyarakat manusia. MM. Djodigono mengartikan Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri manusia melalui belajar.

Kebudayaan memiliki ciri-ciri: berdasar symbol, dibagi dan dimiliki bersama oleh sesame pemilik budaya, dipelajari, dan digunakan secara fleksibel secara adaptif. Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka kebudayaan suatu bangsa mencakup banyak unsure, yaitu: sistem pengetahuan, sistem religi, sistem kesenian, sistem bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, dan sistem organisasi sosial. Masing-masing unsur budaya terdiri atas tiga lapisan: *lapisan pertama* berupa kebudayaan material; *lapisan kedua* berupa sistem sosial; dan *lapisan ketiga* atau *lapisan paling dalam* berupa sistem nilai.

Kebudayaan suatu bangsa meliputi aspek *kebudayaan material* dan *non-material*. Kebudayaan material berisi hasil-hasil teknologi suatu bangsa dari yang sederhana sampai dengan yang paling mutakhir atau canggih. Sedangkan kebudayaan non-material berisi pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya disebut *kebudayaan kognitif*, serta berisi norma-norma tentang bagaimana manusia sebagai warga bangsa harus berinteraksi dan memecahkan masalah yang disebut *kebudayaan normatif*.

Pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu yang mempelajari aneka sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang baik yang ada dalam satu bangsa maupun antar bangsa yang berbeda, maka

pendidikan komparatif juga ikut mendorong kepada banyak pihak untuk melakukan kajian-kajian tidak hanya pada tataran penyelenggaraan sistem-sistem pendidikan tetapi juga kajian pada aspek kehidupan di luar sistem pendidikan suatu bangsa. Pengkajian aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, agama, sejarah, dan budaya suatu bangsa sesungguhnya amat penting dilakukan mengingat aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh pada penyelenggaraan sistem pendidikan. Aspek-aspek tersebut oleh I.L. Kandel disebut sebagai *intangibile factors*.

Studi pendidikan komparatif menyangkut banyak negara di beberapa kawasan dunia. Ada lima kelompok jenis negara di dunia yaitu: (1) kelompok negara-negara maju dan makmur (*developed country*) seperti negara-negara yang ada di kawasan Eropa barat; (2) Kelompok negara sedang berkembang (*developing country*) seperti negara-negara ASEAN, negara-negara Afrika bagian utara; (3) Kelompok negara miskin atau terbelakang (*under developing country*) seperti Sri Lanka, Banglades, Papua Nugini, Bolivia, dan El Salvador; (4) Kelompok negara paling miskin (*least developed country*) seperti Timor Leste, Ethiopia, Zambia; (5) Kelompok negara-negara yang bangkrut (*failed country*) atau negara yang nyaris ambruk (*the destitute country*) seperti negara Sudan, Somalia, Kenya, dan Kongo (Zamroni, 2007).

Kelompok negara terbanyak yang ada di muka bumi ini adalah kelompok negara sedang berkembang. Secara teoritik negara Indonesia sebagai negara berkembang direkomendasikan oleh para ahli harus belajar menyelesaikan masalah pendidikan kepada sesama negara berkembang. Hal ini dikarenakan bila Indonesia belajar kepada sesama negara berkembang berarti telah menerapkan sebagian dari azas kesebandingan (*comparability*). Negara sedang berkembang memiliki sejumlah kriteria sebagaimana dijelaskan Don Adams dan Byork (Suryati Sidharto, 1989) yaitu: (1) *tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi*, (2) *kondisi sanitasi lingkungan dan pemeliharaan kesehatan yang buruk*, (3) *kondisi perumahan yang buruk*, (4) *banyak penduduk bekerja di sektor pertanian*, (5) *pendapatan perkapita rendah*, (6) *rendahnya konsumsi makanan*, (7) *rendahnya angka melek huruf dan jumlah siswa bersekolah*, (8) *kondisi kesatuan nasional yang rendah dan tidak merata*, (9) *tradisi menentukan perilaku dan stratifikasi sosial berdasarkan keturunan*, (10) *kurangnya kesetaraan gender*, (11) *rendahnya tingkat teknologi komunikasi dan transportasi*, (12) *banyaknya penggunaan tenaga kerja kanak-kanak*, (13) *ekspor lebih banyak berupa barang mentah*, (14)

tabungan dan investasi masih rendah, (15) cara pen-dayagunaan tanah pertanian yang tidak memperhatikan perawatan tanah yang mengakibatkan kesuburannya merosot, (16) militer dan kaum feodal mendominasi pemerintahan, (17) kekayaan banyak di tangan sekelompok kecil orang dan kelas menengah sangat sedikit, (18) fasilitas kredit buruk dan bunga pinjaman tinggi, (19) layanan jasa langka, (20) tanah pertanian produktif terpetak-petak dalam ukuran kecil, (21) kekayaan berpusat di kota-kota besar atau disimpian di luar negeri, (22) loyalitas sosial berpusat pada kekerabatan atau kedaerahan.

Ciri-ciri Negara berkembang sebagaimana disebutkan oleh Don Adams dan Byork di atas kebanyakan merujuk kepada negara-negara yang ada di kawasan Afrika utara, Asia barat, Asia selatan dan tenggara, serta Amerika Latin. Umumnya berada di belahan dunia bagian selatan. Sedangkan negara-negara maju umumnya berada di belahan dunia bagian utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LBM.
- Benedict Anderson. 1991. *Imagined Communities, Reflections on The Origin and Speed of Nationalism*. London and New York: Greenwood Press.
- Carlton Clymer Rodee dkk . 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press
- Cheppy Haricahyono. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Imam Barnadib. 1987. *Pendidikan Perbandingan Buku Dua: Persekolaban dan Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Imran Manan. 1989. *Anthropologi Pendidikan Suatu Pengantar* (Buku terjemah karya George F. Kneller). Jakarta : P2LPTK Dirjen Dikti.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zamroni. 2007. *Mewujudkan pendidikan yang profesional: Diperlukan kecerdikan memanfaatkan peluang*. Makalah seminar pendidikan IKA Komisariat FIP di Universitas Negeri Yogyakarta 29 Januari 2007.

BAB IV

PERSPEKTIF METODOLOGIK STUDI PENDIDIKAN

Setelah mencermati dan mengkaji secara seksama isi paparan pada bab keempat ini, maka Anda akan dapat:

1. Memahami sekilas tentang metodologi pengetahuan ilmiah
2. Memahami fenomena pendidikan sebagai obyek studi pendidikan.
3. Memahami prinsip-prinsip etika dalam studi pendidikan.
4. Memahami komparasi sebagai alternatif metode penelitian pendidikan

Suatu pengetahuan dapat disebut ilmiah atau menjadi suatu disiplin ilmu apabila memenuhi beberapa persyaratan. Syarat disiplin ilmu adalah apabila ia memiliki obyek studi, memiliki kekhasan metodologik, dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil studi dengan kekhasan metodologik tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan mengandalkan obyektifitas. Berikut ini akan diulas tentang metodologi pengetahuan ilmiah dilanjutkan dengan fenomena pendidikan sebagai obyek studi pendidikan, kemudian prinsip-prinsip etika dalam studi pendidikan, dan berakhir pada komparasi sebagai alternatif metode penelitian pendidikan.

A. Metodologi Pengetahuan Ilmiah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki dimensi *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis*. Dimensi yang disebut pertama dan ketiga nampak kurang penting untuk dibahas pada bab ini, namun akan lebih banyak mengupas tentang dimensi yang kedua yaitu epistemologi.

Dimensi epistemologis dari suatu disiplin ilmu menyangkut cara atau metode dalam rangka memperoleh pengetahuan ilmiah, cara menentukan kebenaran suatu pengetahuan ilmiah, parameter atau standar-standar untuk membedakan mana yang termasuk pengetahuan ilmiah yang benar dan mana yang tidak, serta dasar-dasar argumen dari parameter tersebut. Dengan kata lain dimensi epistemologis dari disiplin ilmu adalah metode apa yang dimiliki dan dikembangkan oleh disiplin ilmu tersebut.

Setiap disiplin memiliki kekhasan metodologik yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lain. Misalnya Biologi memiliki metode yang berbeda dengan Ilmu Kimia. Metode yang dimiliki Ilmu Kimia berbeda dengan Fisika, dan metode dalam Fisika sangat berbeda dengan Matematika. Demikian pula metode dalam Matematika sangat berbeda dengan Ilmu Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Geografi, dan Ilmu Politik. Oleh karena itu masing-masing disiplin ilmu memiliki kekhasan metodologik.

Metode masing-masing disiplin ilmu umumnya dikenal dengan metode ilmiah (*scientific method*). Ada istilah metode ilmiah dan metodologi ilmiah. Metode adalah cara sedangkan metodologi adalah kajian konsep teoritik tentang aneka macam metode beserta kelebihan dan kelemahannya (Noeng Muhadjir, 1996). Dengan demikian metodologi ilmiah (*scientific methodology*) adalah kajian konsep teoritik tentang aneka macam metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah beserta kelebihan dan kelemahannya.

Menurut Val D. Rust (2003), istilah '*method*' dan '*methodology*' merupakan dua istilah yang telah begitu terjalin erat sehingga sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Namun, dalam pemahaman kita perlu dapat membedakannya. Hal ini sangat penting agar kita lebih dapat memahami pendidikan komparatif dalam konteks penelitian. Pemahaman kita berangkat dari pemahaman para ahli yang sering menggunakan istilah '*method*' mengacu pada semua aspek penelitian, sehingga tidak selalu jelas apa yang seharusnya dicari ketika mencoba untuk datang meneliti dengan sesuatu seperti pendidikan komparatif dengan kekhasan metode, atau bahkan masih dipertanyakan apakah sebenarnya metode komparasi pendidikan. Para pengajar komparasi pendidikan bukanlah satu-satunya pihak yang bersalah dengan istilah yang membingungkan. Pihak lain pun seperti ilmuwan sosial dalam sosiologi, psikologi, dan antropologi juga

seringkali mencampuradukkan dua istilah di atas. Ringkasnya 'research method' fokus pada pengumpulan data dan analisis data, sementara 'research methodology' berfokus pada desain penelitian dan mengkomunikasikan hasil penelitian.

Beberapa metode keilmuan tadi bila dikaji secara mendalam memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini telah lama diperdebatkan oleh kaum empirist, positivist, rasionalist, relativist tentang obyektivitas. Mereka berselisih pandangan tentang metode yang paling tepat untuk mencapai obyektivitas yang disebabkan perbedaan faham empirisme, positivisme, rasionalisme, relativisme.

Kali ini penyusun tidak akan membahas tentang perdebatan epistemologis dari aneka faham tersebut. Namun yang paling penting dari aneka macam metode keilmuan atau metode ilmiah dengan segenap akar-akar filosofisnya, secara umum dapat diperoleh titik temu. Sebagaimana dinyatakan oleh pendapat John Dewey dalam bukunya "How We Think" (Imam Barnadib, 1994) bahwa pada umumnya aneka macam disiplin ilmu menganut metode ilmiah yang memuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. The felt need (merasa ada masalah)

Semua penyelidikan atau pun penelitian ilmiah harus diawali adanya kesadaran akan suatu masalah. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan bahwa tidak setiap orang mampu menyadari tentang adanya masalah, atau pun juga ada masalah yang sama akan tetapi disadari secara berbeda. Maka adanya kesadaran tentang suatu masalah ini menjadi penting untuk melihat masalahnya dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. The problem (perumusan masalah)

Kesadaran akan adanya masalah kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan masalah secara cermat dan jelas. Perumusan masalah ini dilakukan agar tindakan penelitian lebih terfokus menuju pemecahan masalah.

3. The hypothesis (perumusan hipotesis).

Perumusan jawaban meskipun baru sebatas hipotesis atau dugaan yang masih bersifat teoritis adalah hal yang dilakukan setelah diperoleh rumusan masalahnya. Keberadaan hipotesis dapat mengarahkan peneliti agar dapat menggali dan memilih aneka macam data seperti apa yang harus dipilih.

4. Collecting of data as the evidence (pengumpulan data sebagai bukti hipotesis)

Dalam proses pengumpulan data untuk pembuktian hipotesis, seorang peneliti menghadapi banyak katagori data yang berbeda. Seperti kategori *primary resource* (sumber data primer), *secondary resource* (sumber data sekunder), dan *tertiary resource* (sumber data tertier). Jenis sumber data primer lebih diutamakan dalam suatu penelitian dibanding jenis sumber. Oleh karenanya dalam sebuah penelitian diseyogyakan peneliti selalu mencari sumber-sumber primer.

5. Concluding belief (penyimpulan hasil yang terpercaya)

Aneka data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan hipotesis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang terpercaya. Bila data-data yang terkumpul mendukung pernyataan hipotesis maka hipotesis diterima, sebaliknya bila sebagian kecil atau bahkan tidak ada data sama sekali yang mendukung pernyataan hipotesis maka hipotesis ditolak.

6. General values of the conclusion (penggalian nilai-nilai umum dari kesimpulan)

Kesimpulan yang telah diperoleh oleh peneliti dapat dilanjutkan dengan membuat prinsip-prinsip umum dari kesimpulan. Prinsip-prinsip umum tersebut itulah yang disebut nilai-nilai umum dari kesimpulan. Prinsip-prinsip umum ini dapat menjadi teori atau grand teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan terhadap fenomena lain yang serupa.

Mirip dengan pendapat sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey di atas, ahli lain bernama Donald Ary dkk. dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Research in Education* (Imam Barnadib, 1994) menyebutkan ada lima langkah dalam melaksanakan metode ilmiah, yaitu:

1. Pedefinisian masalah

Masalah perlu didefinisikan secara jelas dan lugas. Dalam metodologi penelitian mutakhir dikenal adanya definisi operasional terhadap variabel yang termasuk dalam rumusan masalahnya, sehingga masalah dapat benar-benar *clearly*.

2. Perumusan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan

Hipotesis berisi pernyataan yang di dalamnya memuat hubungan antar variable beserta indikator-indikatornya yang dapat diamati dan diukur, sehingga pernyataan tersebut dapat memberikan penjelasan atau jawaban atas masalah yang diteliti.

3. Penalaran deduktif

Dengan mendasarkan atas teori-teori yang ada serta hipotesis yang diajukan maka dapat dilakukan penalaran deduktif, yaitu membuat kesimpulan yang sifatnya rasional.

4. Pengumpulan data dan analisisnya

Pengumpulan sebanyak mungkin data yang dilanjutkan dengan upaya analisis atas data yang terkumpul, maka akhirnya dapat disimpulkan hasilnya.

5. Konfirmasi atau penolakan hipotesis

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data kemudian digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan, apakah diterima atau ditolak.

Metode ilmiah sebagaimana diuraikan langkah-langkahnya adalah dimaksudkan sebagai cara-cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dewasa ini telah berkembang pesat yang dikenal dengan metode penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah usaha yang secara

systematis mencari pemecahan terhadap problem-problem yang bagi manusia mengganggu (*plague*) dan menuntut pemikiran yang sungguh-sungguh. Dewasa ini ada banyak problem dalam kehidupan manusia yang menuntut pemecahan mendesak. lebih-lebih dalam penyelenggaraan pendidikan. Problem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dikemukakan Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo (1995), mencakup lima pokok, yaitu: (1) pemerataan pendidikan, (2) daya tampung pendidikan, (3) relevansi pendidikan, (4) kualitas pendidikan, dan (5) efisiensi dan efektifitas pendidikan.

Problem pemerataan pendidikan muncul karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Amanat dasar dari bunyi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memaksa kepada pemerintah untuk dapat menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada semua warga negara dengan tanpa ada diskriminasi. Minimal pemerintah harus bisa mengentaskan semua warganya untuk bisa mencapai tingkat pendidikan menengah di era awal milenium ketiga.

Lebih-lebih setelah dicanangkan pemberian kesempatan pendidikan seluas-luasnya pada Konferensi Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) di Thailand tahun 1990, semakin memberikan daya dorong bagi pemerintah untuk membuka layanan pendidikan kepada seluruh warganya agar bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Problem daya tampung pendidikan juga dimiliki bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1960-an ketika terjadi *baby boom* kemudian problemnya baru dirasakan pada tahun 1970-an sampai sekarang. Problem daya tampung adalah problem yang berkaitan dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang diimbangi dengan ketersediaannya jumlah sekolah yang ada. Sehingga tidak semua anak usia sekolah bisa ditampung masuk bangku sekolah.

Problem relevansi pendidikan dirasakan bangsa Indonesia ketika terjadi ketidak-cocokan atau ketidak-sesuaian antara isi pendidikan dengan realitas kebutuhan masyarakat. Problem relevansi ini antara lain ditandai dengan rendahnya *rate of return* lulusan sekolah. Dengan kata lain, para lulusan sekolah masih memiliki tingkat yang sangat rendah dalam hal adaptasi dengan tuntutan dunia kerja. Akibatnya banyak lulusan sekolah kita yang tidak dapat diserap oleh dunia kerja.

Untuk mengatasi problem relevansi, pada tahun 1990-an ketika Wardiman Joyohadikusumo selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pernah melakukan trobosan kebijakan yang dikenal dengan program "*link and match*". Namun karena program tersebut dilakukan lebih bersifat "*borrowing*" yaitu meminjam atau mengadopsi secara instan program dari negara lain untuk diterapkan di Indonesia, akibatnya kebijakan trobosan tersebut lebih banyak keagalannya daripada keberhasilannya.

Problem kualitas pendidikan juga tidak kalah ruwetnya dibanding problem yang disebut sebelumnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Indikator paling nyata dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya perolehan hasil ujian belajar siswa. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Badan penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan perolehan Nilai Ebtanas Murni (NEM) dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) siswa untuk semua jenjang sekolah masih tergolong rendah (Ace Suryadi dan HAR Tilaar, 1994).

Sedangkan *problem efisiensi dan efektifitas pendidikan* merupakan suatu problem yang memiliki cakupan sangat luas. *Efisiensi pendidikan* adalah tercapainya maksimalisasi tujuan pendidikan dengan pengorbanan yang minimal. Atau tercapainya tujuan pendidikan tanpa ada suatu pemborosan. Sedangkan *efektifitas pendidikan* adalah tercapainya tujuan pendidikan secara baik dan memadai. Dengan demikian apabila suatu pendidikan dapat berlangsung secara efisien dan efektif, berarti tujuan pendidikan dapat dicapai dengan bagus dan terlaksana tanpa adanya pengorbanan.

Metode penelitan ilmiah pada umumnya termasuk yang dikemukakan oleh John Dewey dan Donald Ary dkk (Imam Barnadib, 1994) menganut suatu logika berfikir yang berbunyi *Logiko Hipotetiko-Verifikatifi* atau Dedukto-hipotetiko-verifikatif. Yakni model logika berfikir dengan berpangkal pada penyusunan secara deduktif sebuah hipotesis dan berakhir dengan kesimpulan setelah ada pembuktian secara induktif dari hipotesis tersebut. Logika berfikir deduktif adalah suatu proses menalar yang menekankan pada kebenaran logis atas dasar prinsip-prinsip kebenaran umum yang sudah diyakini. Sedang logika berfikir induktif adalah suatu proses menalar yang menekankan pada bukti-bukti empirik yang berupa data dan fakta kasus-kasus spesifik yang dianggap valid.

Menurut Jujun S. Suriasumantri (1987), dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan perlu metode ilmiah yang berdasarkan pada tiga hal yaitu: (1) penyusunan kerangka berpikir berdasarkan logika deduktif, (2) pengajuan hipotesis sebagai kesimpulan dari kerangka berpikir, dan (3) verifikasi terhadap hipotesis.

Penyusunan kerangka berpikir berdasarkan logika deduktif, adalah suatu langkah dalam memahami fenomena masalah dengan cara menempatkannya dalam konteks alamiahnya yang saling terkait dengan aspek lain, sehingga ditemukan adanya hubungan logis secara kausal atau korelasional antara masalah yang menjadi fokus perhatian peneliti dengan aspek-aspek yang ada di sekeliling fokus masalah tersebut. Sedangkan pengajuan hipotesis sebagai kesimpulan dari kerangka berpikir, adalah suatu langkah diperolehnya alternatif jawaban logis deduktif atas fokus masalah yang menjadi perhatian peneliti setelah berteorisasi mengembangkan pemahaman pemikiran atas fokus masalah yang sedang diteliti. Adapun verifikasi terhadap hipotesis, adalah langkah mencocokkan alternatif jawaban yang diperoleh secara logis deduktif dengan fakta-fakta empirik.

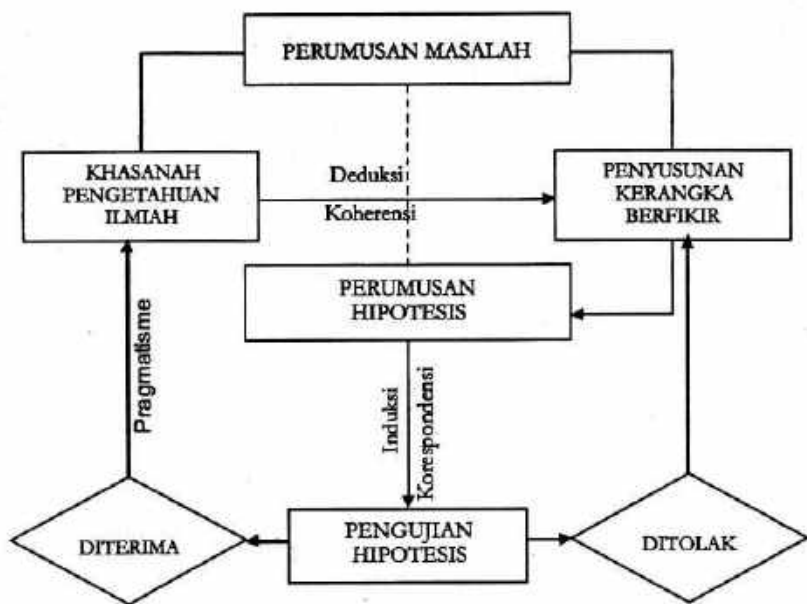
Secara teknis, seorang ilmuwan apabila melakukan pencarian pengetahuan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dilakukannya dengan cara merumuskan pertanyaan/masalah penelitian yang tepat, kemudian memformulasikan hipotesis yang jelas sehingga dapat diujikan (*testable*), dan kemudian memilih rancangan penelitian yang cocok dan dapat untuk diimplementasikan. Dengan mengikuti dan mentaati metode-metode ilmiah, para peneliti berharap mampu memperoleh penemuan yang sah (*valid*) dan dapat diandalkan (*reliable*), sehingga pada akhirnya akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan pendidikan.

Pertanyaan ilmiah dalam penelitian yang menganut logika berfikir *Logiko Hipotetiko-Verifikatifi* mendasarkan diri pada proses inferensi yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji berbagai proposisi melalui pemikiran reflektif. Pemikiran reflektif ini meliputi metode deduktif dan metode induksi, oleh karena itu para peneliti pendidikan dalam menemukan suatu teori dicapai melalui proses kombinasi induksi, deduksi, observasi, dan pengujian hipotesis dalam suatu kegiatan pemikiran reflektifnya.

Metode ilmiah dan pemikiran ilmiah didasarkan pada konsep, simbol yang merupakan serangkaian makna yang akan disebarkan pada orang lain. Para peneliti menggunakan konsep tingkatan yang lebih tinggi, yaitu konstruk untuk tujuan penjelasan ilmiah yang tidak secara langsung dapat diamati. Oleh karena itu definisi operasional sangatlah penting dalam suatu penelitian dalam menyajikan informasi empiris dan cara pengumpulan datanya sehingga penelitian sesuai dengan lingkup permasalahan yang dikehendaki oleh peneliti. Variabel yang digunakan untuk tujuan pengujian suatu pengukuran dapat diklasifikasikan sebagai variabel independen, dependen, ekstraneus, dan intervening (Shellyana junaedi, 2004).

Secara skematik model logika berfikir *Logiko Hipotetiko-Verifikatif* dapat diperjelas dengan gambar sebagai berikut.

Tampilan-5
Alur Fikir Pembuktian Hipotesis dalam Metode Ilmiah



(Sumber: Jujun Suria Sumantri, 1987)

Upaya mencapai pengetahuan ilmiah yang benar dengan menggunakan metode ilmiah (*scientific method*) di atas secara epistemologis adalah dalam rangka mengembangkan ilmu. Hal ini sesuai dengan apa

yang dinyatakan A.F. Chalmer (1983) bahwa ilmu itu adalah suatu aktivitas rasional yang beroperasi berdasarkan satu atau beberapa metode tertentu. Dengan demikian langkah-langkah metodologis tersebut pada akhirnya untuk memperkaya khasanah pengetahuan (*body of knowledge*) dari suatu disiplin ilmu yang di dalamnya termasuk ilmu pendidikan komparatif.

B. Fenomena Pendidikan sebagai Obyek Studi Pendidikan

Diketahui bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang telah berlangsung berabad-abad lamanya di masyarakat. Bahkan diyakini bahwa pendidikan telah berlangsung sejak manusia ada dalam rangka mengenal diri sendiri dan lingkungannya demi memajukan peradabannya menuju yang lebih baik. Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is just the matter of education* (Suparlan Suhartono, 2008). Oleh karenanya, keberadaan pendidikan tidak hanya menembus dimensi waktu tetapi juga dimensi tempat, sehingga para ahli menyebut penyelenggaraan pendidikan sebagai sesuatu yang bersifat *fundamental, universal, dan fenomenal*.

Bersifat *fundamental* karena pendidikan memiliki kedudukan yang diyakini sebagai salah satu instrumen utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumberdaya manusia (*human resource*) unggul bagi suatu bangsa. Sebaliknya, tanpa melalui pendidikan seorang anak diyakini tidak akan dapat menjadi manusia unggul sebagai sosok manusia utuh (*a fully functioning person*). Bersifat *universal* karena pendidikan telah dilakukan umat manusia dalam sejarahnya yang amat panjang, yakni sejak adanya manusia dalam dimensi waktu maupun tempat. Pada waktu kapan pun dan di mana pun pendidikan selalu saja diselenggarakan. Sedang bersifat *fenomenal* karena pendidikan terlihat selalu menggejala secara berubah-ubah penyelenggaraannya dari sisi orientasi, strategi, pendekatan, dan manajemen dari waktu ke waktu antar masyarakat satu dengan masyarakat lain, (Arif Rohman, 2009) .

Pendidikan dalam khasanah perundang-undangan di Indonesia memiliki beberapa dimensi, yaitu satuan, jalur, jenjang, dan jenis. *Satuan*

pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada pasal-1 disebutkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ki Hadjar Dewantara menyebut satuan pendidikan sebagai pusat-pusat penyelenggara pendidikan yang dikenal dengan istilah *trisentra pendidikan*. Yakni pusat-pusat di mana anak memperoleh pengalaman pendidikan yang beraneka ragam yakni di tiga tempat yang berbeda. Istilah *trisentra pendidikan* dari Ki Hadjar Dewantara tersebut kemudian dipakai oleh para ahli dengan nama *tripusat pendidikan*. Menurut Ki Hadjar Dewantara, tiga tempat anak memperoleh pengalaman pendidikan adalah: (1) Satuan pendidikan di sekolah, (2) satuan pendidikan di keluarga, dan (3) Satuan pendidikan di masyarakat

Satuan pendidikan di sekolah adalah salah satu satuan pendidikan jalur formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sekolah yang merupakan jenjang pendidikan dasar merupakan satuan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sekolah yang tergolong sebagai pendidikan formal dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan sekolah yang merupakan jenjang pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan sebelumnya, yang berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Ciri-ciri pendidikan sekolah dapat diidentifikasi antara lain adalah:

1. Penyelenggaraannya dilakukan secara formal baik dari segi kelembagaan, pengelolaan, maupun sistemnya.
2. Diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
3. Usia siswanya relatif homogen.
4. Lama pendidikan untuk SD, MI, dan sekolah lain yang sederajat adalah 6 tahun, lama pendidikan untuk SMP, MTs, dan sekolah lain yang sederajat adalah 3 tahun, lama pendidikan untuk SMA, SMK, MA, dan sekolah lain yang sederajat adalah 3 tahun.

5. Muatan isi kurikulumnya relatif sama untuk masing-masing jenjang dan jenis.
6. Guru-gurunya dipilih berdasarkan kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi keguruan yang dimilikinya.
7. Kegiatan kurikuler yang diselenggarakan berupa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
8. Metode mengajarnya diusahakan disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan jenis materi ingin disampaikan.
9. Ada evaluasi belajar yang dilakukan di awal, pertengahan dan akhir pembelajaran.
10. Pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Satuan pendidikan keluarga adalah salah satu satuan pendidikan jalur informal yang adanya secara alamiah, tidak diselenggarakan secara khusus, yang memberikan pengalaman belajar kepada anak sejak dalam kandungan, anak-anak, remaja sampai memasuki jenjang perkawinan. Satuan pendidikan keluarga diselenggarakan oleh ayah dan ibu anak selaku orang tuanya. Satuan keluarga pada jaman sekarang ini umumnya adalah keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Ada juga yang berupa keluarga luas (*extended family*) yang terdiri dari keluarga batih dan saudara lainnya misalnya paman, bibi, eyang, keponakan yang hidup dalam satu rumah.

Satuan pendidikan keluarga tergolong sebagai pendidikan informal yang menurut Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo (1995) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak diselenggarakan secara khusus
2. Tidak diprogram secara khusus
3. Tidak ada waktu belajar tertentu.
4. Tidak ada metode dan evaluasi yang sistematis.

Satuan pendidikan masyarakat adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berupa pendidikan nonformal seperti aneka program kursus, kejar paket, bimbingan keagamaan, dan pelatihan ketrampilan. Baru baru ini pendidikan masyarakat juga mencakup pendidikan anak usia dini. Contoh pendidikan masyarakat yang tertuang dalam Renstra pembangunan nasional tahun 2000-2004

adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang merupakan pendidikan luar sekolah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani pendidikannya pada jalur pendidikan sekolah. Pendidikan ini bertujuan: (1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Sedangkan *jalur pendidikan* adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada undang-undang pendidikan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya dikenal dua jalur pendidikan yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah; maka pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 jalur pendidikan meliputi tiga macam yaitu formal, nonformal, dan informal yang ketiganya saling melengkapi dan saling memperkaya satu sama lain.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini bukan termasuk pendidikan dasar tetapi termasuk pendidikan pra-sekolah yang bertugas mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ada dua jenis pendidikan anak usia dini, yaitu formal dan nonformal. Pendidikan anak usia dini jenis formal dilakukan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), sedang jenis nonformal dilakukan dalam bentuk Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Play Group (PG) atau yang lebih dikenal dengan Kelompok Bermain (KB)

Sedangkan *jenis pendidikan* adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Jenis pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. *Pendidikan kejuruan* merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pada Jenis formal, pendidikan umum antara lain berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan jenis kejuruan antara lain berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Jenis pendidikan juga mencakup pendidikan akademik dan profesi. *Pendidikan akademik* adalah jenis pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan *pendidikan profesi* merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Jenis pendidikan kedinasan juga termasuk jenis pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 disebutkan sebagai: "Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen". Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan: "Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Jenis pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Adapun *jenis pendidikan khusus* merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan *jenis pendidikan layanan khusus* merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berbeda dengan rumusan pembagian jenis pendidikan di atas, Philip H Coombs (1973) menyebutkan pembagian jenis pendidikan yang meliputi: formal, non-formal dan informal. Sanapiah Faisal (1991), pada *jenis pendidikan formal* umumnya ditandai dengan beberapa karakteristik antara lain: sudah terstandarisasi sedemikian rupa paling tidak dalam wujud legalitas formalnya, dalam jenjang-jenjangnya, lama belajarnya, paket kurikulumnya, persyaratan unsur-unsur pengelolannya, persyaratan usia dan tingkat kemampuan enrolmentnya, perolehan dan keberartian nilai dari kredensialnya, prosedur evaluasi hasil belajarnya, dan sekuensi penyajian materi dan latihan-latihannya. Dengan demikian pendidikan formal ini memiliki sejumlah persyaratan organisasi dan pengelolaan yang relatif ketat, lebih formalistis dan lebih terikat pad legalitas formal-administratif.

Sedangkan *jenis pendidikan non-formal* ditandai oleh paket pendidikannya berjangka pendek, setiap program pendidikannya merupakan suatu paket yang sangat spesifik dan biasanya lahir dari kebutuhan yang mendadak, persyaratan enrolmentnya lebih fleksibel baik dalam usia maupun tingkat kemampuan, persyaratan unsur-unsur pengelolanya juga lebih fleksibel, sekuensi materi pelajaran lebih luwes, tidak berjenjang kronologis, serta perolehan dan keberartian nilai kredensialnya tidak begitu terstandarisasi. Sehingga secara umum bisa dikatakan lebih lentur dan berjangka pendek.

Adapun jenis *pendidikan informal* memiliki ciri-ciri yang berbeda sama sekali dengan kedua jenis pendidikan di atas. Pendidikan jenis *informal* ini sama sekali tidak terorganisir secara struktural, tidak terdapat penjenjangan secara kronologis, tidak mengenal adanya kredensial, lebih merupakan pengalaman belajar individual-mandiri, pembelajarannya sangat natural tidak buatan sebagaimana pada pendidikan formal dan non-formal.

Ketiga jenis *pendidikan formal, non-formal* dan *informal* di atas beberapa ahli ada yang menunjuk kepada sekolah untuk jenis pendidikan formal, dan lembaga-lembaga kursus untuk jenis non-formal, sedangkan jenis pendidikan informal wujudnya adalah pendidikan keluarga.

Pada pendidikan formal, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pendidikan jenis ini merujuk pada pendidikan di sekolah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan dua jenis pendidikan yang lain, dimana pendidikan formal ini memiliki sejumlah persyaratan organisasi dan pengelolaan yang relatif ketat, lebih formalistis dan lebih terikat pada legalitas formal-administratif. Tentu saja kondisi yang terlalu ketat dan legal-formalistik itulah menjadikan jenis pendidikan ini menjadi banyak mengalami kendala.

Beberapa ahli seperti Ivan Illich, Everett Reimer, Paulo Friere dan Martin Cornoy telah mengkritik habis-habisan terhadap keberadaan pendidikan yang disebut 'sekolah' ini.

Ivan Illich (1972) misalnya, dalam salah satu bukunya *Deschooling Society* menyebutkan bahwa sekolah pada dasarnya telah gagal menjalankan misinya dan sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Sekolah dalam prakteknya sudah mengalami *infisibilitas*. Beliau menyatakan: *'Universal education through schooling is not feasible'*. Ada tiga kritik Illich yang dialamatkan ke sekolah:

Pertama, bahwa pendidikan sekolah secara empirik telah menghasilkan keluaran atau lulusan yang bersifat kontra-produktif (*Counter-productive*). Sekolah yang seyogyanya meluluskan keluaran yang rasional, kreatif, dan bermoral, justru banyak menghasilkan yang sebaliknya yaitu lulusan yang kurang rasional, apatis, dan terkadang amoral.

Kedua, bahwa dengan adanya sekolah, anak menjadi semakin terasing (*alienated*) dari lingkungan sekitarnya. Anak di sekolah telah

terkungkung dan terpenjara (*prisoned*) selama bejam-jam. Yang berarti mereka telah dilepaskan dari persoalan-persoalan kehidupan dan persoalan riil masyarakat.

Ketiga, bahwa dengan adanya sekolah anak-anak telah terpola dan mengidap mental kecanduan (*addictive*) terhadap ritualisme sekolah. Sekolah dianggapnya sebagai alternatif tunggal yang dapat menghantarkan kepadanya menuju kesuksesan hidup. Sehingga mereka akan merasa gagal dalam hidup bila gagal dalam memasuki sekolah.

Dari beberapa distorsi terhadap penyelenggaraan sekolah tersebut itulah Ivan Illich sudah tidak mengakui adanya sekolah dan mencita-citakan adanya masyarakat yang tanpa sekolah.

Ahli lain Everett Reimer dalam bukunya *School is dead* (1987) juga mengkritik terhadap sekolah. Menurutnya adanya sekolah telah menyebabkan pemborosan luar biasa pada keuangan negara. Antara apa yang dihasilkan sekolah dengan biaya yang dikeluarkan negara tidak sebanding. Adanya sekolah justru telah melahirkan mafia birokrasi yang mengurus sekolah. Oleh karenanya, ia menyarankan tidak perlu ada sekolah dan sekolah sudah tidak perlu diperbincangkan lagi karena sekolah dianggap sudah tidak ada lagi alias mati.

Sedangkan menurut Paulo Freire, adanya sekolah telah menyebabkan munculnya sebuah generasi yang tergantung. Dengan bersekolah anak-anak menjadi pasif, tergantung, dan kurang prakarsa, sehingga muncul kesadaran naif (*naïval conciousness*). Kesadaran jenis ini menurut Freire adalah bentuk kesadaran yang hanya bertindak kalau mendapat rangsangan eksternal terlebih dahulu. Sekolah seharusnya bisa membawa kepada peserta didik untuk memiliki kesadaran kritis (*critical conciousness*), (William A. Smith, 2001).

Adapun Martin Cornoy dalam bukunya *Education as cultural imperialism* yang menyebutkan pendidikan hanya sebatas sebagai alat struktur ekonomi dan politik, yaitu kepentingan pada klas dominan. Pendidikan semacam ini justru melahirkan generasi yang memiliki mentalitas penurut atau mentalitas robot yang selalu mengikuti kehendak dan perintah dari kaum kapitalis.

Dari beberapa kritik tersebut, ternyata bagaimanapun juga pendidikan formal (sekolah) sampai sekarang masih dianggap penting dan dipraktikkan di banyak negara. Kritik-kritik para ahli tersebut memang

penting sekedar untuk mengkritisi atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar bisa menjadi lebih baik dan meningkat namun bukan untuk meniadakannya.

Sedangkan untuk pelaksanaan *pendidikan non-formal* di beberapa negara khususnya di negara berkembang keberadaannya lebih banyak berorientasi mengentaskan angka buta huruf orang-orang dewasa. Menurut Philip H Coobs dan Ahmad Mansur (Suryati Sidharto, 1989) pelaksanaan pendidikan non-formal di beberapa negara berkembang meliputi :

1. Pendidikan dasar, yaitu pendidikan minimal yang harus dialami atau diperoleh setiap warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, untuk memilik ketrampilan dalam mengatasi kesulitan hidup, serta untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Program ini juga memberikan kesempatan kepada orang dewasa yang pernah mengenyam sekolah untuk belajar kembali

2. Pendidikan peningkatan keadaan keluarga.

Pendidikan jenis ini memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada para peserta yang umumnya orang dewasa yang meliputi pendidikan kesehatan, perbaikan gizi keluarga, kerumahtanggaan, keluarga berencana (KB), pembuatan dan perbaikan rumah, dan pemeliharaan anak.

3. Pendidikan peningkatan keadaan masyarakat.

Program pendidikan ini bertujuan agar para peserta nantinya dapat berperanserta secara penuh dalam organisasi masyarakat dimana mereka hidup. Program pendidikan ini meliputi kepemimpinan, manajemen organisasi, koperasi, dan pengkreditan perbankan.

4. Pendidikan untuk suatu jenis pekerjaan.

Program ini mencakup kegiatan pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan, seperti menjahit, benkel, montir, pertukangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain yang tujuannya agar para peserta dapat menekuni dan mengembangkan jenis pekerjaan praktis tertentu dalam rangka untuk hidup.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa Coombs dan Ahmad Mansur menempatkan pendidikan dasar sebagai salah satu bentuk pendidikan non-formal. Pendidikan dasar menurut Coombs dan Mansur lebih praktis

yang bertujuan pada tiga hal di atas yang disebabkan setiap warga negara harus memiliki kemampuan dasar yaitu membaca (*reading*), menulis (*writing*), dan berhitung (*arithmetic*), serta berkomunikasi dengan bahasa yang dipakai secara luas. Di bawah ini digambarkan keadaan angka buta huruf negara berkembang.

C. Prinsip-Prinsip Etika dalam Studi Pendidikan

Studi-studi ilmiah tentang pendidikan secara ideal dilakukan dengan berpedoman pada kode etik studi ilmiah. Kode etik ini pada umumnya difokuskan pada perlindungan terhadap partisipasi manusia dan penghormatan kepada norma sosial masyarakat dalam kegiatan studi ilmiah. Kode etik tersebut ditujukan untuk dapat memastikan dan memberikan jaminan agar tetap terjaganya hak-hak otonomi (*autonomy*), kesejahteraan (*beneficence*), dan keadilan (*justice*) baik bagi peneliti, bagi subyek atau responden yang diteliti, dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Ada empat prinsip etika dalam studi pendidikan. Menurut Ivan Malik, keempat prinsip etika tersebut meliputi hormat kepada orang lain, kesejahteraan, keadilan, dan kerahasiaan. Keempat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hormat kepada orang lain (*Respect for Others*)

Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam studi pendidikan harus memberikan penghormatan kepada orang lain, lebih-lebih mereka yang menjadi obyek studi. Prinsip etika ini bila dijabarkan akan mencakup tiga isu, yaitu (1) bahwa setiap individu harus diperlakukan secara manusiawi sebagai subyek yang otonom, (2) setiap individu yang kehilangan hak otonominya harus memperoleh perlindungan, dan (3) semua bentuk perlindungan kepada individu tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan kebebasan dia sebagai subyek. Pemakaian konsep otonomi dalam studi pendidikan mempunyai arti bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan apa yang ingin dilakukan dan apa yang tidak ingin dilakukan. Oleh karenanya, seorang pelaku studi tidak dapat memaksa untuk melibatkan individu dalam studinya. Misalnya memaksa individu sebagai responden atau subyek studi tanpa memberikan kebebasan untuk memilih bersedia atau tidaknya. Scandainya individu

tersebut tidak mempunyai hak otonomi dikarenakan kendala usia, cacat fisik, atau gangguan kesehatan, maka pelaku studi mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-haknya individu tersebut. Prinsip penghormatan kepada orang lain ini menjadi dasar bagi langkah pengamanan etika (*ethical safeguard*) yang utama dalam studi yang melibatkan manusia.

Meskipun telah banyak diupayakan pengamanan yang dibuat untuk mencegah terjadinya pemaksaan terhadap keikutsertaan individu di dalam studi pendidikan, namun realitasnya masih banyak terjadi aneka pemaksaan. Pemaksaan yang dimaksud umumnya dilaksanakan secara implisit atau tersamar. Contohnya adalah studi penelitian yang populasinya para siswa bolos sekolah, hal ini terjadi pemaksaan kepada mereka dengan berlindung di bawah ijin pejabat dinas, kepala sekolah, atau dewan guru. Bentuk pemaksaan umumnya terjadi abila responden berada dalam posisi yang lemah sebaliknya pelaku studi atau peneliti memiliki otoritas yang lebih kuat. Prinsip ini bukan berarti bahwa individu-individu yang rentan pemaksaan kemudian tidak diperbolehkan terlibat dalam studi pendidikan. Justru prinsip ini memungkinkan mereka untuk terlibat bila memang mereka menghendakinya.

Wujud dari kesediaan subyek atau responden untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti hendaknya melalui pernyataan kesediaan (*Consent*). Pernyataan kesediaan yang diterima dari subyek atau responden untuk terlibat dalam penelitian ini hendaknya mengandung tiga unsur:

- a. Adanya kemampuan (*competence*) subyek atau responden untuk mengikuti prosedur-prosedur yang akan dilakukan dan menentukan pilihan rasionalnya.
- b. Adanya pemahaman (*knowingness*) subyek atau responden terhadap butir pertama di atas.
- c. Adanya kesukarelaan (*voluntariness*) subyek atau responden yang dinyatakan secara sadar dan tertulis.

2. Kesejahteraan (*well-being*)

Prinsip kesejahteraan memberikan batasan bahwa pelaksanaan studi pendidikan tidak boleh merugikan partisipan, yakni responden

(penelitian kuantitatif) dan subyek (penelitian kualitatif). Sebaliknya segala kerugian dan ketidaknyaman yang secara potensial akan dirasakan ataupun dialami oleh partisipan tersebut harus segera diminimalisir. Oleh karenanya, semua penelitian lebih-lebih dalam studi pendidikan yang bertujuan mengembangkan khazanah pengetahuan ilmiah pendidikan, tidak boleh didapat dengan cara menyakiti, mengecewakan, bahkan membahayakan jiwa para partisipan.

Dalam penelitian pendidikan, tidak diseyogyakan anak dijadikan sebagai 'kelinci percobaan' dalam arti dijadikan sebagai obyek untuk eksperimen efektivitas suatu model yang memungkinkan berhasil atau gagal. Apabila eksperimen tersebut berhasil tentu akan bermanfaat bagi anak, tetapi apabila eksperimen tersebut gagal sudah barang tentu akan merugikan anak berupa cacat fisik, cacat mental, atau bahkan hilangnya nyawa anak. Hal ini mengandung dilema moral yang barangkali tidak ditemui dalam penelitian ilmu lain.

Untuk dapat memberikan rasio manfaat terhadap risiko (*benefit-to-risk ratio*) dalam suatu studi atau penelitian pendidikan, maka semua aspek dan alternatif dari penelitian itu sebaiknya harus kaji terlebih dahulu oleh suatu badan pengkaji institusional (*institutional review board*) yang dibentuk secara internal oleh lembaga asal para peneliti dengan tugas utama sebagai berikut.

- a. Memastikan keterandalan atau validitas dari asumsi-asumsi yang dipakai sebagai dasar penelitian
- b. Mengerti dan memahami secara jelas kemungkinan munculnya risiko.
- c. Memastikan bahwa kalkulasi yang dipakai oleh peneliti mengenai rasio manfaat terhadap risiko memang masih pada derajat yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis-ilmiah dan etis-humanis.

3. Keadilan (*Justice*)

Keadilan dalam suatu penelitian sangat diperlukan terutama berkaitan dengan proses pemilihan responden atau subyek penelitian. Responden atau subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian harus diperoleh oleh peneliti melalui mekanisme seleksi yang adil (*fair*).

Prinsip keadilan amat ditekankan mengingat setiap individu responden atau subyek penelitian hidup dan berasal dari konteks baik secara sosial, gender, ras atau etnis tertentu sehingga tidak terjadi bias dan diskriminasi.

Implementasi prinsip keadilan juga berkaitan dengan perlakuan peneliti terhadap responden atau subyek penelitian, yakni bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya ia diperlakukan. Penelitian komparasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu metode baru yang diujicobakan antara kelompok anak yang mendapat perlakuan dengan anak yang tidak mendapat perlakuan, mengandung sebuah dilema moral. Dilemanya adalah anak diperlakukan secara tidak adil dengan dipaksa menjadi anggota salah satu kelompok. Pertanyaannya adalah apakah anak tersebut dikelompokkan oleh peneliti secara sepihak atautkah mereka diminta untuk memilih masuk kelompok yang mana? Apabila pengelompokan anak dilakukan secara sepihak oleh peneliti, maka karakteristik dua kelompok tersebut akan dengan mudah disamakan oleh peneliti, tetapi apabila anak diminta secara sukarela memilih maka karakteristik kedua kelompok yang terbentuk akan berbeda sehingga menyulitkan peneliti untuk menguji metode baru tersebut.

Jalan tengah yang memungkinkan dapat menjadi solusi bagi peneliti atas dilema etika moral adalah dengan cara:

- a. Subyek atau responden supaya diberikan informasi secara jelas bahwa mereka terpilih menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diminta menjadi subyek penelitian atau responden, sehingga mereka dapat menentukan kesediaan atau tidak.
- b. Seyogyanya subyek atau responden dapat diyakinkan oleh peneliti bahwa mereka akan diperlakukan tertentu beserta hasil-hasil akan diperoleh dari proses penelitian.
- c. Subyek atau responden diberikan apresiasi dalam bentuk yang proporsional atas kesediaannya ikut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bentuk minimal dari apresiasi terhadap mereka adalah ucapan terima kasih.

4. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan ini memberikan perlindungan subyek atau responden dalam hal penggunaan semua informasi yang dianggapnya sebagai sesuatu yang bersifat rahasia. Biasanya peneliti tidak menyebutkan identitas subyek atau responden kepada publik dari laporan penelitiannya. Namun seandainya toh peneliti mencantumkan identitas subyek atau responden, biasanya disamarkan yaitu hanya berupa inisial semata. Hal tersebut dalam rangka menjaga kerahasiaan diri subyek atau responden dan memelihara kerahasiaan seluruh informasi dari mereka yang dilindungi secara hukum.

Oleh karenanya, pada diri peneliti harus menyadari konsekuensi yang mungkin muncul dari bocornya informasi rahasia, maka peneliti secara logis tidak boleh tidak atau harus memahami hukum dan peraturan yang berlaku untuk menghindari akibat hukum yang dapat menengsarakan dirinya.

Tampilan-6
Empat Prinsip Etika dalam Studi Pendidikan



D. Komparasi sebagai Alternatif Metode dalam Penelitian Pendidikan

Penelitian pendidikan bila dilihat dari segi tujuannya dibedakan menjadi empat (Suharsimi Arikunto, 2002), yaitu: (1) penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu; (2) penelitian *developmental* atau penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan mengadakan percobaan dan penyempurnaan; (3) penelitian *verifikatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengecek atau melihat kembali kebenaran hasil penelitian lain; (4) penelitian

kebijakan, yaitu penelitian yang bertujuan merencanakan dan mengukur efektivitas implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Ditinjau dari segi pendekatannya, penelitian pendidikan dibedakan menjadi delapan (Sukardi dkk, 2004), yaitu: (1) penelitian *survey*, yaitu penelitian yang umumnya dilakukan untuk membuat generalisasi dari suatu pengamatan terbatas menjadi kesimpulan yang berlaku umum bagi populasi. Penelitian ini dapat digunakan untuk tujuan deskriptif, eksplanatori, dan eksploratori. (2) Penelitian *Ex Post Facto*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui daya untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau yang diperkirakan sebagai penyebab bagi peristiwa yang diteliti. (3) Penelitian *experiment*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat antar variable dengan melakukan manipulasi melalui control langsung terhadap variable bebas. (4) Penelitian *kualitative*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya, sehingga pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam dan observasi secara berpartisipasi.

Penelitian dengan jenis pendekatan lain adalah: (5) penelitian *Content Analysis*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dalam bentuk dokumen lukisan, tarian, lagu, karya sastra, artikel, buku, undang-undang, surat keputusan, surat perjanjian, dan lain-lain. (6) *Action Research*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki pembahasan dalam sitausi tertentu dengan cara mengubah situasi, perilaku, atau organisasi termasuk struktur, mekanisme kerja, dan iklim kerja. (7) Penelitian *historis*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat merekonstruksi dan mengaktualisasikan kembali peristiwa dan perkembangan masyarakat yang terjadi pada masa lampau. (8) Penelitian *kebijakan*, yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dengan cakupan luas, yakni kebutuhan informasi untuk formulasi, impementasi, dan evaluasi kinerja kebijakan.

Adapun jenis penelitian pendidikan bila dilihat dari segi eksplanasinya, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) penelitian deskriptif, (2) penelitian asosiatif, dan (3) penelitian komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau

lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif banyak dilakukan oleh para peneliti pendidikan dengan cara membangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala/fenomena. Sedangkan penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel sebagai objek penelitian, antara subjek yang berbeda, atau waktu yang berbeda (Suharsimi Arikunto, 2002). Pada konteks pendidikan komparatif, penelitian jenis ketiga ini adalah jenis penelitian yang berusaha membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan.

Penelitian dengan jenis komparatif berusaha membandingkan dua sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar dua negara atau lebih. Peneliti penelitian ilmiah pada umumnya menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara fenomena, namun pada peneliti penelitian pendidikan komparatif melakukan pemeriksaan persamaan dan perbedaan antara fenomena atau kelompok fenomena. Peneliti penelitian pada umumnya berkomitmen untuk eksperimentasi sebagai suatu cara untuk membuat klasifikasi dan menguji teori, namun peneliti penelitian komparatif mengkaji fenomena variasi pendidikan pada banyak latar belakang (Val D. Rust, 2003)

Menurut Isaac Leon Kandel, penelitian komparasi pendidikan menfokuskan diri pada obyek penelitian berupa teori dan praktek pendidikan yang berlangsung di beberapa negara yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang (W. William Brickman, 1954). Penelitian tentang teori dan praktek penyelenggaraan pendidikan di beberapa tersebut dapat dibatasi pada dimensi kelembagaannya saja misalnya khusus pendidikan formal sekolah dasar, atau pada kurikulumnya saja, atau dapat juga pada tenaga kependidikan (guru).

D. Ringkasan

Dimensi epistemologis suatu disiplin ilmu adalah aspek metode atau cara dalam memperoleh pengetahuan ilmiah dan validitasnya beserta standar-standar dan dasar argumen dari standar-standar tersebut. Metode disiplin ilmu dikenal dengan metode ilmiah (*scientific method*). Menurut

John Dewey dalam bukunya *"How We Think"* (Imam Barnadib, 1994), metode ilmiah memuat enam langkah, yaitu: (1) *The felt need*, (2) *The problem*, (3) *The hypothesis*, (4) *Collecting of data as the evidence*, (5) *Concluding belief*, dan (6) *General values of the conclusion*. Metode ilmiah dewasa ini telah berkembang pesat menjadi metode penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah usaha yang secara sistematis mencari pemecahan terhadap problem-problem yang mengganggu (*plague*) manusia dan menuntut pemikiran sungguh-sungguh. Metode penelitian ilmiah menganut logika berfikir *Logika Hipotetiko-Verifikatif* atau Dedukto-hipotetiko-verifikatif. Yakni model logika berfikir dengan berpangkal pada penyusunan secara deduktif sebuah hipotesis dan berakhir dengan kesimpulan setelah ada pembuktian secara induktif dari hipotesis tersebut.

Penelitian terhadap penyelenggaraan pendidikan mencakup tiga jenis satuan penyelenggara pendidikan yang oleh Ki Hadjar Dewantara dikenal dengan istilah *trisentra pendidikan*, yaitu: (1) Satuan pendidikan di sekolah, (2) satuan pendidikan di keluarga, dan (3) Satuan pendidikan di masyarakat. *Jalur pendidikan* adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. *Jenjang pendidikan* adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. *Jenis pendidikan* adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Kritik terhadap pendidikan formal di sekolah telah diberikan oleh beberapa ahli seperti Ivan Illich, Everett Reimer, Paulo Friere dan Martin Cornoy. Namun masih banyak ahli yang menyakini pentingnya sekolah bagi pengembangan segenap potensi manusiawi. Sedangkan pendidikan nonformal di negara-negara berkembang pelaksanaannya lebih banyak berorientasi pada pengentasan angka buta huruf orang dewasa. Pelaksanaan pendidikan non-formal di negara berkembang meliputi: (1) pendidikan dasar, (2) pendidikan peningkatan keadaan keluarga, (3) pendidikan peningkatan keadaan masyarakat, (4) pendidikan untuk suatu jenis pekerjaan,

Studi ilmiah tentang pendidikan secara ideal dilakukan dengan berpedoman pada kode etik. Ada empat prinsip etika dalam studi pendidikan, yaitu: (1). Hormat kepada orang lain (*Respect for Others*), (2)

kesejahteraan (*well-being*), (3) keadilan (*justice*), dan (4) kerahasiaan (*confidentiality*).

Penelitian pendidikan bila dibedakan menurut tujuannya meliputi: penelitian eksploratif, penelitian *developmental* atau penelitian pengembangan, penelitian *verifikatif*, dan penelitian kebijakan. Ditinjau dari segi pendekatannya, penelitian pendidikan dibedakan: penelitian *survey*, penelitian *Ex Post Facto*, penelitian *experiment*, penelitian *kualitative*, penelitian *Content Analysis*, *action Research*, penelitian *historis*, dan penelitian *kebijakan*. Ditinjau dari eksplanasinya penelitian pendidikan dibedakan menjadi: penelitian deskriptif, penelitian asosiatif, dan penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel sebagai objek penelitian, antara subjek yang berbeda, atau waktu yang berbeda. Berusaha membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan HAR Tilaar. 1994 *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* Bandung: Rosda Karya.
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta Laksbang Mediatama.
- Brickman, W. William Brickman. 1954. *Introduction to the Foundations of Comparative Education*. New York: School of Education NYU.
- Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo. 1995. 1995. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.
- Chalmers, A.F. 1983. *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?: Suatu Penilaian Tentang Watak dan Status Ilmu serta Metodenya*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Coombs, Philip H. 1973. *Non-formal Education for Rural Development*. United State of America.
- Imam Barnadib. 1994. *Pendidikan Perbandingan: Buku-1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Illich, Ivan. 1972. *Deschooling Society*. New York: Harrow Books.

- Ivan Malik. (tahun tidak diketahui). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana (UMB). (<http://pksm.mercubuana.ac.id/modul/download> tanggal 12 Agustus 2008)
- Jujun S. Suriasumantri. 1987. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Ganesha.
- Noeng Muhadjir. 1996. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi III)*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Postlethwaite, T. Neville. 1988. *The Encyclopedia of Comparative Education and National Systems of Education*. New York: Pergamon Press.
- Reimer, Everett. 1987. *School Is Dead: An Essay on Alternatives in Education*. Telah diterjemahkan M. Soedomo. *Sekitar Eksistensi Sekolah*. Yogyakarta: Hanindita.
- Rust, Val D. 2003. *Method and Methodology in Comparative Education*, termuat dalam jurnal *Comparative Education review*. Chicago Vol. 47 Edition 3, Aug 2003.
- Sanapiah Faisal. 1991. *Pendidikan Luar Sekolah*. Surabaya (nama penerbit tidak terlacak).
- Shellyana junaedi, 2004. *Dilema Riset Keprilakuan Teori Organisasi sebagai Ilmu Sosial dengan Menggunakan Model Ilmu Natural*. Majalah Ekonomi bidang Ilmu Ekonomi, manajemen, dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unair Surabaya Volume 14 nomor 1 Tahun 2004.
- Smith, William A. 2001. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi dkk. 2004. *Pedoman Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suparlan Suhartono. 2008. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Suryati Sidharto. 1989. *Pendidikan di Negara Berkembang Suatu Tinjauan Komparatif*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Ditjend Dikti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

BAB V

METODE KOMPARASI PENDIDIKAN

Setelah mencermati dan mengkaji secara seksama isi paparan pada bab kelima ini, maka Anda akan dapat:

1. Memahami Sendi-Sendi dalam Komparasi Pendidikan.
2. Mengetahui Metode-Metode Studi dalam Komparasi Pendidikan
3. Menjelaskan Pengembangan Metode dalam Melakukan Komparasi Pendidikan

A. Sendi-Sendi dalam Komparasi Pendidikan

Perkembangan studi pendidikan komparatif yang sudah berlangsung lama menunjukkan corak perkembangan yang berbeda. Perkembangan corak tersebut terjadi dimulai dari yang semula lebih bersifat praktis (*practical studies*) kemudian lambat laun menjadi lebih bersifat keilmuan (*scientific studies*) dengan menekankan penggunaan metode ilmiah (*scientific method*).

Para ahli antara lain seperti John Griscom, Victor Cousin, Horace Mann, dan Matthew Arnold adalah tokoh-tokoh studi pendidikan perbandingan yang lebih bercorak kepraktisan. Dalam arti bahwa mereka mempelajari sistem pendidikan di negara lain untuk dapat diterapkan di negaranya sendiri. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada awal perkembangannya belum terpikirkan untuk menjadikan studi pendidikan komparatif menjadi sebuah disiplin ilmu yang baku. Baru kemudian muncul pemikiran upaya menjadikan studi ini menjadi suatu ilmu dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Antara lain tokoh-tokoh seperti: I.L. Kandel, George ZF. Bereday, Gail F. Kelly, Harold Noah, Nicholas Hans, dan lain-lain.

1. Tiga Tahap Komparasi dalam Pendidikan

Sejalan dengan perkembangan ilmu pendidikan komparatif ini, usaha-usaha memperbaiki sistem pendidikan di suatu negara dalam sejarahnya mengalami tiga tahap perkembangan. Tahap pertama disebut *Borrowing*, kemudian berkembang menuju tahap *predicting* yang kemudian menjadi tahap *Analyzing*.

Pada tahap awal yaitu '*Borrowing*', terjadi pada awal kemunculan pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmiah yakni awal abad 19 sampai awal abad 20 masehi. Yaitu dimulai tahun 1817 sejak dirintis oleh Antoine Julien de Paris sampai tahun 1930-an, para ahli memulai mengembangkan studi pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu secara sistematis. Pada tahap ini suatu negara dalam membangun dan memperbaiki sistem pendidikannya dilakukan dengan cara melihat sistem pendidikan negara lain yang dianggapnya lebih baik, kemudian diadopsi untuk diterapkan di negaranya sendiri. Salah satu sistem pendidikan yang dianggap baik pada saat itu adalah yang terjadi di negara Prusia. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh para ahli pada saat itu, seperti pernah dilakukan oleh Matthew Arnold di Inggris, Victor Cousin di Perancis, Leo Tolstoy dan KD. Ushinsky di Rusia, Domingo Sarmineto di Argentina, Horace Mann dan Henry Barnard di Amerika (George ZF. Bereday, 1964).

Model pengembangan semacam ini ternyata tidak meski baik bahkan banyak yang mengalami kegagalan. Mengingat masing-masing negara memiliki latarbelakang dan konteks sosio-kultural yang berbeda, sehingga apa yang dianggap baik di tempat lain tidak mesti baik diterapkan di tempat sendiri. Sebagaimana dikatakan Durkheim bahwa "*tidak ada satu tipe ideal pendidikan bagi semua manusia. Karena pendidikan sangat berkait erat dengan keadaan sosio-kultural masyarakatnya*".

Pada tahap kedua adalah '*Predicting*' yang berlangsung dari tahun 1930-an sampai tahun 1960-an. Pada tahap ini usaha-usaha perbaikan pendidikan tidak lagi dilakukan secara mentah-mentah mengadopsi apa yang baik di negara lain. Usaha-usaha perbaikan pendidikan di negaranya dilakukan dengan dibarengi usaha mempertimbangkan masak-masak tentang kemungkinan keberhasilan dan kegagalannya. Pada tahap prediksi ini, beberapa negara yang melakukan perbaikan pendidikan melakukan beberapa langkah

tahapan yang berkesinambungan yang dapat disingkat dengan AWINETA:

a. *Awareness* (kesadaran)

Pada tahap ini yang paling awal adalah adanya kesadaran pada suatu bangsa atau negara bahwa sistem pendidikan di tempatnya mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran bila dibandingkan dengan di negara-negara lain.

b. *Interest* (keinginan)

Setelah menyadari adanya kekurangan dan kelemahan bahkan kemunduran sistem pendidikan di tempatnya, maka negara tersebut muncul keinginan untuk memperbaiki agar bisa maju seperti sistem pendidikan di tempat-tempat lain bahkan kalau perlu bisa lebih baik dari yang lain.

c. *Evaluation* (evaluasi).

Pada tahap ini yang dilakukan oleh beberapa negara adalah dengan cara mencermati aneka teori dan praktek pendidikan yang ideal untuk bisa diterapkan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan di negaranya serta melihat keberhasilan-keberhasilan negara lain dalam membangun pendidikan.

d. *Trial* (uji coba)

Hasil-hasil dari upaya evaluasi terhadap aneka konsep perbaikan yang ideal serta hasil pengkajian dari keberhasilan di negara lain selanjutnya diujicobakan di beberapa lokasi untuk bisa dilihat tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

e. *Adoption* (peniruan untuk diterapkan)

Setelah diketahuai dengan pasti akan keberhasilannya dengan mantap dari uji coba tersebut, baru kemudian diadopsi untuk diterapkan diseluruh wilayah negaranya.

Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh para ahli pendidikan komparatif pada abad 20 yaitu Frederich Schneider dan Franz Hilker di Jerman, Isaac Leon Kandel dan Robert Ulich di Amerika, Nicholas Hans dan Joseph Lauwerys di Inggris, Pedro Rosello di Switzerland, (George ZF. Bereday, 1964).

Tahap ketiga adalah '*Analyzing*' yaitu berlangsung dari tahun 1960-an sampai 1990-an. Pada tahap ini kegiatan perbaikan pendidikan dan upaya membandingkan sistem-sistem pendidikan

dilakukan dengan cara mengamati pula keadaan pendidikan dari berbagai latar belakang historis, politis, ekonomis, dan sosio-kulturalnya. Misalnya mengenai mengapa di Thailand pendidikan non-formal lebih berhasil bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini diperlukan upaya penganalisisan yang cermat terhadap aneka latarbelakang pendidikan di negara Thailand seperti latarbelakang ideologis, kebijakan-kebijakan politik dan keadaan sosiologis masyarakat Thailand. Upaya penganalisisan ini lebih mendasarkan diri pada penggunaan metode ilmiah.

2. Syarat Komparabilitas

Secara umum di dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal adanya syarat kesebandingan (*comparability*) di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatannya yang tinggi. Bila ada seseorang yang melakukan upaya membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan Amerika Serikat, jelas tidak akan mendapatkan banyak kemanfaatan, mengingat kedua negara sudah jelas-jelas banyak perbedaan. Jika ini tetap dilakukan, meskipun nantinya mampu menghasilkan banyak rekomendasi dari studi perbandingan tersebut, toh pada akhirnya tidak akan banyak yang dapat diterapkan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

Hal tersebut berbeda bila studi perbandingan pendidikan tadi dilakukan dengan cara membandingkan antara pendidikan di Indonesia dan Malaysia, yang sudah barang tentu terdapat banyak kemiripan serta relatif sedikit perbedaan. Upaya perbandingan ini juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan sistem pendidikan Malaysia dengan Thailand, Philipina dengan Vietnam, Thailand dengan Philipina dan sebagainya. Studi perbandingan semacam ini jelas akan memenuhi syarat komparabilitas.

Diantara segi-segi kesebandingan atau komparabilitas dalam melakukan studi komparasi sistem pendidikan antar dua negara atau lebih yang berbeda adalah:

1. Segi kemajuan pembangunan, yaitu beberapa negara yang akan diperbandingkan adalah sama-sama negara maju/ kaya atau sama-sama negara berkembang/ miskin.
2. Segi latar belakang sejarah, misalnya sama-sama negara bekas jajahan. Lebih pas lagi kalau negara-negara yang diperbandingkan adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh negara yang sama, misalnya Malaysia dan Philipina yang sama-sama pernah dijajah oleh Inggris.
3. Segi latar belakang ekonominya, misalnya sama-sama berpendapatan per kapita rendah atau sama-sama negara yang masih mengandalkan hasil pertanian, sama-sama negara penerima pinjaman luar negeri dari donor (IMF, World Bank, ADB), dan lain sebagainya.
4. Segi letak geografisnya, misalnya sama-sama negara yang terletak di kawasan ASEAN, atau sama-sama negara Afrika Barat, atau juga sama-sama negara di belahan selatan.

Dari beberapa segi kesebandingan di atas, menurut para ahli jelas akan lebih layak untuk diperbandingkan dan akan banyak memperoleh kebermanfaatannya. Akan sangat sulit bila seseorang memperbandingkan dua sistem pendidikan di dua negara yang memiliki latar belakang kultural, sosial, politik, dan ekonomi yang secara mencolok berbeda; disamping yang sudah jelas tidak akan banyak memperoleh kebermanfaatannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Alan Wagner bahwa akan sangat sulit manakala menerapkan sebuah sistem persekolahan untuk diterapkan ke negara lain dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek budaya, adat istiadat, politik, dan lain-lain.

Disamping hal yang telah diuraikan di atas, ada satu hal penting lagi dalam studi perbandingan dan upaya membandingkan dua sistem pendidikan antar dua atau lebih negara yang berbeda, yaitu dua dimensi yang perlu ditentukan: *dimensi ruang* dan *dimensi waktu*. Dimensi ruang menyangkut seberapa luas atau banyak negara yang ingin diteliti atau diperbandingkan. Sedangkan dimensi waktu menyangkut periode waktu atau rentang waktu yang perlu ditentukan terlebih dahulu. Misalnya waktu satu dekade terakhir (1991-2000), atau sejak tahun 1945 sampai sekarang. Penentuan dimensi ruang dan dimensi waktu

ini penting supaya studi perbandingan bisa lebih terfokus dan tidak mengimbas kemana-mana.

B. Metode-Metode Studi dalam Komparasi Pendidikan

Sebagaimana ilmu-ilmu lain, ilmu pendidikan komparatif memiliki banyak kemungkinan metodologi yang dapat digunakan untuk keperluan studi ini. Menurut Debold Van Dalen dalam *"Understanding Educational Research"* (Chalidjah Hasan, 1995) menyebutkan metode ilmiah yang lazim digunakan dalam studi-studi pendidikan komparatif adalah: (1) historis, (2) deskriptif, (3) eksperimen, dan (4) filosofis.

1. Metode historis

Metode historis ini digunakan dalam rangka untuk menemukan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi pendidikan sekarang sehingga dapat untuk memaknakan pendidikan sekarang bahkan juga untuk yang akan datang.

Jalan yang ditempuh oleh metode historis ini adalah:

- a. Memilih problem yang akan diteliti
- b. Mengumpulkan sumber-sumber bahan (*sources materials*)
- c. Penilaian dan pengujian sumber-sumber data yang terkumpul, yang dilanjutkan dengan penyajian.
- d. Menentukan hipotesis untuk menjelaskan hakekat dari fenomena-fenomena pendidikan yang sudah lampau
- e. Melakukan penafsiran atas bahan-bahan yang telah terkumpul secara mendalam atau juga penyusunan bahan-bahan
- f. Menyimpulkan dan membuat laporan mengenai temuan-temuannya.

Metode historis ini misalnya digunakan untuk mengungkap fenomena pendidikan Indoneis pada era kolonial terutama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan dalam menanamkan nasionalisme Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat I.L. Kandel bahwa *"pendidikan perbandingan itu mempelajari pendidikan pada waktu sekarang dengan mengingat latar belakang historisnya"*.

Sumber bahan yang paling dekat dalam penelitian dengan metode historis adalah dokumen-dokumen, antara lain seperti:

- a. Peninggalan material: fosil, piramida, senjata, perkakas rumah tangga, perhiasan, bangunan, benda-benda budaya
 - b. Peninggalan tertulis: papyrus, daun (lontar) bertulis, kronik, relief candi, catatan kasus, buku harian, arsip negara, dan lain-lain
 - c. Peninggalan tak tertulis: adat istiadat, bahasa, dongeng, dan kepercayaan
- (Hasan, 1995).

2. Metode deskriptif

Metode deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada obyek yang diteliti secara mendetail. Metode penelitian jenis deskriptif ini bisa mencakup beberapa metode, antara lain adalah: (1) studi kasus, (2) survey, (3) studi perkembangan, (4) studi tindak lanjut, (5) analisis dokumen, (6) studi korelasi, dan (7) studi aliran atau trend.

Metode deskriptif dalam pendidikan komparatif adalah bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta-fakta pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Bisa menyangkut sistem pendidikan secara umum maupun menyangkut bagian per bagian dalam sistem pendidikan, misalnya: kurikulumnya, kelembagaannya, kondisi siswanya, tenaga kependidikannya, pendanaannya, dan lain-lain.

3. Metode eksperimen

Metode eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah yang dilakukan dengan cara menspesifikasikan obyek yang diteliti melalui tindakan mengeliminasi variabel-variabel yang ada dari variabel lain. Dengan kata lain metode eksperimen ini dilakukan dengan cara mendudukan obyek penelitian yang spesifik dalam suatu totalitas yang terkontrol.

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode eksperimen ini adalah untuk menentukan apa yang dapat terjadi dari percobaan-percobaan yang dilakukan.

4. Metode filosofis

Berfikir filosofis adalah tindakan berfikir yang mendasar, sistematis, dan universal. Dalam hal ini metode filosofis berusaha menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang mendasar tentang sistem pendidikan di suatu negara atau beberapa negara. Misalnya tentang ideologi pendidikan suatu negara, tentang konsep manusia yang dicita-citakan melalui praktek pendidikan di suatu negara, dan lain-lain. Dengan metode filosofis ini, akan dapat ditemukan sekaligus difahami aneka sistem dan praktek pendidikan secara mendalam dan menyeluruh beserta alasan dan pertimbangan rasionalnya.

Aneka metode yang dikemukakan oleh Debold Van Dalen di atas masih belum lengkap, yakni belum mengemukakan metode lain yaitu metode *ex post facto*. Donald Ary dan kawan-kawan dalam *"Introduction to Research in Education"* (1985), menyebutkan metode ilmiah dalam studi-studi pendidikan komparatif adalah: (1) eksperimental, (2) *Ex post facto*, (3) deskriptif, dan (4) Historis.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa metode ilmiah yang berjenis eksperimental dilakukan dengan jalan menspesifikasikan obyek penelitiannya melalui pengeliminasian variabel-variabel dari obyek yang dikaji terhadap variabel atau faktor lain. Dengan kata lain metode eksperimental ini dilakukan dengan cara mendudukan obyek penelitian yang spesifik dalam suatu totalitas yang terkontrol. Metode ini bertujuan menentukan apa yang dapat terjadi dari percobaan-percobaan yang dilakukan. Misalnya: pengaruh peningkatan pendanaan terhadap peningkatan mutu sekolah; pengaruh penggunaan metode tugas terhadap peningkatan prestasi belajar anak.

Metode ilmiah yang berjenis *ex post facto* dilakukan dengan cara melihat obyek spesifik yang diteliti yang sudah dieliminasi dari variabel atau faktor lain tetapi tidak melalui percobaan-percobaan yang dilakukan peneliti, akan tetapi melalui kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masyarakat. Jenis penelitian *ex post facto* ini sebenarnya sama dengan jenis penelitian eksperimental, cuma pada *ex post facto* obyek kejadiannya sudah terjadi. Sedangkan pada eksperimental kejadiannya dirancang dan direkayasa oleh peneliti sendiri.

Sedangkan metode deskriptif adalah metode pendidikan komparatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada obyek penelitian secara mendetail. Metode penelitian jenis deskriptif ini bisa mencakup beberapa metode, antara lain adalah: (1) studi kasus, (2) survey, (3) studi perkembangan, (4) studi tindak lanjut, (5) analisis dokumen, (6) studi korelasi, dan (7) studi aliran atau trend.

Adapun metode historis adalah metode yang dilakukan dengan jalan menerangkan apa yang sudah terjadi. Metode ini memiliki kesamaan dengan metode *ex post facto* dalam hal obyek yang dikaji adalah suatu yang telah terjadi. Bedanya, kalau pada *ex post facto* variabel-variabel yang diteliti dipisahkan dengan konteksnya yang luas. Misalnya hanya melihat Kurikulum Pendidikan Tamansiswa (variabel X) dengan sikap patriotisme anak (variabel Y) pada masa lampau. Sedangkan pada metode historis, tidak kaku hanya dibatasi oleh dua atau tiga variabel saja tetapi bisa menyangkut banyak variabel yang dilihat secara holistik. Misalnya penelitian tentang pendidikan di Indonesia jaman Jepang, Pendidikan di Malaysia pada abad 18, sejarah pendidikan pesantren di Indonesia, dan sebagainya.

Menurut Imam Barnadib (1994) yang mengutip pendapat George ZF. Bereday, ada dua metode yang digunakan dalam studi perbandingan, yaitu: metode area dan metode komparasi.

5. Metode Area

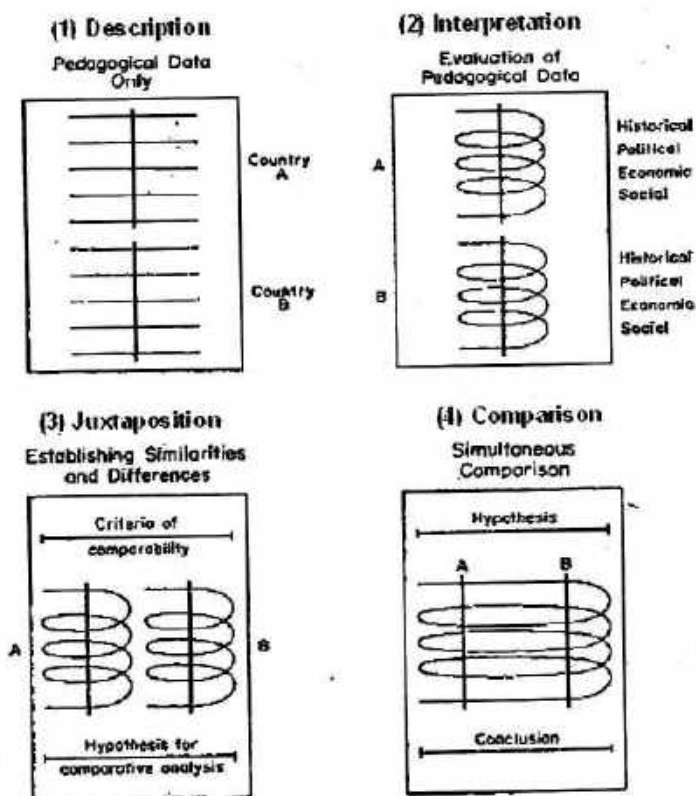
Metode area, dapat dilakukan pada satu desa (*village*) atau propinsi (*province*) atau kawasan (*continent*) tertentu bahkan dapat lebih luas lagi yaitu negara. Studi area dilakukan dengan cara: (a) studi latarbelakang negara, (b) deskripsi sistem pendidikan pada masing-masing negara tersebut, dan (c) menarik interpretasi.

6. Metode Komparasi

Metode komparasi, yaitu metode yang dilakukan dengan area wliayah yang lebih sempit, misalnya hanya dua desa atau propinsi atau kawasan atau negara tetapi dengan tekanan pada studi yang lebih mendalam. Secara garis besar metode komparasi dilakukan dengan empat ciri penting, yaitu: (a) deskripsi data pendidikan, (b) interpretasi,

(c) Juxtaposisi, dan (d) komparasi, (George ZF. Bereday, 1964). Berikut ini digambarkan empat poin penting dalam studi pendidikan dengan metode komparasi.

Tampilan-7
Empat Poin Penting dalam Metode Komparasi Pendidikan



Baik empat metode yang diungkapkan Debold Van Dalen dan Donald Ary maupun dua metode yang diungkapkan oleh George ZF. Bereday (Imam Barnadib, 1994) tersebut di atas adalah yang lazim digunakan dalam beberapa studi penelitian pendidikan perbandingan. Namun demikian, sekarang ini tentu dalam studi-studi pendidikan perbandingan telah banyak perkembangan metodologinya. Misalnya pada awal 1990-an di Amerika dan beberapa negara Eropa termasuk Inggris telah mengembangkan paradigma, pendekatan, metode penelitian dalam pendidikan, dan studi pendidikan perbandingan.

Kasus di negara Inggris dapat diambil pelajaran, ketika telah diberlakukannya Kurikulum Nasional pada tahun 1989 selanjutnya terjadi pergeseran-pergeseran dalam paradigma, pendekatan, dan metode penelitian pendidikan. Dilihat dari paradigma penelitiannya, penelitian di Inggris sudah tidak lagi menggunakan paradigma "process-product" yaitu peneliti hanya mengutamakan perilaku guru, kemudian dampaknya terhadap prestasi belajar siswa. Oleh karenanya paradigma "process product" dianggap lemah dalam konseptualisasi baik dalam arti proses dan produk itu sendiri, metode, maupun produktifitasnya.

Atas dasar kondisi tersebut di atas, maka paradigma yang dipakai di sana adalah paradigma yang lebih menekankan sisi komprehensif dan holistik. Misalnya dalam melihat keberhasilan belajar siswa tidak saja memfokuskan dari sisi proses dan produknya saja secara sempit, akan tetapi lebih luas lagi yakni yang menyangkut aspek-aspek atau unsur-unsur pendidikan di sekolah dalam arti luas yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Misalnya penelitian Mortimor (1988) yang berjudul "School Matters: The Junior Years" yang meneliti proses pendidikan dengan mengamati variabel-variabel pendidikan, yaitu:

1 Karakteristik siswa

Karakteristik siswa dapat dirinci ke dalam beberapa hal seperti: usia, jenis kelamin, status ekonomi sosial (SES), ras, etnis, agama, hobi, dan lain-lain.

2 Hasil pendidikan

Hasil pendidikan tidaklah tunggal akan tetapi beragam mencakup beberapa aspek pengembangan potensi diri siswa, yaitu aspek kognitif dan aspek non-kognitif.

3 Lingkungan kelas dan sekolah

- a. Kebijakan dan organisasi sekolah.
- b. Strategi pembelajaran guru.
- c. Pandangan dari keluarga terhadap sekolah.
- d. Kehidupan sekolah.

Dari keseluruhan variabel-variabel yang diteliti tersebut, dianalisis dan diperoleh suatu kesimpulan tentang sekolah yang efektif. Dalam kesimpulannya, sekolah efektif adalah sekolah yang dapat menjamin perkembangan siswa lebih jauh daripada yang diharapkan dengan mempertimbangkan masukannya (*intake*). Sekolah efektif selalu membuat kemajuan kepada semua kelompok siswa secara agregatif. Sebaliknya sekolah yang tidak efektif adalah sekolah yang hanya dapat memajukan sebagian kelompok siswa tertentu, sedangkan kelompok siswa yang tergolong "*disadvantaged group*" kurang diuntungkan.

Kecenderungan di Inggris dalam penelitian ini adalah "*colaborative research*" melalui "*collaboration action research*". Sedangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an juga ada trend baru yaitu program "*Accelerated School at Risk Student*" yaitu program yang dirancang untuk membawa siswa ke jalur utama pendidikan (*Educational Mainstream*) yakni sekolah dan mendorongnya untuk mampu secara akademik, serta bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi (*secondary school*).

C. Pengembangan Metode dalam Melakukan Komparasi Pendidikan

Keragaman metode yang dipakai dalam melakukan studi komparasi pendidikan telah mendorong beberapa ahli untuk mengembangkan satu metode yang secara relatif lebih spesifik dapat digunakan lebih efektif untuk melakukan studi komparasi pendidikan. Beberapa metode sebagaimana telah disebutkan memiliki kelebihan yang beragam sekaligus kelemahannya. Untuk itu George ZF. Bereday (1964) sebagai professor di bidang Pendidikan Komparatif dari *Colombia University* Amerika Serikat mengembangkan satu metode yang disebut dengan *Metode Induktif Komparasi*. Metode ini menurut George ZF. Bereday (1964) memiliki langkah-langkah prosedural yang meliputi:

1. Penggalan data

Penggalan data yang baik adalah dengan cara datang ke lokasi penelitian lalu berdiam atau tinggal beberapa waktu di lokasi tersebut agar bisa merekam lebih lengkap data yang dicarai. Untuk mempertajam kepekaan atas data, maka peneliti perlu menguasai

bahan dan fokus yang diamati. Hal yang lebih penting lagi adalah peneliti perlu waspada dan bisa membatasi bias yang mungkin terjadi.

2. Deskripsi data

Pendeskripsian data dilakukan dengan cara menyajikan semua data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok data berdasarkan klasifikasi yang dibuat dalam bentuk tabel, teks atau uraian, serta peta.

3. Interpretasi

Setelah data-data disajikan menurut pengelompokannya maka peneliti perlu melakukan langkah selanjutnya yakni interpretasi atau penafsiran atas data yang telah tersaji. Upaya penafsiran data ini dilakukan dengan cara melakukan analisis konteks, baik analisis aspek historik, aspek politik, aspek ekonomik, maupun aspek sosial. Dalam arti bahwa mengkaitkan data-data yang ada dengan konteks masyarakat yang berupa informasi historik, politik, ekonomik, dan sosial. Contoh informasi historik adalah isi catatan masa lalu bangsa tersebut yang antara lain pernah dijajah oleh bangsa Eropa; pernah berjuang merebut kemerdekaannya dengan pengorbanan harta, benda, dan nyawa yang tidak sedikit; masyarakatnya pernah terkotak-kotak terbagi menjadi beberapa bagian yang saling bertikai kemudian bersatu menjadi negara kesatuan; dan lain-lain.

4. Juxtaposisi atau Komparasi Awal

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah menyusun sebuah kerangka kerja perbandingan secara umum (*common comparative framework*). Kegiatan ini dapat diartikan juga upaya menentukan dimensi-dimensi komparasi, yaitu menentukan hal-hal apa yang akan dikomparasikan. Beberapa aspek yang dapat dikomparasikan misalnya tentang informasi umum pendidikan, inisiatif reformasi pendidikan, tujuan reformasi, kesempatan penduduk bersekolah; pola uji coba reformasi, prosedur implementasi, deskripsi reformasi, hasil pasca reformasi, dan sumber-sumber terpilih. Masing-masing dimensi komparasi yang berisi informasi data pendidikan dari dua daerah atau negara yang berbeda yang siap diperbandingan

5. Perumusan Hipotesis.

Kegiatan ini merupakan cara untuk menemukan hasil komparasi yang masih bersifat sementara setelah peneliti melakukan kegiatan juxtaposisi. Perumusan hipotesis komparasi berisi pernyataan-pernyataan perbandingan pendidikan antara dua daerah atau negara yang diperbandingkan, baik berupa persamaan maupun berupa perbedaan.

6. Komparasi Final

Kegiatan komparasi final dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat dan mendalam perbandingan pendidikan antara dua daerah atau negara dalam rangka mencari dan menemukan dua hal, yaitu: persamaan dan pertidaksamaan. Penemuan persamaan akan melahirkan *generalisasi* dan penemuan ketidaksamaan akan memunculkan *tipologi*.

7. Kesimpulan

Akhir dari semua proses penelitian induktif komparasi ini adalah dihasilkannya perumusan kesimpulan berupa *generalisasi* dan *tipologi* yang diperoleh. *Generalisasi* berupa kesimpulan umum tentang kondisi pendidikan relatif sama yang ada pada setiap daerah atau negara yang sedang diperbandingkan. Sedangkan *tipologi* berupa kesimpulan spesifik atau khas kondisi pendidikan yang ada pada setiap daerah atau negara yang berbeda satu sama lain.

Selain prosedur penelitian dengan metode induktif komparasi sebagaimana diungkapkan oleh George ZF. Bereday (1964), penelitian komparasi pendidikan memiliki kekhasan dalam hal analisis. Ada tiga cara dalam proses analisis komparasi pendidikan menurut Val D. Rust (2003), yaitu:

1. Analisis yang paling konvensional adalah analisis menemukan persamaan dan perbedaan pendidikan antara dua daerah atau negara atau wilayah-wilayah dunia. Tidak kurang dari sepertiga ahli-ahli peneliti komparasi pendidikan melakukan dengan cara ini.

2. Analisis terhadap suatu negara secara tunggal, kemudian dilanjutkan pada negara lain di luar negara yang bersangkutan, serta dilanjutkan lagi pada negara lain untuk suatu pokok penelitian. Inilah yang disebut dengan *multisite analysis*.
3. Analisis komparasi pendidikan dapat pula dilakukan pada satu negara untuk menguji teori-teori yang lebih umum. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat mendalilkan hubungan tertentu antar variabel kemudian mengujinya melalui pembuktian pada satu negara untuk melihat hubungan antar variabel tersebut.

D. Ringkasan

Secara umum studi pendidikan komparatif yang sudah berlangsung lama dimulai dari bersifat praktis kemudian lambat laun menjadi lebih bersifat keilmuan. John Griscom, Victor Cousin, Horace Mann, dan Matthew Arnold adalah tokoh-tokoh studi pendidikan perbandingan yang lebih bercorak kepraktisan. Isaac Leon Kandel, George ZF. Bereday, Gail F. Kelly, Harold Noah, dan Nicholas Hans adalah tokoh studi pendidikan perbandingan yang bercorak keilmuan. Ada tiga tahap perkembangan dalam studi pendidikan perbandingan, yaitu: tahap *borrowing*, kemudian berkembang menuju tahap *predicting* dan berlanjut menjadi *Analyzing*.

Agar dapat melakukan perbandingan dengan baik, dipersyaratkan adanya kesebandingan (*comparability*). Segi kesebandingan dalam melakukan studi perbandingan sistem pendidikan antar dua negara atau lebih yang berbeda antara lain adalah adanya kesamaan relatif dari aspek tingkat kemajuan pembangunan, latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, letak geografis,

Menurut Debold Van Dalen, metode ilmiah yang lazim digunakan dalam studi pendidikan komparatif adalah: (1) historis, (2) deskriptif, (3) eksperimen, dan (4) filosofis. Sedangkan George ZF. Bereday menyebut dua lagi yaitu (5) area, dan (6) komparasi. Secara garis besar metode komparasi dilakukan dengan empat ciri penting, yaitu: (a) deskripsi data pendidikan, (b) interpretasi, (c) Juxtaposisi, dan (d) komparasi.

Keragaman metode yang dipakai dalam melakukan studi komparasi pendidikan telah mendorong munculnya alternatif pengembangan

metode yang secara relatif lebih spesifik dapat digunakan lebih efektif untuk melakukan studi komparasi pendidikan. George ZF. Bereday sebagai professor di bidang Pendidikan Komparatif dari *Colombia University* akhirnya mengembangkan satu metode yang disebut dengan *Metode Induktif Komparasi* dengan langkah-langkah prosedural yang meliputi: (1) *penggalian data*, (2) *deskripsi data*, (3) *interpretasi*, (4) *Juxtaposisi atau Komparasi Awal*, (5) *perumusan hipotesis*, (6) *komparasi final*, dan (7) *kesimpulan*.

Ada tiga cara dalam proses analisis komparasi pendidikan menurut Val D. Rust (2003), yaitu: (1) Analisis menemukan persamaan dan perbedaan pendidikan antara negara; (2) Analisis *multisite*, yaitu analisis data suatu negara secara tunggal, kemudian dilanjutkan pada negara lain di luar negara yang bersangkutan, serta dilanjutkan lagi pada negara lain untuk suatu pokok penelitian; (3) Analisis pengujian teori-teori yang lebih umum tentang hubungan antar variabel pada satu negara untuk melihat hubungan antar variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary et.all, Donald. 1985. *Introduction to Research in Education*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bereday, George ZF. 1964. *Comparative Method in Education*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc..
- Chalidjah Hasan. 1995. *Kajian Pendidikan Perbandingan*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Imam Barnadib. 1994. *Pendidikan Perbandingan: Buku-1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rust, Val D. 2003. *Method and Methodology in Comparative Education*, in *Comparative Education review*. Chicago Vol. 47 Edisi 3, Aug 2003.
- Mortimor. 1988. *School Matters: The Junior Years*.

BAB VI

DIMENSI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

Setelah mencermati dan mengkaji secara seksama isi paparan pada bab keenam ini, maka Anda akan dapat:

1. Memahami perspektif teoritik hubungan pendidikan dan masyarakat.
2. Mengetahui kaitan dimensi sosial masyarakat dengan pendidikan
3. Mengetahui kaitan dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan
4. Mengetahui kaitan dimensi politik masyarakat dengan pendidikan
5. Memahami teori-teori pengiring pengembangan pendidikan

A. Perspektif Teoritik Hubungan Pendidikan dan Masyarakat

Semua bangsa dewasa ini berusaha meningkatkan mutu pendidikannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Berbagai upaya telah mereka dilakukan melalui aneka cara, baik melalui rekonstruksi fondasi filosofi dan ideologi, revisi orientasi, penyempurnaan organisasi, maupun perbaikan operasional praktisinya. Beberapa bentuk nyata yang telah mereka dilakukan terkait dengan upaya peningkatan mutu antara lain adalah melalui penyempurnaan regulasi atau perundang-undangan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pembaharuan kurikulum, peningkatan kelengkapan media dan sarana prasarana pendidikan, optimalisasi dukungan manajerial pendidikan, penambahan besaran pendanaan pendidikan, penyempurnaan alat evaluasi hasil belajar, dan lain-lain, yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan oleh semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, berangkat dari adanya keprihatinan mereka akan mutu pendidikan yang masih rendah. Persoalan rendahnya mutu pendidikan, misalnya yang terjadi di Indonesia, disebabkan antara lain oleh mutu dan distribusi tenaga kependidikan yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang kurang sesuai, dan lingkungan belajar yang tidak mendukung (Fasli Jalal & Dedi Supriadi, 2001). Sehingga aneka persoalan tadi secara bertahap dieliminir melalui langkah-langkah sistematis dan taktis dengan landasan pemikiran yang matang.

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan ini, I.L. Kandel merekomendasikan perlunya perhatian dari pelaku pendidikan terhadap hal-hal yang kelihatannya tidak tampak (*intangible*) akan tetapi memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan (Imam Barnadib, 1994). Hal-hal yang tidak tampak tetapi memiliki andil yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut antara lain berupa ideologi, pandangan hidup, keyakinan, orientasi nilai pun pula mitos-mitos historis yang berisi cerita kepahlawanan yang hidup dan dipercaya secara turun temurun dalam suatu bangsa.

Ideologi sebagai salah satu faktor *intangible* memiliki pengaruh luar biasa dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu bangsa. Ideologi menurut Sargent dalam bukunya '*Contemporary Political Ideologies*' (William F. O'Neil, 2001), diartikan sebagai sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Ideologi berupaya menggambarkan mengenai karakteristik-karakteristik umum tentang alam dan masyarakat; serta keterkaitan antar hakikat dunia dengan hakekat moral, politik, dan panduan-panduan perilaku lainnya yang bersifat *evaluatif*. Edward Stevens dan George H. Wood (1987) secara lebih khusus menyebut praktek pendidikan dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang disebutnya sebagai cita-cita sosial (*social ideals*).

Melalui ideologi atau cita-cita sosial tersebut penyelenggaraan pendidikan baik yang ada di jalur sekolah maupun luar sekolah ingin dikembangkan dan ditingkatkan mutunya untuk dapat memainkan peran-peran yang diharap. Misalnya apakah peran *legitimasi* atau peran *reformasi* dari keberadaan lembaga pendidikan. Peran legitimasi dalam arti bahwa proses pendidikan dapat melestarikan atau melanggengkan formasi sosial

yang ada (*status quo*), sedangkan peran reformasi dimaksudkan bahwa pendidikan dapat membangun atau bahkan merubah tatanan sosial menuju yang lebih baik. Kedua peran pendidikan tersebut beserta seluk beluk penyelenggaraan pendidikan di suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh *ideology* miliknya.

Sebagai contoh, bangsa Indonesia memiliki ideologi dengan nama ideologi Pancasila, bangsa lain yang menganut faham agama sebagai pandangan hidupnya meyakini ideologi agama yang dianut. Baik Pancasila maupun agama sebagai pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing penganutnya merupakan kekuatan besar yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan.

Adapun untuk konteks dunia, faktor-faktor *intangibile* yang mempengaruhi upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah pemikiran-pemikiran hasil keputusan dari beberapa konferensi internasional tentang pendidikan, seperti konferensi Internasional pendidikan yang pernah disponsori oleh UNESCO yang terjadi di Karachi (1960), Santiago (1962), Addis Ababa (1965), Soul (1966), Vancouver (1967), Dublin (1968) Abidjan (1969), Sydney (1970), Jamaika (1971), London (1972), Naerobi (1973), Singapura (1974) dan tempat-tempat lain yang berlangsung kemudian yang pada akhirnya menghasilkan resolusi-resolusi. Salah satu bunyi resolusi terpenting dari beberapa konferensi tersebut adalah agar di Afrika dan Asia dilaksanakan adanya pendidikan universal atau yang dikenal dengan istilah pendidikan untuk semua (*education for all*).

Beberapa konferensi internasional tentang pendidikan yang telah diselenggarakan tersebut merupakan komitmen dunia internasional terhadap upaya peningkatan mutu dan perluasan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini jelas dapat mempengaruhi potret penyelenggaraan pendidikan di beberapa negara terutama negara berkembang.

B. Kaitan dimensi Sosial Masyarakat dengan Pendidikan.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat tidaklah semata-mata *sui generi*, maka perlu kiranya memperhatikan aspek-aspek di luar pendidikan. Aspek di luar pendidikan tersebut merupakan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan

pendidikan. Paling tidak ada tiga aspek penting kehidupan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan pendidikan, yaitu yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik.

Dimensi sosial masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat tata struktur dan tata kultur hubungan antar individu warga masyarakat dan juga kelompok dalam merajut kehidupannya secara kolektif. Sebagai sebuah komunitas sosial dan kultural kolektif, maka masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik secara evolutif maupun revolutif. Beberapa teori telah menjelaskan tentang perubahan masyarakat yang bergerak dari kondisi tradisional menuju modern atau dari kondisi agraris menuju pada industrial.

Salah satu tokoh yang menjelaskan perkembangan sosial masyarakat dari kondisi tradisional menuju kepada kondisi modern adalah Daniel Lerner. Menurutnya, ada lima ciri masyarakat dikatakan telah mencapai taraf sosial modern (Imam Barnadib,1987), yaitu:

- a) Memiliki pertumbuhan ekonomi sampai pada taraf tertentu, atau setidaknya pertumbuhannya yang memadai untuk produksi dan konsumsi secara teratur.
- b) Adanya partisipasi warga masyarakat dalam pemerintahan secara demokratis.
- c) Adanya kemampuan berpikir yang rasional dan realistik dari warga masyarakat.
- d) Adanya mobilitas masyarakat dalam arti fisik, psikhis, dan sosial.
- e) Adanya transformasi pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan kepada warga masyarakat, sehingga mereka mampu berfungsi secara efektif dalam tata masyarakat.

Kalau pada awal modernisasi suatu negara mempunyai penduduk yang bekerja di sektor agraris adalah sekitar 85%, maka bila ingin sampai menjadi negara modern adalah dengan cara bertahap mengurangi profesi penduduk agraris sebesar 5% per tahun menuju profesi perdagangan dan jasa. Hal ini berarti bahwa modernisasi secara wajar pada negara tersebut membutuhkan waktu 17 tahun. Oleh karena itu untuk mempercepat upaya modernisasi di beberapa negara agraris, dibutuhkan banyak investasi sosial termasuk pendidikan.

Beberapa negara yang sekarang sudah tergolong mencapai kemajuan sosial sebagaimana terlihat pada negara-negara maju di Eropa, tidaklah mereka raih secara tiba-tiba. Usaha-usaha pengembangan telah banyak mereka lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga saat ini mereka mengalami pertumbuhan sosial dan peradaban yang cukup tinggi.

Menurut Ronald Inglehart (1997), tumbuhnya masyarakat menjadi masyarakat modern berhubungan erat dengan perubahan nilai kultural yang berawal dari sistem nilai yang dimiliki sebelumnya. Sistem nilai lama yaitu nilai survival (*survival values*) meliputi nilai-nilai konservatif serta nilai-nilai yang berorientasi kepada masa lalu dimiliki oleh negara-negara yang secara sosial masih tertinggal, sedangkan sistem nilai baru yaitu nilai ekspresi diri (*self-expression values*) antara lain meliputi kepercayaan interpersonal, toleransi, proaktif, kreatif, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan membawa masyarakat ke arah kemajuan secara sosial.

Pendapat di atas didukung oleh Harrison (1992) yang berpendapat bahwa pembangunan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural dasar masyarakatnya (*society's basic cultural values*). Fukuyama (1995) juga berpendapat bahwa kemampuan masyarakat dalam berkompetisi di pasar global dipengaruhi oleh kepercayaan sosial (*social trust*). Kesemuanya itu, merefleksikan adanya asumsi bahwa masyarakat dewasa ini ditandai oleh perbedaan ciri-ciri kultural yang telah berlangsung dalam waktu lama, dimana ciri-ciri tersebut selanjutnya akan memiliki dampak penting pada penampilan kemajuan sosial masyarakat.

Sistem nilai masyarakat akan dapat menggerakkan mereka sebagai modal pembangunan manakala dilandasi dengan kesadaran sosial. Kesadaran ini menjadi penting mengingat dengan bekal kesadaran seorang individu atau kelompok masyarakat dapat memanfaatkan sistem nilai yang dimilikinya secara bertanggungjawab untuk kemaslahatan masyarakat seluas-luasnya, sehingga akan menjadi pemicu luar biasa dalam menggerakkan pembangunan sosial. Persoalannya adalah bagaimana kesadaran itu dapat dimunculkan? Bagaimana pula mengusahakan kesadaran agar dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat menuju pada tatanan sosial yang lebih baik? Pada sisi inilah sesungguhnya peran pendidikan amat dibutuhkan. Pendidikan memiliki peran vital dalam menanamkan nilai-nilai perubahan sosial menuju pada

sistem baru yang lebih baik. Hilangnya kesadaran individu atau anggota kelompok masyarakat akan hal tersebut akan berakibat fatal.

Beberapa dampak dari sikap gegabah individu dan anggota masyarakat sebagai akibat dari ketiadaan kesadaran sosial sebagai anti klimak dari kemajuan peradaban adalah merebaknya aneka problem sosial, seperti: HIV/aids, kriminalitas, perlombaan senjata nuklir, polusi, inflasi, dan krisis energi. Hal ini sebagaimana diprihatinkan oleh Fritjof Capra (1997) terhadap kondisi masyarakat modern dewasa ini. Aneka problem sosial menurut Fritjof Capra (1997) tersebut memperoleh intensitasnya justru ketika kemajuan peradaban umat manusia mencapai puncaknya.

Aneka problem sosial yang bersifat global dewasa ini disamping disebabkan darikses kemajuan ipteks yang terkadang kurang memperhatikan keseimbangan sosio-ekologis, namun yang lebih penting sebenarnya adalah merosotnya moralitas manusia yang terkadang agak kelewat batas melewati kewajaran sehingga mengarah kepada perilaku moral yang bersifat destruktif. Oleh karena itulah, peran pendidikan amat penting untuk meluruskan kembali perilaku moral manusia (Muhammad Abdurrahman, 2003).

C. Kaitan Dimensi Ekonomi Masyarakat dengan Pendidikan

Dimensi ekonomi masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat pola produksi, distribusi, dan konsumsi individu serta kelompok dalam rangka mencapai kemakmurannya. Kehidupan ekonomi masyarakat dapat dipilah menjadi tiga, yakni ekonomi atas, ekonomi menengah, dan ekonomi bawah. Ekonomi atas dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong kaya raya, ekonomi menengah dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong sedang, dan ekonomi bawah dihuni oleh individu atau kelompok yang tergolong miskin atau melarat.

Kelompok masyarakat yang sudah mencapai taraf kemajuan ekonomi memiliki kemandapan pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Usaha-usaha untuk mewujudkan kondisi kemajuan ekonomi ini dilakukan dengan bantuan banyak modal, termasuk diantaranya adalah modal sumberdaya manusia yang memiliki peran amat besar. Sebaliknya

kondisi ekstrim yang tergambar pada kelompok masyarakat yang masih berada pada tingkat ekonomi rendah dengan keterlilitan kemiskinan, belum bisa berkembang antara lain disebabkan rendahnya mutu sumberdaya manusianya.

Usaha pengembangan ekonomi masyarakat tentulah berlandaskan pada sistem ekonomi yang dicita-citakan. Dewasa ini ada sejumlah sistem ekonomi yang dianut di dunia, yaitu sistem ekonomi: *kapitalisme*, *sosialisme*, *Pancasilaisme*, serta sistem ekonomi berdasarkan *agama*. Sekarang ini, sistem ekonomi yang dibangun di luar dari sistem kapitalisme telah banyak mengalami kegagalan. Seperti sistem ekonomi *sosialisme* yang sudah puluhan tahun dilakukan di negara Rusia dan beberapa negara Eropa Timur, ternyata kurang ada peningkatan berarti. Sedangkan sistem ekonomi berdasarkan ajaran agama nampaknya belum pernah dicobakan secara meluas di suatu negara. Satu-satunya yang paling berkembang dan banyak dilakukan di banyak negara adalah sistem ekonomi *kapitalisme*. Bahkan dalam beberapa sidang AFTA dan APEC telah disepakati pemberlakuan "*FreeTrading*" di beberapa kawasan dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Kemajuan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari kemajuan sektor industri. Kemajuan industri berkembang dari kondisi industri kecil atau industri rakyat berkembang menjadi industri besar atau industri modern. Industri kecil atau industri rakyat ditandai dengan ciri-ciri antara lain: modal kecil, produksi banyak menggunakan pekerjaan non mesin atau banyak menggunakan tenaga manusia, memakai peralatan dan teknik sederhana, produksi dilakukan di rumah, dan umumnya upah pekerja rendah. Sedangkan. Industri besar ditandai dengan ciri-ciri antara lain: modal yang digunakan besar, biaya berasal dari pemerintah, swasta nasional, patungan atau modal asing, menggunakan mesin modern dalam berproduksi, dan tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja terdidik, serta umumnya upah pekerja tinggi.

Dilihat dari tenaga kerjanya, industri masyarakat dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1. Industri rumah tangga (*home industry*), yaitu industri yang dikerjakan oleh pekerja yang jumlah sedikit, antara 1 sampai 4 orang.
2. Industri kecil (*small industry*), adalah industri yang dikerjakan oleh pekerja antara 5 sampai 19 orang.

3. Industri sedang atau industri menengah (*middle industry*), adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20-99 orang.
4. Industri besar (*big industry*), adalah industri yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang (Mc Cawley, 1981).

Sedangkan industri dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerjanya, dapat dibagi menjadi: (1) industri dengan tenaga kerja terdidik (*skilled labour*); (2) Industri dengan tenaga kerja terlatih (*trained labour*); (3) Industri dengan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih (*unskilled labour and untrained labour*); dan (4) Industri dengan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun latihan terlebih dahulu alias sudah terdidik dan terlatih.

Untuk menumbuhkan kemajuan industri pada khususnya yang kemudian berlanjut pada menumbuhkan kemajuan ekonomi masyarakat, diperlukan beberapa variable baik internal maupun eksternal ekonomi. Variabel internal ekonomi seperti berupa regulasi ekonomi yang efektif, keluasan jaringan, ketercukupan modal, adopsi teknologi, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur perbankan yang mendukung. Namun demikian tidak kalah pentingnya adalah variabel eksternal ekonomi antara lain berupa iklim usaha yang kondusif, sistem politik stabil, keamanan yang terjamin, serta sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu yang menjamin munculnya lulusan-lulusan bermutu pula. Dengan demikian dunia pendidikan memiliki andil tidak kecil dalam menopang upaya peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Pada bagian lain, penyelenggaraan pendidikan juga tidak luput dari pengaruh eksternal pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, Isaac Leon Kendel memandang perlu adanya perhatian terhadap hal-hal yang sesungguhnya tidak tampak (*intangible*) tetapi berpengaruh terhadap pendidikan (Imam Barnadib, 1994). Hal-hal yang tidak tampak tetapi memiliki andil yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain kondisi ekonomi masyarakat.

Ibarat dalam pertunjukkan wayang kulit, seorang dalang memiliki peran penting mempengaruhi, mengatur, dan mengarahkan jalannya pertunjukan tersebut. Tanpa dalang pertunjukan wayang tidak akan ada. Ibarat pentas sandiwara, sosok sutradara memegang peran penting dalam mengatur alur cerita dan hiruk pikuk seru tidaknya cerita, sehingga menarik tidaknya pementasan tersebut untuk ditonton tergantung dari

suntradara. Sehingga baik dalang maupun sandiriwara sangat menentukan dalam pertunjukan wayang kulit maupun pementasan sandiwara.

D. Kaitan Dimensi Politik Masyarakat dengan Pendidikan

Perkembangan dalam bidang politik adalah proses-proses yang terjadi sedemikian rupa sehingga orang menghayati dan mengamalkan norma-norma dan nilai-nilai yang bersumber dari sistem politik yang berlaku. Dalam kaitan perkembangan bidang politik dengan sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahannya James S. Coleman, berpendapat bahwa apa saja yang berada dalam negara perihal kewarganegaraan hendaklah juga berada di sekolah. Dengan kata lain, Coleman juga beserta tokoh lainnya berpendapat bahwa pendidikan adalah insitusi yang penting peranannya dalam hal pengembangan bidang politik.

Selanjutnya Coleman mengemukakan bahwa peranan sistem persekolahan dalam bidang politik dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Sosialisasi politik, yaitu sistem persekolahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional.
2. Seleksi dan latihan bagi kaum elit dalam bidang politik
3. Integrasi dan pembangunan kesadaran politik nasional.

Sosialisasi politik merupakan proses yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami internalisasi norma dan nilai suatu sistem politik. Sosialisasi politik sebenarnya bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan media massa, namun sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi politik yang terpenting.

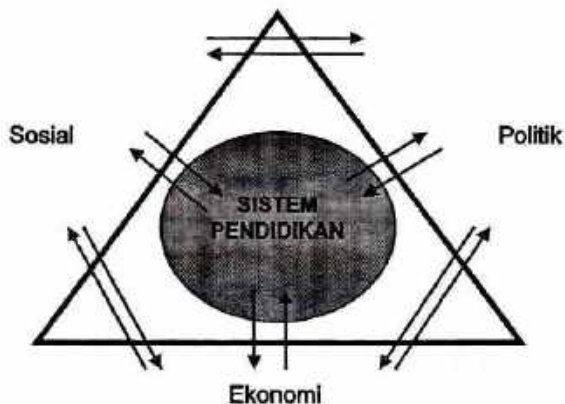
Melalui sekolah juga dapat dilakukan seleksi alamiah terhadap para calon elit politik melalui interaksi dan latihan berdemokrasi serta latihan kepemimpinan di lembaga-lembaga intra dan ekstra yang ada pada sekolah. Coleman menandakan bahwa para elit kekuasaan di masyarakat sebagian telah kelihatan menonjol dan mendapat pendidikan persiapan ketika di sekolah.

Sedangkan peran sekolah dalam integrasi politik dan kesadaran politik, disebabkan karena sekolah mengajarkan dan menanamkan nilai-

nilai kebudayaan politik yang seharusnya digunakan sebagai pegangan siswa sebagai warga negara. Dengan demikian sekolah sudah membekali anak didiknya sedini mungkin mengenai integrasi dan kesadaran politik.

Dari uraian di atas, baik menyangkut dimensi sosial masyarakat dan pendidikan, dimensi ekonomi masyarakat dan pendidikan, maupun dimensi politik masyarakat dan pendidikan, ketiganya jelas mengindikasikan adanya keterkaitan antara pendidikan dengan tiga aspek kehidupan masyarakat. Pola hubungan antara pendidikan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat di luar pendidikan tersebut, digambarkan oleh Fagerlind dan Saha (1983) sebagai berikut:

Tampilan-8
Model Hubungan Dialektis Pendidikan
dengan Tiga Aspek Kehidupan Masyarakat



Gambar tersebut menunjukkan secara skematis hubungan dialektis yang tak terpisahkan secara terus menerus antara pendidikan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat di luar pendidikan, yaitu sosial, ekonomi, dan politik.

E. Teori Pengiring Pengembangan Pendidikan

Telah banyak teori yang menjelaskan tentang pentingnya pengembangan pendidikan bagi perbaikan masyarakat. Dari teori-teori tersebut diantaranya adalah teori sumberdaya manusia (*human resources theory*) dari Theodore W. Schultz, teori modernisasi (*modernization theory*) dari Daniel Lerner, dan teori struktural-fungsional (*structural-functional theory*) dari Talcott Parsons (Imam Barnadib, 1987).

DAFTAR PUSTAKA

Ace Suryadi dan HAR Tilaar. 1994 *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* Bandung: Rosda Karya.

Ade Indah Nadhila. 2010. *Reformasi Pendidikan di Perancis*. (<http://perancis09upi.wordpress.com/2010/01>)

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan HAR Tilaar. 1994 *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* Bandung: Rosda Karya.
- Ade Indah Nadhila. 2010. *Reformasi Pendidikan di Perancis*. (<http://perancis09upi.wordpress.com/2010/01>)
- Altbach, Philip G; Arnove, R.F; and Kelly, Gail P. 1982. *Comparative Education*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities, Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*. London and New York: Greenwood Press.
- Anonim. 2008. *Pendidikan Dasar dan Menengah di Perancis*. (<http://www.oc.its.ac.id/ambilfile>, download 8 februari 2010)
- Anonim. 2010. (<http://asiacalling.kbr68h.com/index.php/archive/615download> 15 Februari 2010)
- Anonim. 2010. (www.ef.co.id/master/bc/destinations_uk/education.download 9 Februari 2010)
- Arcaro, Jerome S. 1995. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata langkah Penerapan*. Yogya-karta: Pustaka Pelajar,
- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LBM.
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta Laksbang Mediatama.
- Ary, Donald et.al. 1985. *Introduction to Research in Education*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Assié-Lumumba, N'Dri and Sutton, Margaret. 2004. *Global Trends in Comparative Research on Gender and Education*. Chicago: Comparative Education Review. Edition-4 November 2004. Volume 48,

- Bereday, George Z.F. 1964. *Comparatif Method in Education*. New York: Holt, Rinehart and Winstone Inc.
- Boyd, William. 1959. *The History of Western Education*. London: Adam & Charles Black.
- Brickman, William W. 1954. *Introduction to the Foundations of Comparative Education*. New York: School of Education NYU.
- Burnett, N., Marble, K. dan Patrinos, H.A. 1995. *Setting Investment Priorities in Education*. Finance and Development. December. Dalam Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Penerbit kerjasama: Bappenas, Depdiknas, dan Adicita Yogyakarta.
- Canton, James. 2006 *The Extreeme future*. New York, NY: Dutton, Penguin Group.
- Capra, Fritjof. 1997. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Chalidjah Hasan. 1995. *Kajian Perbandingan Pendidikan*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Chalmers, A.F. 1983. *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?: Suatu Penilaian Tentang Watak dan Status Ilmu serta Metodanya*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Cheppy Haricahyono. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Coombs, Philip H. 1973. *Non-formal Education for Rural Development*. United State of America.
- Cookson, Peter W. and Schneider, Barbara. 1995. *Transforming Schools*. New York: Garland Publishing, Inc.
- Cornoy, Martin et all. 1982. *The Political Ekonomy of Financing Education in Developing Countries*. International Development Research Centre Journal 'Financing Educational Development'. Ottawa Cadana: IDRC-CIDA.
- Coxon, Eve and Munce, Karen. 2008. *The global education agenda and the delivery of Aid to Pacific education*. Oxford: Comparative Education. Edition-2 May 2008. Volume 44.

- Dedi Supriyadi. 1999. *"Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional"*. Makalah Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia III, di Ujung Pandang, tanggal 4-7 Maret 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad Ke-21 (SPTK-21)*. Jakarta.
- Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, Dwi Siswoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.
- Dwi Siswoyo. 2007. *Membangkitkan Kembali Jati Diri Bangsa: Implikasi Terhadap Pendidikan Guru dan Dosen*. Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh FIP UNY bersama FORMOPPI dan Ditjen PMPTK pada tanggal 27 Mei 2007 di P4TK Matematika Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal PMPTK. 2006. *Rambu-Rambu Program Peningkatan Profesionalisme Guru*. Jakarta.
- Fagerlind, Ingemar and Saha, Lawrence J. 1983. *Education and National Development: A Comparative Perspective*. Oxford: Pergamon Press.
- Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Penerbit kerjasama: Bappenas, Depdiknas, dan Adicita Yogyakarta.
- Fiske, EB. 1996. *Decentralization of Education: Politics and Concensus*. Woshington, D.C.: World Bank. Dalam Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Penerbit kerjasama: Bappenas, Depdiknas, dan Adicita Yogyakarta.
- Francis Fukuyama. 2000. *"Social Capital"* dalam Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington. 2000. *"Culture Matters: How Values Shape Human Progress"*. New York: Basic Books
- Francis Wahono. 2001. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Glasser, William. 1993. *The Quality School Teacher*. New York: Harper Perenial.

- Griya Maya Faiq. 2007. *Mengintip Malaysia Membangun Pendidikan Dasarnya*. (<http://f4iqun.wordpress.com/> posted on Selasa, 8 Mei 2007).
- HAR Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- H.A. Sofyanis. 1999. "Penggalian Dana Pemanfaatan Sumberdaya Masyarakat". Makalah Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia III, di Ujung Pandang, tanggal 4-7 Maret 1999.
- Harrison. 1992. *Who Prospers? How Culture Values Shape Economic and Political Success*. New York: Basic
- Hoy, Wayne K. 2005. *Educational Administration*. Toronto: McGraw Hill.
- Illich, Ivan. 1972. *Deschooling Society*. New York: Harrow Books.
- Imam Barnadib. 1994. *Pendidikan Perbandingan: Buku-1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Imam Barnadib. 1987. *Pendidikan Perbandingan Buku Dua: Persekolahan dan Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Imazahra. 2009. Pendidikan Dasar Berbasis Akar Rumput di Inggris. (<http://www.muhammadiyah.or.id/index.php/published-2009>, didownload 8 Ferbuari 2010)
- Imran Manan. 1989. *Anthropologi Pendidikan Suatu Pengantar* (Buku terjemah karya George F. Kneller). Jakarta : P2LPTK Dirjen Dikti.
- Inglehart, Ronald. 2000. *Culture and Democracy* dalam Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington. 2000. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books
- International Development Research Centre. 1983. *Educational Financing in Developing Countries*. Ottawa Canada.
- Ivan Malik. (tahun tidak diketahui). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana (UMB). (<http://pksm.mercubuana.ac.id/modul/> download tanggal 12 Agustus 2008)
- Jones, Phillip W. Jones. 1998. *Comparative Education*. Oxford: Juny 1998. Volume 34, Edisi 2.

- Jujun S. Suriasumantri. 1987. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Ganesha.
- Kanchana Narasimhan. 2008. Pendidikan Inklusif dan Kepentingannya. *Jurnal Ilmiah IDP Norway EENET Asia Newsletter*, Edisi ke-6 Kwartal ke-2.
- Kelly, Gail P. , Altbach, Philip G. and Arnove Robert F. 1982. *Comparative Education*. New York: Macmillan Publishing Co.
- Keylor, William R. 2008. *World War-1*. Encarta ® 2008. Microsoft Corporation.
- Kneller, George F. 1965. *Educational Anthropology* yang diterjemahkan oleh Imran Manan. 1989. *Antropologi Pendidikan: Suatu Pengantar*. Jakarta: P2LPTK Ditjend Dikti Depdiknas RI.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martin, James. 2006. *The Meaning of the 21st century A vital blueprint for ensuring our future*. New South Wales: Random House Australia (PTY).
- Meyer, Adolph E. 1949. *The development of Education in the Twentieth Century*. Englewood: Prentice Hall Inc.
- Mochtar Mas'ood. 1997. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Munadi. 2009. *Sejarah Pendidikan Guru di Indonesia*. (<http://muhammadmunadi.blogspot.com/2009/11/sejarah-pendidikan-guru-di-indonesia>, download 11 Januari 2010).
- Mortimor. 1988. *School Matters: The Junior Years*.
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi III)*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nursid Sumaatmadja dan Kuswaya Wihardit, 2001. *Perspektif Global*. Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka.
- Oberlin Silalahi. 1989. *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Oneil, William F. 2001. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ornstein. 1984. *An Introduction to The Foundations of Education*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Pai, Young. 1990. *Cultural Foundations of Education*. Colombus, Ohio: A Bell and Howell Information Company.
- Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1990 tentang "Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional". Jakarta: Sinar Grafika.
- Postlethwaite, T. Neville. 1988. *The Encyclopedia of Comparative Education and National Systems of Education*. New York: Pergamon Press.
- Ragimun. 2007. *Bercermin pada mutu Pendidikan India*. Artikel Harian Bisnis Indonesia tanggal 12 April 2007. Dimuat juga pada tanggal 13 April 2007 di website ppiindia (<http://ppiindia.wordpress.com/2007/04/13/bercermin-pada-mutu-pendidikan-india/>)
- Reimer, Everett. 1987. *School Is Dead: An Essay on Alternatives in Education*. Telah diterjemahkan M. Soedomo. *Sekitar Eksistensi Sekolah*. Yogyakarta: Hanindita.
- Robert, Ulich. 1974. *History of Education*. New York: American Book Company.
- Rochmat Wahab. 2007. *Sertifikasi Guru sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Makalah)
- Rodee, Carlton Clymer dkk . 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rust, Val D. 2003. *Method and methodology in comparative education*. *Comparative Education Review*. Chicago, Aug 2003. Vol. 47, Edition 3.
- Sanapiah Faisal. 1991. *Pendidikan Luar Sekolah*. Surabaya (nama penerbit tidak terlacak).
- Sarbiran. 2009. *Model Mutu Pendidikan: Profesional Terpadu*. Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tanggal 25 April 2009 di Yogyakarta.
- Shellyana junaedi, 2004. *Dilema Riset Keprilakuan Teori Organisasi sebagai Ilmu Sosial dengan Menggunakan Model Ilmu Natural*. *Majalah Ekonomi*

bidang Ilmu Ekonomi, manajemen, dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unair Surabaya Volume 14 nomor 1 Tahun 2004.

- Smith, William A. 2001. *Conscientization Tajwan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stevens, Edward and Wood, George H. 1987. *Justice, Ideology, and Education*. New York: Random House
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi dkk. 2004. *Pedoman Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suparlan Suhartono. 2008. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Suryati Sidhartha. 1989. *Pendidikan di Negara Berkembang Suatu Tinjauan Komparatif*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Ditjend Dikti.
- Sutrisno. 2004. *Penjaminan Mutu Internal pada Institusi Pendidikan Tinggi*. Makalah Seminar Nasional Standar Pelayanan Akademik yang diselenggarakan oleh Program Hibah Kompetisi A2 Jurusan pendidikan teknik Elektro FT UNY di hotel Saphire September 2004.
- Thut, I.N. dan Adams, Don. 2005. *Pola-Pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar Tirtaraharja dan La Sulo. 1994. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- UNDP. 2001. *Human Development Report*.

- Wild, Elmer H. and Lottich, Kenneth V. 1964. *The Foundations of Modern Education*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Wikipedia. 2010. *Sejarah Malaysia*. (http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Malaysia, download 12 Februari 2010).
- Wikipedia. 2010. *Sejarah Thailand*. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Thailand, download 11 februari 2010).
- Wikipedia. 2010. *Kerajaan pada Zaman India Kuno*. ([http://id.wikipedia.org/wiki /Kerajaan_pada_zaman_India_kuno](http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_pada_zaman_India_kuno), download 12 Feb 2010).
- Wuryadi dkk. 2002. *Studi Pendanaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. (Draf Laporan Penelitian).
- Zamhasari Jamil. 2007. *Belajar di Perguruan Tinggi India*. Posted on January 9, 2007 (<http://ppiindia.wordpress.com/2007/01/09/belajar-di-perguruan-tinggi-india/> download 12 Februari 2010).
- Zamroni. 2007. *Mewujudkan pendidikan yang profesional: Diperlukan kecerdikan memanfaatkan peluang*. Makalah seminar pendidikan IKA Komisariat FIP di Universitas Negeri Yogyakarta 29 Januari 2007.
- Ziemke, Earl F. 2007. *World War II*. Microsoft Student. Redmond, WA: Microsoft Corporation.



Arif Rohman Lahir di Demak 29 Maret 1967 E-mail: arv2009@yahoo.co.id. Latar belakang pendidikannya adalah lulus sarjana Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (1986-1992), Magister ilmu-ilmu sosial Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (1997-2001), Program Doktor S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana UNY (2009-2012). Sehari-hari mengajar di program studi Kebijakan Pendidikan

FIP UNY mengampu mata kuliah: Analisis kebutuhan dan Pertencanaan kebijakan Pendidikan, Analisis Biaya Pendidikan, Demokrasi dan Pendidikan. Selain itu mengampu pula di beberapa program studi di lingkungan UNY mata kuliah Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Komparatif. Kegiatan lain adalah aktif dalam beberapa seminar sebagai pembicara dan peserta, aktif meneliti, dan kegiatan sosial keagamaan. Menjadi sekretaris Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan di Lembaga Penelitian UNY (2008-2011); Redaktur majalah ilmiah FIP UNY "Pondasi Pendidikan" (2000-2011); Pembina Majalah Mahasiswa UNY "Ekspresi" (2002-2006). Pernah juga selama empat tahun (2005-2008) dipercaya Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemendikbud sebagai tim pengembang Klinik Pembelajaran dengan sasaran guru-guru SD di tujuh kota di Indonesia.

Buku yang sudah ditulis meliputi: **Kebijakan Pendidikan** (Aswaja Pressindo, 2012) **Education Policy in Decentralization Era** (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010), **Pendidikan Komparatif: Menuju ke Arah Metode Perbandingan Pendidikan Antarneegara** (Laksbang Grafika Yogyakarta, 2010), **Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan** (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2009); **Politik Ideologi Pendidikan** (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2009). **Ilmu Pendidikan** (UNY Press Yogyakarta, 2008, 2009, 2010, 2011), **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Booklet untuk Peserta Klinik Pembelajaran** (Direktorat Ketenagaan Ditjend Dikti Kemendikbud, 2007), **Pengetahuan Sosiologi untuk SLTP klas VII dan kelas VIII** (Saka Mitra Kompetensi Klaten, 2005 dan 2006); **Sosiologi SLTA kelas X, XI, dan XII** (Cempaka Putih Klaten, 2004); **Sosiologi SLTA kelas X, XI, XII** (Saka Mitra Kompetensi Klaten, 2005 dan 2006).

Penerbit:

CV. ASWAJA PRESSINDO

Anggota IKAPI No. 077 / 05 / 2004

Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani, Yogyakarta

Telp (0274) 4462377

Email: aswajapressindo@gmail.com

Website: www.aswajapressindo.co.id

ISBN 978-602-772-72-1



9 786027 772725